



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
2024**

ALUN - ALUN BANGLI

PROVINSI BALI
KABUPATEN BANGLI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
2024



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

- 14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.			
APBD	Tahun Anggaran	2025	berjumlah Rp.
1.218.328.853.411,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :			
a.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.204.328.853.411,00
b.	Belanja Daerah	Rp.	1.218.328.853.411,00
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(14.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp.	27.500.000.000,00
	2. Pengeluaran	Rp.	13.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	14.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan			
Anggaran Tahun Berkenaan		Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.204.328.853.411,00 (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 307.453.242.000,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.596.300.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.646.304.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.528.538.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 891.195.807.411,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 842.730.907.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.464.900.411,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.218.328.853.411,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.210.393.306,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.170.824.963,83 (enam ratus sebelas miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.260.908.976,17 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.007.521.732,00 (sembilan belas miliar tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.276.399.043,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.196.682.243,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.553.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.740.413.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.942.829.300,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 843.347.500,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 167.614.725.600,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.845.170.400,00 (dua belas

miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024


BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (16,
76/2024)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 900.1.3/21/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menyetujui penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN



[Signature]
SUASTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 900.1.3/15 /KEP.PIMP/DPRD/2024
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Tujuan Evaluasi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup: A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).		
II.	Gambaran Umum Evaluasi Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati. Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu: A. Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 dirancang sebesar 5,50 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 2,00 dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 sebesar 3,50 2 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2025 sebesar 0,75 tidak mengalami perubahan dengan capaian tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2023 sebesar 0,75. 3 Proyeksi Kemiskinan Proyeksi kemiskinan pada Tahun 2025 sebesar 4,43% diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,85 dibandingkan dengan capaian kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 5,28. 4 Proyeksi Gini Rasio	Berdasarkan Tabel 1, Proyeksi Pertumbuhan ekonomi yang dirancang pada KUA PPAS Kabupaten Bangli Tahun 2025 sebesar 5,50%, dan target laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sesuai dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran) sebesar 5,3% - 6,3%.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai dengan Petunjuk Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan penyesuaian pada Buku Kerangka Ekonomi Makro pada Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Proyeksi gini rasio pada Tahun 2025 sebesar 0,28 diperkirakan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan capaian gini rasio pada Tahun 2023 sebesar 0,28. 5 Indeks Pembangunan Manusia Proyeksi tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2025 sebesar 72,24 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,45 dibandingkan dengan capaian tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2023 sebesar 70,79 Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target makro pada KUA PPAS TA 2025 agar berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangli. B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan pada Tabel 2 sebagai berikut: C. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan Kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut: 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2025 2 Penyampaian Rancangan (KUA) dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP 3 Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD 4 Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli 5 Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli 6 Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Bangli 7 Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bangli dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD 2025 8 Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Bangli untuk dievaluasi	Sesuai, (paling lambat 7 hari kerja setelah Pergub tentang RKPD Provinsi ditetapkan atau minggu I Bulan Juli) Sesuai, (paling lambat minggu I Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu I Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II Bulan September) Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berakhir) Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda P-APBD) Berdasarkan Tabel 3 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli harus tetap memperhatikan konsistensi setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai dengan Petunjuk Pemerintah Provinsi Bali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai tabel yang ada pada lembar evaluasi pemerintah Provinsi Peraturan Bupati Bangli Nomor 14 Tahun 2024, 1 Juli 2024 900.1.1.1/ 1189/BKPAD, 3 Juli 2024 900.1.1 1/1190/BKPAD, 4 Juli 2024 900.1.2/1340/BKPAD 900 1.2/521/DPRD, 31 Juli 2024 900.1.2/1341/BKPAD 900 1.2/522/DPRD, 31 Juli 2024 900 1.1.1/1583/BKPAD, 13 September 2024 9001.2/1818/BKPAD 900.1.2/782/DPRD,31 Oktober 2024 900.1.1/ 1830/BKPAD,4 Nopember 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
III.	Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam memenuhi mandatory spending, sebagai berikut: 1. ☐ Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp317.541.680.200,00 atau 26,36% dari total belanja daerah Rp1.204.436.695.963,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan uraian perhitungan sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk: 1 mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2 mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan 3 meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kabupaten Bangli akan mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten bangli akan berusaha meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Penyusunan APB Tahun Anggaran 2025
		Berdasarkan Tabel 4 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha selalu mempertahankan alokasi anggaran fungsi pendidikan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. ☐ Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.241.500.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pemerintah Kabupaten Bangli belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan sebagaimana Tabel 5 sebagai berikut:	Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Berdasarkan Tabel 5 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 5.3.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi Pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke pada daerah dan/atau desa, sebagaimana maksud butir 3.2.2.k dan 3.2.2.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	3. ☐ Alokasi Anggaran Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp611.577.533.255,33 atau 50,78% yang diproyeksikan dalam Tabel 6 sebagai berikut: Berdasarkan tabel 6 tersebut, jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp550.472.232.255,33 atau 45,70% dari total belanja daerah, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan dalam pengalokasian belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir 3.2.2.j, butir 3.4.1.1.c dan butir 3.2.2.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha menyesuaikan dalam pengalokasian belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% hingga sampai pada tahun anggaran 2027
	4. ☐ Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya: 1. Penggunaan Opsen PKB		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total alokasi penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB sebesar Rp4.866.400.000,00 atau 24,71% dari total Pendapatan Opsen PKB sebesar Rp19.695.000.000,00.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2024 dan berusaha untuk selalu konsisten pada tahun anggaran berikutnya
	2. Penggunaan PBJT atas Tenaga Listrik Total alokasi penggunaan hasil penerimaan PBJT-TL sebesar Rp1.343.782.000,00 atau 8,96% dari total pendapatan PBJT-TL sebesar Rp15.000.000.000,00.	Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik: 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). Sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	untuk penggaran PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan
	3. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.	Sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI. 2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa: (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan (2) operasi pemberantasan rokok ilegal. diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum. 4. Penggunaan Pajak Air Tanah Total alokasi penggunaan hasil penerimaan PAT Rp102.720.000,00 atau 15,56% dari total pendapatan PAT sebesar Rp660.000.000,00 B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun .. 1. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp47.379.569.200,00 atau 15,06% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp314.693.773.400,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain: a. pengelolaan pendidikan dasar dan kesetaraan sebesar Rp20.710.658.600,00 ; dan	Hasil penerimaan PAT sudah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rapor Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebesar Rp5.776.730.000,00 2. SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp7.261.939.000,00 atau 2,71% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Kesehatan Rp268.320.406.032,00. a. sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp1.047.150.000,00; b. sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp542.900.000,00; c. sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp723.150.000,00; d. sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp149.950.000,00 ; e. sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebesar Rp545.230.000,00; f. sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp96.750.000,00; g. sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar Rp525.050.000,00 ; h. sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) sebesar Rp144.450.000,00; i. sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp1.743.590.000,00; j. sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp315.115.000,00; k. sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp536.194.000,00; dan l. sub kegiatan pelayanan kesehatan balita sebesar Rp892.410.000,00. 3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.492.873.962,00 atau 36,91% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.972.709.931,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp5.161.436.981,00; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar Rp2.310.000.000,00 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp350.000.000,00 atau 5,69% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.154.540.000,00 yang diuraikan dalam pembangunan rumah bagi korban bencana sebesar Rp350.000.000,00. 5. SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp772.867.600,00 atau 13,73% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp5.628.862.550,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain: a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar Rp144.652.800,00; b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sebesar Rp144.652.800,00; c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar Rp144.652.800,00; d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp144.652.800,00; dan e. perlindungan dan jaminan sosial Pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp144.652.800,00.	Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial untuk kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp3.875.376.600,00 atau 19,04% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp20.349.318.250,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain Pada: a. pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp1.293.153.300,00; b. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp257.320.000,00; dan c. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten/kota sebesar Rp1.293.153.300,00. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli [tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.	Harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibum Linmas untuk Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli akan mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025
	C. Penyediaan anggaran Alokasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang prioritas nasional sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi Stunting Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi kekurangan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi stunting (kurus) pada anak balita sebesar Rp52.371.710.181,00 atau 4,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: a. sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp 2.869.172.300,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Obat-Obatan-Obat Rp284.383.500,00, Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp214.387.800,00, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp164.160.000,00, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp573.480.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp150.290.000,00; b. sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp34.744.448.575,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp224.019.600,00, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp39.840.000,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.260.480.000,00, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas Rp33.219.148.975,00;	Uraian belanja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Daerah pada masing-masing sub kegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Daerah pada masing-masing sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli Tetap berusaha untuk memprioritaskan alokasi belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp2.424.859.325,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Puskesmas Bangli Rp225.466.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Puskesmas Kintamani IV Rp240.456.100,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Puskesmas Kintamani V Rp241.991.200,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Puskesmas Kintamani IV Rp226.895.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp237.299.200,00; d. sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp871.795.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp211.400.000,00, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp151.050.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Bangli Utara Rp73.500.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Kintamani II Rp90.640.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Kintamani III Rp84.000.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas-Kintamani V Rp100.100.000,00; e. sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 5.161.436.981,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.990.496.981,00, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp35.040.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp34.500.000,00, Belanja Modal Personal Computer Rp82.700.000,00; dan f. sub kegiatan Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota Rp2.310.000.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp2.310.000.000,00 2. Alokasi Anggaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Penyediaan anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp112.844.166.500,00 atau 9,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang antara lain tercantum pada: a. sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp23.499.024.600,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja Rp634.920.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler Rp20.370.190.370,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler Rp2.159.237.730,00; b. sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp14.635.185.400 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja Rp327.080.000,00, Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler Rp12.720.634.885,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler Rp185.478.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler Rp1.124.152.515,00;	Uraian belanja dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada masing-masing sub kegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada masing-masing sub kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha untuk memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp34.744.448.575,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp1.260.480.000,00, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 Rp33.219.148.975,00, Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 Rp224.019.600,00. 3. Alokasi Pengendalian Inflasi Penyediaan anggaran pengendalian Inflasi di Daerah sebesar Rp25.534.134.650,00 atau 2,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain dianggarkan antara lain pada: a. sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi Rp3.755.474.800,00 diuraikan dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; b. sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp9.657.640.000,00 diuraikan ke dalam Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 39.840.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 70.000.000,00, Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp 9.547.800.000,00 ; c. sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp4.917.400.000,00 diuraikan ke dalam Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp 477.762.100,00, Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp1.885.403.100,00, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp 2.167.520.000,00, dan Belanja Modal Personal Computer Rp170.000.000,00; dan d. sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.623.988.200,00 diuraikan ke dalam Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp120.000.000,00, Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp135.000.000,00, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp1.900.000.000,00, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp330.000.000,00, Belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp240.000.000,00, Belanja Tagihan Listrik Rp498.052.500,00. 4. Alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat Penyediaan anggaran dalam rangka Makanan Gizi sehat sebesar Rp2.424.859.325,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Bangli memedomani: a. mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;	Uraian belanja dalam rangka pengendalian Inflasi pada masing-masing sub kegiatan tersebut harus memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Salah satu faktor yang menentukan produktivitas pertanian adalah ketersediaan air irigasi yang stabil dan terencana dengan baik, sehingga dapat menjaga tingkat produksi pangan yang optimal. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan terutama untuk bahan pokok akan berperan langsung dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, yang berdampak positif terhadap inflasi daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi dengan fokus pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha menyediakan anggaran pengendalian inflasi di daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengalokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya tetap mendukung pengendalian inflasi dengan fokus pada strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan; dan c. dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.2.d Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp299.994.345.595,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran peningkatan produk dalam negeri memiliki tujuan utama untuk memperkuat serta mengurangi ketergantungan pada produk impor serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri. D. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah 1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Nasional diproyeksikan sebagaimana Tabel 7 sebagai berikut: Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas Tahun 2025, serta mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: a. memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); b. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; c. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; d. memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 wajib mengalokasikan anggaran dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berdasarkan Tabel 7 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyelaraskan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha mengalokasikan anggaran dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam rangka mematuhi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Terimakasih atas atensinya, Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli untuk selalu menyelaraskan dukungan anggaran terhadap prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; f. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; g. pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan; dan h. memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang tercantum dalam RKPD Tahun Anggaran 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 yang tertuang pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2024, meliputi: a. pertanian, kelautan, IKM UMKM, dan pariwisata; b. pendidikan, IPTEK, dan kesehatan; c. tenaga kerja dan kesejahteraan sosial; d. adat, tradisi, seni, dan budaya; e. lingkungan hidup dan ketahanan bencana; f. infrastruktur; dan g. tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan dalam Tabel 8 sebagai berikut: Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2025 tertuang dalam Tabel 9 sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 9 tersebut, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dimaksud tidak sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam SIPD RI. E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sebesar Rp13.097.818.200,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat Rp5.253.742.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah;	Berdasarkan Tabel 8 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Terimakasih atensinya, Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha untuk menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan RKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan berusaha untuk konsisten pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI. Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah untuk anggaran total dinspektorat yang dikurangi dengan belanja gaji dan tunjangan ASN akan dipenuhi secara bertahap

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. TPP sebesar Rp3.652.300.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah; dan c. alokasi belanja Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan dan TPP sebesar Rp4.191.776.200,00 atau 0,35% dari total belanja daerah, yang antara lain tercantum pada program yang mendukung pengawasan yaitu: 1) program penyelenggaraan pengawasan dianggarkan sebesar Rp279.630.000,00; dan 2) program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dianggarkan sebesar Rp755.450.000,00. Pemerintah Kabupaten Bangli belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00	a. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan, yaitu: 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; 4) reviu laporan keuangan; 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. b. peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop dan alat pengukur beton dan lain-lain. Sebagaimana maksud butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	2. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum Pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp895.082.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada kegiatan:	Penggunaan untuk biaya pendidikan pelatihan bagi ASN diprioritaskan antara lain:	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis sebesar Rp252.645.500,00 dan b. kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebesar Rp642.436.500,00. Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang belum melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya. 3. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Generasi Muda (Paskibraka) Penyediaan alokasi anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Pada Badan Kesatuan Bangsa sebesar Rp955.415.450,00 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025. 4. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	a. pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah berupa sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dalam meningkatkan kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Aparatur pengelolaan keuangan daerah termasuk peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah; dan b. pendidikan dan Pelatihan bagi operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jabatan fungsional lainnya pada SKPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.2.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka sebagaimana maksud butir 5.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menindaklanjuti untuk penggaran Uji Kompetensi dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah berupa sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dalam meningkatkan kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Aparatur pengelolaan keuangan daerah termasuk peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dan akan dilaksanakan secara bertahap Untuk pendidikan dan Pelatihan bagi operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan segera dikoordinasikan ke BKPSDM karena belum ada kurikulum dalam pelaksanaan ini Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan alokasi anggaran untuk FKUB sebesar Rp125.605.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan Pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Bangli.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	5. Alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan alokasi anggaran untuk Forkompinda Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp587.385.000,00 atau 0,05% dari total Belanja Daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		
	6. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan alokasi anggaran TP-PKK sebesar Rp1.397.944.350,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.	Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui: a. upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga ann trafficking. dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
IV.	d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung Pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (Ibu Hamil), Melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkooperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat. g. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/ kabupaten/kota dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.		
	Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran A. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam Tabel 10 sebagai berikut:	Berdasarkan Tabel 10 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar terus mempertahankan konsistensi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
V.	Kebijakan Pendapatan Daerah A. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang 1. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp307.453.242.000,00 atau 25,83% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir (APBD T.A 2022, 2023 dan APBD 2024) dibandingkan dengan RAPBD 2025 diproyeksikan pada Tabel 11 sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 11 Pemerintah Kabupaten Bangli memasang Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp242.712.215.224,00 dibandingkan Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.433.148.911.187,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp180.781.704.963,00 dibandingkan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.371.218.400.926,00 serta mengalami peningkatan sebesar Rp47.231.624.975,00 dibandingkan Pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.143.205.070.988,00. Target pendapatan daerah Kabupaten Bangli pada 3 tahun terakhir rata-rata tidak mencapai target. a. Pendapatan Asli Daerah Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan tren realisasi PAD Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp182.356.487.885,95 atau 67,91% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan data tren realisasi PAD pada Tabel 2, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan analisa serta melakukan perhitungan kembali atas target PAD, yang disesuaikan dengan perkiraan/proyek realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan melakukan analisa serta melakukan perhitungan kembali atas target PAD, yang disesuaikan dengan perkiraan/proyek realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp219.918.641.353,81 atau 86,06% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; 3) realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Desember Rp144.005.842.858,50 atau 97,88% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022; Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target PAD yang sebesar Rp307.453.242.000,00 atau 25,83% dari total pendapatan daerah terdiri dari: 1) Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan a) pajak reklame sebesar Rp1.078.000.000,00; b) pajak air tanah sebesar Rp660.000.000,00; c) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp4.427.500.000,00; d) pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp12.500.000.000,00; e) pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp37.176.500.000,00. f) opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp19.695.000.000,00; dan g) opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp18.059.300.000,00. 2) Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp189.646.304.000,00 atau 15,93% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah: a) retribusi jasa umum sebesar Rp126.484.900.000,00; b) retribusi jasa usaha sebesar Rp59.486.404.000,00; dan c) retribusi perizinan tertentu sebesar Rp3.675.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan Pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi cost sharing yang tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.1.1.1.p. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut: a) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; b) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: a) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; b) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan c) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.3.1.1.2.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Sedangkan, untuk hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir 3.3.1.1.2.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.682.100.000,00 atau 0,56% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: a) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp6.310.100.000,00; b) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp6.000.000,00; dan c) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp366.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp17.528.538.000,00 atau 1,47% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: a) hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp397.000.000,00;	Pemerintah Kabupaten Bangli masih menganggarkan Pendapatan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini tidak sesuai dengan jenis dan objek retribusi daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu agar disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, dengan tetap berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir 3.3.1.2.b Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris/pengawas dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.384.862.000,00; c) jasa giro sebesar Rp3.706.000.000,00; d) pendapatan bunga sebesar Rp3.053.062.000,00; e) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.000.000.000,00; f) pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp226.000.000,00; g) pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp50.000.000,00; dan h) pendapatan dari pengembalian sebesar Rp8.421.614.000,00. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah kabupaten Bangli dalam menetapkan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Oktober Rp3.742.647.449,41 atau 36,51% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp10.252.256.928,00; b) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp104.313.105.249,73 atau 79,50% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp131.215.725.326,00; c) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp65.373.052.672,05 atau 87,17% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp74.993.763.780,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli agar realistis dan cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi Belanja daerah, sehingga perencanaan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan Pada potensi pendapatan daerah dimaksud.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	b. Pendapatan Transfer		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp882.983.453.963,00 atau 74,17% dari total pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan Target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.164.612.703.174,00 atau 81,26% dari total pendapatan daerah dan mengalami penurunan dibandingkan Target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.114.886.421.100,00 atau 81,31% dari total Pendapatan Daerah serta mengalami penurunan dibandingkan target Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp995.207.663.459,00 atau 87,05% dari total pendapatan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan tren realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp252.280.672.698,00 atau 21,66% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp1.041.925.817.049,00 atau 93,46% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan 3) realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Desember Rp960.732.038.900,00 atau 96,54% dari total Pendapatan Transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data tren realisasi Pendapatan Transfer tersebut khususnya Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Jembrana harus melakukan perhitungan Kembali atas target Pendapatan Transfer, sesuai butir 3.3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp882.983.453.963,00 atau 74,17% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp838.234.027.000,00 atau 70,41% dari total pendapatan daerah, antara lain: a) dana desa sebesar Rp62.508.182.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025; b) insentif fiskal sebesar Rp30.352.227.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025; c) dana bagi hasil sebesar Rp19.173.163.000,00, tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d) dana alokasi umum sebesar Rp591.978.327.000,00, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025; dan e) Dana alokasi khusus terdiri dari: (a) dana alokasi khusus fisik sebesar Rp14.611.387.000,00, tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.108.267.000,00; dan (b) dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp119.610.741.000,00, tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025. 2) Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp44.749.426.963,00 atau 3,76% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: a) Pendapatan Bagi Hasil Target Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp40.275.249.837,00 yang diuraikan pada: (1) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp21.976.779.366,00; (2) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp40.496.981,00; dan (3) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp18.257.973.490,00. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/7438/PADFE/BPKAD tanggal 15 Nopember 2024 hal Revisi Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2025, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp40.339.297.589,00 sebagai berikut: 1 pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp21.976.779.366,00; 2 pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp40.496.981,00; dan 3 pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp18.322.021.242,00 Dalam hal telah ditetapkan pagu definitif Bagi Hasil Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan penyesuaian alokasi bagi hasil pajak definitif dimaksud. Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: a) penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan	Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, terhadap beberpa perbedaan anggaran pendapatan yang berbeda antara pagu definitif dengan Rancangan APBD Kabupaten Bangli Tahun 2025 maka Kami Akan Sesuaikan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp4.474.177.126,00 atau 0,38% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir 3.3.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1, butir 3.3.2.1.1, butir 3.3.2.1.2, butir 3.3.2.1.3, butir 3.3.2.1.6, butir 3.3.2.1.7, dan butir 3.3.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Perintah Kabupaten Bangli akan melakukan penyesuaian penganggaran TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
VI.	Kebijakan Belanja Daerah		
	A. kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, kemampuan belanja daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan stunting, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem; 2. dalam rangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPd serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3. berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud butir 3.2.2.0 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; 5. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Bangli 6. belanja daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan 7. belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir 3.2.4.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.204.436.695.963,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut: Tren alokasi dan realisasi belanja daerah selama 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Tabel 12 Pemerintah Kabupaten Bangli memasang Target Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.204.436.695.963,00 mengalami penurunan sebesar Rp270.958.147.391,00 dibandingkan Target Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.265.186.818.185,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan Belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.948.720.159,00 dan mengalami peningkatan pada Belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp236.347.751.114,00. 1. Belanja Operasi Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp967.518.931.308,00 atau 80,33% dari total belanja daerah Rp1.204.436.695.963,00 memperhatikan tren realisasi belanja operasi Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp942.831.988.813,41 atau 65,73% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024; b. realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp1.292.282.977.582,22 atau 91,57% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan c. realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Desember Rp1.239.853.052.692,60 atau 93,81% dari total belanja operasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berdasarkan data tren realisasi belanja operasi tersebut khususnya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja operasi, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp967.518.931.308,00 atau 80,33% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp611.577.533.255,33 atau 50,78% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan antara lain pada: 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp347.111.713.150,00 atau 28,82% dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada: a) belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut: (1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp17.502.288.038,00 atau 1,45 dari total belanja daerah, sebagaimana Tabel 13 sebagai berikut: Berdasarkan tabel 13 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN seharusnya Rp20.663.574.958,68 atau terdapat selisih kurang Rp3.161.286.920,68. (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp66.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atau 0,01% dari total belanja daerah, sebagaimana Tabel 14 sebagai berikut:	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berdasarkan Tabel 14 tersebut, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp74.482.842,00 atau terdapat selisih kurang Rp8.482.842,00. (3) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH sebesar Rp42.000.000,00 atau 0,00% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 15 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (4) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada: (a) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada: 1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp581.507.391,00 atau 0,05% belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp618.359.759,51 atau terdapat selisih kurang Rp36.852.368,51 dan	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar secara terus menerus dan tetap konsisten mengalokasikan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha tetap konsisten mengalokasikan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli akan mempedomani Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.649.213.594,00 atau 0,14% belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya belanja iuran jaminan kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp1.855.079.278,52 atau terdapat selisih kurang Rp205.865.684,52 (5) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada: 1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp1.200.000,00atau 0,00% dari total belanja daerah; 2) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp3.600.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; 3) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; dan 4) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp36.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir 5.3.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (6) hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain: 1) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp22.272.534.000,00 atau 1,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu:	Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(a) belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 16 sebagai berikut:	Berdasarkan Tabel 16 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu mempedomani Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(7) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% dari uang representasi yaitu Rp974.095.500,00.	Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli agar secara terus menerus dan tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha selalu konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
	(8) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp122.134.950,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	(9) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 17 sebagai berikut; Berdasarkan Tabel 17 tersebut, besaran alokasi anggaran untuk Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000,00	Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap konsisten dan secara terus menerus mengalokasikan anggaran besaran untuk Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.	Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha selalu konsisten mempedomani Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
	(10) belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berdasarkan Tabel 18 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 yaitu sebesar Rp945.000.000,00. (11) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja: a) belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp334.760.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; b) belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp10.328.700.000,00 atau 0,86% dari total belanja daerah; c) belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp10.220.700.000,00 atau 0,85% dari total belanja daerah; d) belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp4.836.468.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah; dan e) belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah, Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) penyediaan anggaran belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp204.480.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 19 sebagai berikut:	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap konsisten secara terus menerus dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Tabel 19 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, pengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna meluncurkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(13) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp1.228.510.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah; (14) belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah sebesar Rp1.286.316.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; (15) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar 804.480.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (16) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah yang dapat dianggarkan dengan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp461.179.863,00. (17) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan PenghasilanASN sebesar Rp194.027.130.174,00 atau 16,11% yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp103.596.932.343,00 atau 8,60% dari total belanja daerah; b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp28.042.934.800,00 atau 2,33% dari total belanja daerah; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp62.387.263.031,00 atau 5,18% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; d. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp46.111.126.830,00 atau 3,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Bangli dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.1.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud butir 3.3.2.1.3.2.i. Lampiran Peraturan	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, dimana pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengalokasikan Dana Operasional KDH/WKDH akan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp96.838.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (18) Belanja Pegawai BLUD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp44.621.369.931,33 atau 3,70% dari total belanja daerah 2. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp333.942.738.686,67 atau 27,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) belanja barang sebesar Rp66.298.773.344,00 atau 5,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja barang pakai habis sebesar Rp66.298.773.344,00 atau 5,50% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp6.595.434.063,00 atau 0,55% dari total belanja daerah; (2) belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp2.939.544.100,00 atau 0,24% dari total belanja daerah; (3) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantorsebesar Rp2.874.963.300,00 atau 0,24% dari total belanja daerah; (4) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp24.090.516.000,00 atau 2,00% dari total belanja daerah; (5) belanja obat-obatan-obat sebesar Rp793.301.300,00 atau 0,07% dari total belanja daerah; (6) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp14.281.181.081,00 atau 1,19% dari total belanja daerah; (7) belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp2.380.266.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah; (8) belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp3.021.502.000,00 atau 0,25% dari total belanja daerah; dan	Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(9) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp1.256.040.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah. Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.1.b dan butir 3.4.1.2.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, non e-tendering dan non epurchasing, serta e-kontrak sebagaimana dimaksud butir 5.2.5.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa akan selalu memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, non e-tendering dan non epurchasing, serta e-kontrak sebagaimana dimaksud butir 5.2.5.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024., dan telah berusaha dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Bangli
	2) belanja jasa sebesar Rp141.682.790.382,00 atau 11,76% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja jasa kantor sebesar Rp94.447.520.807,00 atau 7,84% yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp2.005.300.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah; (2) belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp941.970.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; (3) belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp2.203.200.000,00 atau 0,18% dari total (4) belanja daerah;belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp3.600.600.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah; (5) belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp1.634.500.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah; 6) belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp28.733.000.000,00 atau 2,39% dari total belanja daerah;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(7) belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp27.400.580.200,00 atau 2,27% dari total belanja daerah; (8) belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp1.220.200.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah; (9) belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp5.243.800.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah; (10) belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp1.866.630.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah; (11) belanja tagihan PBJT sebesar Rp3.288.926.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah; dan (12) belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp2.718.100.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah. Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Kabupaten, asosiasi DPRD kabupaten dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
	b) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp34.703.648.575,00 atau 2,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp1.260.480.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah; (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp33.219.148.975,00 atau 2,76% dari total belanja daerah; (3) belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp224.019.600,00 atau 0,02% dari total belanja daerah;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dapat dianggarkan dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMD 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11 dan butir 3.4.1.2.2.b.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
	c) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp203.000.000,00 atau 0,02% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa tanah persil lainnya sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; (2) belanja sewa tanah untuk bangunan air sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah; d) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp2.047.924.000,00 atau 0,17% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp103.600.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; (2) belanja sewa alat rumah tangga (home use) lainnya sebesar Rp350.000.000,00 atau 0,03 % dari total belanja daerah; (3) belanja sewa peralatan jaringan sebesar Rp582.900.000,00 atau 0,05 % dari total belanja daerah; dan (4) belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp410.164.000,00 atau 0,03 % dari total belanja daerah. e) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp1.155.950.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp906.750.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(2) belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp79.200.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. f) penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp1.703.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Dapat dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Selain itu, uraian tersebut juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. (2) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp7.421.747.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan (3) belanja pemeliharaan sebesar Rp3.205.628.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.698.128.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah; b) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.022.500.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah; c) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp402.500.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; d) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp95.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan e) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dapat dianggarkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (4) belanja perjalanan dinas sebesar Rp29.983.730.000,00 atau 2,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp29.983.730.000,00 atau 2,49% dari total belanja daerah. Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024	Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana dimaksud butir 3.4.1.2.3.a. dan butir butir 3.4.1.2.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain belum belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja iuran jaminan kesehatan DPRD dan belanja tunjangan jabatan DPRD, belum memenuhi alokasi anggaran untuk dukungan anggaran terhadap prioritas nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prioritas Nasional 5 (PN5) yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, dimana penyesuaian untuk pemotongan Belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dari 12.500.000.000 telah dirasionalisasi sebesar 2.500.000.000,- untuk dialokasikan pada belanja yang lebih prioritas termasuk untuk memenuhi belanja yang bersifat emarked

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a. Sekretariat Daerah sebesar Rp12.679.930.000,00 atau 32,94% dari total belanja pada Sekretariat Daerah; dan b. Sekretariat DPRD sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 25,48% dari total belanja pada Sekretariat DPRD. (5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp319.700.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan dalam rincian objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp319.700.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp147.700.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; (2) belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp72.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan (3) belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. Dapat dianggarkan, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (6) belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp34.640.775.255,00 atau 2,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir 3.2.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 (7) belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp8.820.097.769,00 atau 0,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan	pemenuhan belanja mandatori infrastruktur pelayanan publik, memenuhi alokasi anggaran untuk belanja iuran jaminan kesehatan DPRD, memenuhi belanja tunjangan jabatan DPRD serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	8) belanja barang dan jasa BLUD sebesar 48.991.243.936,67 atau 4,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3. Belanja Bunga Belanja Bunga sebesar Rp4.331.637.634,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan uraian belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat. 4. Belanja Hibah Belanja Hibah sebesar Rp17.227.521.732,00 atau 1,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut: 1) belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp16.046.686.800,00 atau 1,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan 2) belanja hibah dana BOSP sebesar Rp376.940.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 5. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp439.500.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:	Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangli sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp803.894.932,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Gubernur untuk Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum memenuhi anggan untuk iuran jaminan kesehatan DPRD dan belanja tunjangan jabatan DPRD, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan kesehatan DPRD dan belanja tunjangan jabatan DPRD, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, mengalokasikan anggaran serta belanja wajib dalam penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting, dan makan bergizi sehat peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan berusaha untuk memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum memenuhi anggan untuk iuran jaminan kesehatan DPRD dan belanja tunjangan jabatan DPRD, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan dan/atau meningkatkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, mengalokasikan anggaran serta belanja wajib dalam penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting, dan makan bergizi sehat peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan akan ditindaklanjuti secara bertahap
	6. Belanja Modal Belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.223.016.143,00 atau 5,33% dari total belanja daerah Rp1.204.436.695.963,00 memperhatikan tren realisasi belanja modal Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp113.372.892.682,23 atau 54,50% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024; b. realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp211.649.206.855,31 atau 72,72% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan c. realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Desember Rp293.929.282.841,81 atau 94,15% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data tren realisasi belanja modal tersebut khususnya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja modal, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp64.223.016.143,00 atau 5,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja modal yang antara lain tercantum pada: a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp20.452.942.343,00 atau 1,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal alat angkutan sebesar Rp1.257.500.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat angkutan darat bermotor. 2) belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp138.067.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp95.000.600,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan b) belanja modal alat ukur sebesar Rp43.000.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah. 3) belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.178.186.500,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat kantor sebesar Rp212.920.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; b) belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp801.702.800,00 atau 0,07% dari total belanja daerah; dan c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp163.563.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah. 4) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp62.652.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat studio. 5) belanja modal alat laboratorium sebesar Rp3.486.324.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat peraga praktek sekolah. 6) belanja modal komputer sebesar Rp5.555.123.500,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal komputer unit sebesar Rp5.221.937.500,00 atau 0,43% dari total belanja daerah; dan b) belanja modal peralatan komputer sebesar Rp333.186.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	7) belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp3.283.390.245,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan 8) belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp5.442.348.498,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp31.850.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran. b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp28.750.057.000,00 atau 2,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal bangunan gedung sebesar Rp28.050.057.000,00 atau 2,33% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja; 2) belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp700.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah yang diuraikan pada rincian objek belanja modal gedung dan bangunan BLUD. c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp9.868.300.000,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp9.547.800.000,00 atau 0,79% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal jalan; 2) belanja modal bangunan air sebesar Rp53.500.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal bangunan air irigasi. d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp4.468.369.300,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp1.010.000,00 atau 0,00% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal bahan perpustakaan tercetak; 2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebesar Rp4.184.474.800,00 atau 0,35% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp282.884.500,00 atau 0,02% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal aset tetap lainnya BOSP. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud butir 3.4.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan Belanja Modal khususnya konstruksi agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat, dengan menghindari penyusunan jasa desain konstruksi pada tahun yang sama dengan pembangunan fisik yang bersifat kompleks sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan Belanja Modal khususnya kontruksiakan berusaha mempertimbangkan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat, dengan menghindari penyusunan jasa desain konstruksi pada tahun yang sama dengan pembangunan fisik yang bersifat kompleks sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022
	7. Belanja Tidak Terduga Belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.580.022.912,00 atau 0,30% dari total belanja daerah Rp1.204.436.695.963,00 dengan memperhatikan tren realisasi belanja modal Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan Desember Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja tidak terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan c. realisasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Desember Rp2.430.457.000,00 atau 57,88% dari total belanja tidak terduga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data tren realisasi belanja tidak terduga tersebut khususnya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja tidak terduga, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Belanja Transfer Belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp169.114.725.600,00 atau 14,04% dari total belanja daerah Rp1.204.436.695.963,00 dengan memperhatikan tren realisasi belanja modal Tahun Anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut: a. realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Bulan Oktober Rp144.788.484.705,00 atau 87,33% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024; b. realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Bulan desember Rp165.985.107.010,00 atau 99,69% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023; c. realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan desember Rp141.112.057.268,00 atau 99,95% dari total belanja transfer dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2022; Berdasarkan data tren realisasi belanja transfer tersebut khususnya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan perhitungan secara cermat atas belanja transfer, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan Tingkat inflasi yang mempengaruhi belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp169.114.725.600,00 atau 14,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut: a. belanja bagi hasil sebesar Rp12.845.170.400,00 atau 1,07% dari total belanja daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek: 1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp5.584.200.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah; dan	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.580.022.912,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp7.260.970.400,00 atau 0,60% dari total belanja daerah. b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp156.269.555.200,00 atau 12,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan sebagai Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta butir 3.4.4.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/214/Keuda tanggal 8 Januari 2024 hal Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.4.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan selalu berusaha mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir 3.4.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi,
VII.	Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. A. Pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan pembiayaan daerah sebesar Rp14.000.000.000,00 atau 1,16% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebagaimana Tabel 21 sebagai berikut: Tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah selama 3 tahun terakhir (APBD T.A 2022, 2023 dan APBD 2024) dibandingkan dengan RAPBD 2025		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berdasarkan Tabel 6 Pemerintah Kabupaten Bangli memasang Target Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.693.701.197,31 dibandingkan Target Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun 2024 dan mengalami penurunan dibandingkan Pembiayaan daerah dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp25.885.809.824,00 dan mengalami penurunan pada Pembiayaan daerah dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp164.524.630.492,00. 1. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp27.500.000.000,00 atau 2,28% dari total belanja daerah yang diuraikan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp27.500.000.000,00 atau 2,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek: a. Pelampauan Penerimaan PAD sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 0,66% dari total belanja daerah; dan b. penghematan belanja sebesar Rp19.500.000.000,00 atau 1,62% dari total belanja daerah. Penerimaan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp27.500.000.000,00 dan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp13.382.706.879,00 dan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pembiayaan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp154.024.630.492,00. 2. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.500.000.000,00 atau 1,12% yang terdiri dari: a. penyertaan modal daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 1,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam rincian objek pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)). Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.537.235.340,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp12.503.102.945,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp10.500.000.000,00.		
VIII	Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	A. Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Bangli agar menetapkan target yang selaras dengan KEM-PPKF untuk Provinsi Bali dan didukung dengan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berfokus pada program yang direncanakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan; B. ☐ Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; C. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; D. ☐ Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: 1) penanggulangan kemiskinan; 2) peningkatan investasi; 3) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; 4) peningkatan penggunaan PDN; dan 5) pengendalian inflasi. sebagaimana maksud butir 5.2.11.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024		Telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) Telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	E. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b) pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; c) pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; d) pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan e) pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan 3) kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat; a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada 5) Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sebagaimana maksud butir 5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengambil langkah-langkah sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	F. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka	Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	G. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi: 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; 2) pengendalian laju alih fungsi lahan; 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan 5) pengawasan harga dan operasi pasar. Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, H. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Prabencana” yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain: a perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; b pengurangan risiko dan pencegahan bencana; c pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; d kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan e penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. I. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.	Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Sebagaimana maksud butir 5.3.4.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan pendanaan kegiatan Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banglit dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	J. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir 3.4.3.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain: 1 pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 2 Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau d pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 3 Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. K. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus mengganggu seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah;		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	L. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; M. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; N. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. O. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020;	Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	P. Pemerintah Kabupaten Bangli juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan provinsi antara lain: 1 Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; 2 Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019; 3 Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; 4 Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018; 5 Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019; 6 Penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019; 7 Pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; 8 Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019; 9 Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019; 10 sistem pertanian organik dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019; 11 penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020; 12 fasilitasi perlindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020; 13 sistem pengamanan lingkungan Pendapatan Transfer berbasis desa adat dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020; dan 14 sistem pengamanan lingkungan Pendapatan Transfer berbasis desa adat dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020. Q. Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus positif rabies di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies; R. Pemerintah Kabupaten Bangli melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	S. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli; dan T. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

KETUT SUASTIKA

DAFTAR ISI

I. LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
II. LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
III. LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
IV. LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
V. LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
VI. LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
VII. LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
VIII. LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
IX. LAMPIRAN IX	SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
X. LAMPIRAN X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
XI. LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN I

RINGKASAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN



KABUPATEN BANGLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.453.242.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	93.596.300.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	189.646.304.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.682.100.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.528.538.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	891.195.807.411,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.730.907.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.464.900.411,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.679.804.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.679.804.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.204.328.853.411,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	968.210.393.306,00
5.1.01	Belanja Pegawai	611.170.824.963,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.260.908.976,17
5.1.03	Belanja Bunga	4.331.637.634,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.007.521.732,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	439.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	80.276.399.043,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.196.682.243,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.553.127.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.740.413.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.942.829.300,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	843.347.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.227.335.462,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.227.335.462,00
5.4	BELANJA TRANSFER	167.614.725.600,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.845.170.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.769.555.200,00
	Jumlah Belanja	1.218.328.853.411,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-14.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.500.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	27.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	14.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II

RINGKASAN

APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



KABUPATEN BANGLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.056.700.000,0 0	598.457.823.168,00	70.967.964.043,00	0,00	0,00	669.425.787.211,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	99.300.000,00	288.796.444.655,00	25.890.128.745,00	0,00	0,00	314.686.573.400,00
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	99.300.000,00	288.796.444.655,00	25.890.128.745,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.115.400.000,0 0	249.613.960.382,00	20.192.339.098,00	0,00	0,00	269.806.299.480,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	78.800.000,00	97.662.386.880,0 0	750.841.600,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Bangli	1.375.800.000,00	1.804.328.500,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Bangli Utara	1.217.700.000,00	1.650.833.000,00	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Susut I	1.612.700.000,00	2.098.028.500,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Susut II	1.403.700.000,00	1.833.628.500,00	123.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Tembuku I	1.474.400.000,00	1.829.728.000,00	168.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tembuku II	1.554.500.000,00	2.028.828.500,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kintamani I	1.598.700.000,00	2.027.378.500,00	161.771.500,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Kintamani II	1.047.900.000,00	1.496.090.502,00	125.637.998,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kintamani III	1.087.400.000,00	1.444.971.500,00	175.957.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kintamani IV	898.600.000,00	1.371.720.500,00	42.208.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kintamani V	1.764.500.000,00	2.254.896.000,00	92.054.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kintamani VI	1.310.700.000,00	1.708.081.500,00	107.920.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	100.690.000.000,0 0	130.403.060.000,00	18.051.449.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.842.000.000,00	28.009.810.631,00	18.760.499.300,00	0,00	0,00	46.770.309.931,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.842.000.000,00	28.009.810.631,00	18.760.499.300,00	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	6.151.620.000,00	0,00	0,00	0,00	6.151.620.000,00
1	04	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	6.151.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	20.259.524.950,00	6.124.996.900,00	0,00	0,00	26.384.521.850,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	12.284.461.650,00	3.829.900,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.09.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	7.975.063.300,00	6.121.167.000,00	0,00	0,00	0,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	5.626.462.550,00	0,00	0,00	0,00	5.626.462.550,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	5.626.462.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.033.204.000,00	94.563.106.263,00	5.805.755.600,00	0,00	0,00	100.368.861.863,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	94.931.650,00	0,00	0,00	0,00	94.931.650,00
2	07	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	94.931.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	411.132.500,00	0,00	0,00	0,00	411.132.500,00
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	411.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	706.407.500,00	0,00	0,00	0,00	706.407.500,00
2	09	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	706.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	382.704.000,00	34.542.023.913,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	38.542.023.913,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	382.704.000,00	34.542.023.913,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	6.193.776.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	6.203.776.400,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	6.193.776.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	8.650.658.600,00	0,00	0,00	0,00	8.650.658.600,00
2	13	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	8.650.658.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	3.371.103.400,00	944.500.600,00	0,00	0,00	4.315.604.000,00
2	14	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	3.371.103.400,00	944.500.600,00	0,00	0,00	0,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	650.500.000,00	8.205.563.650,00	146.500.000,00	0,00	0,00	8.352.063.650,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	650.500.000,00	8.205.563.650,00	146.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.132.806.850,00	0,00	0,00	0,00	7.132.806.850,00
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	7.132.806.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	6.234.931.800,00	209.382.000,00	0,00	0,00	6.444.313.800,00
2	17	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	6.234.931.800,00	209.382.000,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	6.915.794.150,00	346.800.000,00	0,00	0,00	7.262.594.150,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	6.915.794.150,00	346.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	2.817.806.800,00	30.100.000,00	0,00	0,00	2.847.906.800,00
2	19	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	2.817.806.800,00	30.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2	20	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	62.720.000,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00
2	21	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	62.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	9.066.637.800,00	54.500.000,00	0,00	0,00	9.121.137.800,00
2	22	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	9.066.637.800,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	125.997.250,00	1.010.000,00	0,00	0,00	127.007.250,00
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	125.997.250,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	25.714.000,00	62.963.000,00	0,00	0,00	88.677.000,00
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	25.714.000,00	62.963.000,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	68.941.262.000,00	73.907.348.750,00	1.034.715.200,00	0,00	0,00	74.942.063.950,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	898.625.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	1.059.125.000,00
3	25	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	898.625.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	58.800.000.000,00	30.628.533.300,00	133.810.000,00	0,00	0,00	30.762.343.300,00
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	58.800.000.000,00	30.628.533.300,00	133.810.000,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	756.400.000,00	29.009.686.700,00	424.440.000,00	0,00	0,00	29.434.126.700,00
3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	756.400.000,00	29.009.686.700,00	424.440.000,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	3.458.417.600,00	315.965.200,00	0,00	0,00	3.774.382.800,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	3.458.417.600,00	315.965.200,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	9.384.862.000,00	9.888.157.400,00	0,00	0,00	0,00	9.888.157.400,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.384.862.000,00	9.888.157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00
3	32	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	122.568.160.900,00	1.395.103.000,00	0,00	0,00	123.963.263.900,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	73.517.099.900,00	1.395.103.000,00	0,00	0,00	74.912.202.900,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	35.489.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	26.896.918.450,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0,00	730.369.650,00	165.757.500,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	10.399.867.800,00	1.194.345.500,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	49.051.061.000,00	0,00	0,00	0,00	49.051.061.000,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	49.051.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.013.297.687.411,00	37.819.415.543,00	506.357.600,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	208.167.834.205,00
5	01		PERENCANAAN	0,00	5.975.943.750,00	6.600.000,00	0,00	0,00	5.982.543.750,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	5.975.943.750,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	1.013.297.687.411,00	23.749.894.493,00	277.790.100,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	193.869.745.655,00
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.013.297.687.411,00	23.749.894.493,00	277.790.100,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	6.012.506.500,00	150.248.000,00	0,00	0,00	6.162.754.500,00
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	6.012.506.500,00	150.248.000,00	0,00	0,00	0,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	565.955.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	595.133.000,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	565.955.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	1.515.115.300,00	42.542.000,00	0,00	0,00	1.557.657.300,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.515.115.300,00	42.542.000,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	12.933.683.400,00	261.734.800,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	12.933.683.400,00	261.734.800,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	12.933.683.400,00	261.734.800,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	21.788.755.850,00	304.768.800,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00
7	01		KECAMATAN	0,00	21.788.755.850,00	304.768.800,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bangli	0,00	10.021.673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kintamani	0,00	4.118.514.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Susut	0,00	3.466.410.500,00	39.121.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tembuku	0,00	4.182.157.900,00	265.647.800,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	6.172.099.432,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	6.172.099.432,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.172.099.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.204.328.853.411,00	968.210.393.306,00	80.276.399.043,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	0,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KABUPATEN BANGLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.204.328.853.411,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.453.242.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	93.596.300.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	189.646.304.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.682.100.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.528.538.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	891.195.807.411,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.730.907.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.464.900.411,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.679.804.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.679.804.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Porsentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	419.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.904.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	351.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.917.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.093.280.370,00	
5.1.05	Belanja Hibah	149.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.159.237.730,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	97.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.625.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.854.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.347.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.271.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	88.696.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.306.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.182.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.097.714.885,00	
5.1.05	Belanja Hibah	227.840.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.124.152.515,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	185.478.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.138.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	578.700.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.988.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.050.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	31.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.153.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.380.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum		

Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.591.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.877.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.177.000,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman		
Kegiatan	: 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Telaksana Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	233.152.749.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.480.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.730.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.142.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.072.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.334.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.200.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.528.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	444.303.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.301.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.923.145.317,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.213.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.730.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	779.613.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.751.341.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.275.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.390.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.774.083,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.100.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.271.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	704.010.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.626.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Terbitnya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.771.500,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		

Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.392.500,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.925.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	48.555.179.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.220.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.425.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.693.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.587.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.734.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.937.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.600.200,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.449.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.958.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Bangli		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.678.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	61.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	826.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.183.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	70.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	664.222.375,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.877.625,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.600.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Susut I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		

Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.678.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	66.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.964.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.150.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.836.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	865.345.440,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.354.560,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Susut II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.378.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	66.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.930.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	937.247.999,50	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.252.000,50	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.200.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tembuku I		

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.778.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	62.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	833.268.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.431.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		

Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tembuku II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.278.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.785.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.515.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	832.640.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	651.860.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kintamani I		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP		

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	899.359.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.569.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.771.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kintamani II		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.878.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	68.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		

Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	630.873.149,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.388.853,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.637.998,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kintamani III		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.528.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.600.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	717.670.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.772.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.957.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kintamani IV		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.078.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.849.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.550.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	61.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	558.735.447,33	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.656.552,67	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.208.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Kintamani V		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pelayanan untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	68.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	893.580.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	778.866.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.054.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kintamani VI		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.805.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.619.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.564.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	60.842.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.629.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.389.500,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	754.368.960,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.411.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.920.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.03	Belanja Bunga	4.331.637.634,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.578.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.273.392.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	47.413.060.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pelayanan BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	35.109.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.548.762.366,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.050.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.420.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.474.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.755.474.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.207.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.864.300,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.090.816.981,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.700.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Prosentase rumah tinggal bersanitasi layak		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten /Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: Prosentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Rasio Bangunan Ber - IMB persatuan Bangunan		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	73.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.600.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota		
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.840.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.547.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.714.199.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.200.200,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Terampil Konstruksi		
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.265.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.249.371.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.187.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.250.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.815.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.041.600,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.653.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.340.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.103.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Rasio Rumah Layak Huni		
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.801.620.000,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: Prosentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencegahan, Perumahan, dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Prosentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: Tertatanya Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.454.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.286.846.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.905.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.999.950,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.633.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.857.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.199.750,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.764.550,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.459.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.473.990.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Kepagawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.018.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.684.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.240.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga/Desa yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.670.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.763.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.518.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.857.113.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.118.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.515.666.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.389.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.364.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.404.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.066.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.980.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.209.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	

Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.661.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.039.100,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Indikator Hasil	: jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal		
Kegiatan	: 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
Indikator Keluaran	: Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.		
Sub Kegiatan	: 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		

Indikator Hasil	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.652.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar Lanjut usia terlantar,Gelandanngan Pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.275.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Presentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Presentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.603.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.585.614.000,00	
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.164.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.007.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.460.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.982.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.767.650,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah peningkatan kompetensi calon tenaga kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah terbinanya lembaga latihan kerja swasta		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.383.950,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan		
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.327.700,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pekerja migran yang dilatih		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang didata dan diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan		

Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta		

Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Prosentase Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.168.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: MENINGKATNYA PORSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.375.000,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.675.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.500,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.524.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan		
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandiraian pangan yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat diversifikasi masyarakat		
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Persentase harga Pangan pokok terpantau		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.812.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.747.500,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.697.500,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase kasus kerawanan pangan menurun		
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Persentase laporan ketahanan pangan tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.245.000,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase kerawanan pangan kabupaten terpantau		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.520.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Skor Pola Pangan Harapan		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.385.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen KLHS yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.890.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.771.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.873.300,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.528.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.416.750,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.920.000,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.981.250,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.412.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.943.113,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.496.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.650,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.850.391.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.988.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.037.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.066.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.126.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.567.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.125.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang didaftar		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.624.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.648.400,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.722.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Kualitas Laporan Informasi Administrasi Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.640.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.994.700,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.909.582.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.869.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.704.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.202.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.660.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.062.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		
Indikator Hasil	: Prosentase desa yang melakukan penataan desa		
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa		
Indikator Keluaran	: Tertatanya desa yang baik		
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.266.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.015.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa		
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitas kerjasama antar desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang baik		

Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.317.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0006 Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.405.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0016 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.944.500,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.944.350,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.283.000.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.769.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.382.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.077.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.650.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.911.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.777.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)		
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.102.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.463.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.430.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	803.070.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.548.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria		
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.200.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keleluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
Indikator Keluaran	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA J)		
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.651.674.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.470.200,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.124.050,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.854.850,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.161.600,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.091.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.15.03.2.04 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.051.450,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.637.236.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.789.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.996.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.500.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.260.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten 3 Jenis		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.196.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	877.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan SPBE yang dibangun		
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.141.047.450,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.318.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.611.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.940.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.730.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.975.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja		
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional		
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamnya		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi aktif		
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.505.000,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Indikator Hasil	: Prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas		
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang dinilai		
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola koperasi yang dilatih		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi		
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah koperasi yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.345.000,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Prosentase wirausaha baru		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah wirausaha baru		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.288.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.618.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing		
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.144.000,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.053.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.318.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.381.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.592.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.558.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.382.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.276.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.530.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.316.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Nilai Investasi		
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.850,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.940.000,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Investor (PMA/PMDN)		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.145.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.850,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.269.650,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.600.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.714.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.943.750,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.430.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.930.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik		
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.808.265.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum pada DPMPTSP		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.083.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.948.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.601.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.620.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.907.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	

Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.292.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Memasyarakatkan Olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.		

Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	981.514.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		

Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Tersedianya Data Tentang Kabupaten Bangli		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
Program	: 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Prosentase Keamanan SPBE		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.520.000,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan objek/unsur kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.390.200,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kesenian yang terdata		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase bendesa adat, kelihan banjar adat, dan banjar adat yang ditingkatkan kapasitasnya		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.980.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.605.742.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya		
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekaa yang terlibat		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.822.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	715.743.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/dimanfaatkan/dibina		
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah data dan Informasi Sejarah (WBTB)		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali		
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.780.800,00	

Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Peningkatan Kualitas Pembinaan Perpustakaan		
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang dikelola		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.447.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.277.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.090.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	495.850,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.432.400,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah naskah kuno yang dilestarikan		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.253.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.010.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan		
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.479.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		

Indikator Keluaran	: Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Dilberdayakan		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.463.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan		
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Kegiatan	: 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	
Kegiatan	: 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		
Indikator Keluaran	: jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang		
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.285.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase konsumsi ikan masyarakat meningkat		
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Prasaran usaha perikanan tangkap tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat		
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Produktivitas perikanan budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.342.550,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.200.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.794.650,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.623.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.500.000,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Produktivitas perikanan budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: Terasilitasnya promosi produk unggulan daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.265.300,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengetahuan dan kesehatan masyarakat meningkat		

Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.399.500,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase pengembangan destinasi pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Daya Tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revitalisasi)		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.091.834.800,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.380.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri Pariwisata yang memiliki TDUP		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0011 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: IKM Kepariwisataaan		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.094.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.810.000,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: Prosentase Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Prosentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		

Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan SDM Pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
Indikator Keluaran	: Prosentase Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.882.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.097.412.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.398.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.188.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.443.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.721.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.970.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Prosentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.349.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.389.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Produktivitas tanaman perkebunan unggulan perhektar		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	116.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	379.450.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	10.812.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.880.600,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.157.600,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Persentase bibit ternak yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase pembangunan prasarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.569.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.248.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Kasus penyakit ternak menurun		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Coverage Vaksinasi Rabies tercapai		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.038.039.900,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner terkelola		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT		

Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Kelompok yang di bina		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.282.050,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase penyenggaraan penyuluh pertanian		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Persentase penyenggaraan penyuluhan pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.677.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.921.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		

Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.404.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Gaji dan tunjangan ASN tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.776.771.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pelayanan administrasi perkantoran memadai		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.959.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.422.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.097.800,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.581.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.498.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.767.050,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.000.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)		

Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan		
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.392.023.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.965.200,00	

Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.956.000,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pedagang yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.438.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.794.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.620.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase dokumen Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.033.283.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.080.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan komponen instalasi listrik penerangan kantor		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.354.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.113.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.819.550,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.900.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.407.850,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat		
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Prosentase jumlah transmigran yang ditempatkan		
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Prosentase Calon Transmigrasi Yang Difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.928.750,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	24.127.464.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.679.930.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	832.070.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	825.480.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	587.385.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.506.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	

Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.331.918.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.641.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.167.250,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.337.550,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.996.450,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		

Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.970.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	35.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitas Kerja Sama Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.205.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan fasilitas administrasi perekonomian dan pembangunan		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.655.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.390.200,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.756.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.512.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.864.350,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.230.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.800.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.967.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.347.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.820.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.855.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum		
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.080.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	807.283.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.787.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.565.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.356.071.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.882.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.529.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	874.392.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.543.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.645.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.859.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.305.350,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.937.500,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.004.953.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.233.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.244.050,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.300.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.433.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.214.300.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.090.440.000,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Meningkatnya indek Repormasi Birokrasi		
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.943.240.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Paket logistik Kantor yang disediakan undefined		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.801.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.750.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Mesin dan Sarana Prasarana Kantor yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.791.600.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Angkutan dan peralatan Mesin yan terpelihara		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.054.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.530.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang menerima Pakaian dan Atributnya		

Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	22.477.014.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.805.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.605.040.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: Persentase koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.459.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.300.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.404.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.330.000,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.085.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.600.867.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah		

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.162.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.254.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.096.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.107.350,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.500.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.977.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.852.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.968.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.674.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.674.650,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.780.000,00	

Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.892.500,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	154.769.555.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.227.335.462,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.845.170.400,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.491.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.730.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.301.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase PAD terhadap Pendapatan		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.671.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	414.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.654.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	814.110.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.755.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.409.356.143,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.139.200,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.828.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.119.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.369.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.421.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.884.750,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.562.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.227.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.283.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.837.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Persentase Layanan Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.392.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.187.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.414.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.574.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.067.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.248.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.500,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.007.153.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.640.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.282.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.900.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.597.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Organisasi yang tertata		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Diklat		
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.955.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.177.500,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: undefined Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.337.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan		

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.358.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.629.400,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	790.132.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.107.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.224.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.566.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.542.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.560.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.555.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH (Tindak Lanjut)		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.520.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.200.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.315.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.684.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.510.000,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pegawasan dengan Tujuan Tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Prosentase Monev,Koordinasi,Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Pengawasan (MCP)		
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.950.000,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.906.042.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pendidikan dan Pelatihan		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.384.400.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.068.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.111.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.035.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.642.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.892.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.966.800,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.898.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.410.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Prosentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.527.500,00	

Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.835.200,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.482.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.705.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.827.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.533.322.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah/Jenis instalasi listrik Bangunan ktr yang tersedia Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.832.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.318.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.302.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.516.146.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.584.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.142.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.365.200,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen dan laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.114.000,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.224.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah laporan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.816.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.677.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.280.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.273.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: prosentase pelayan publik yang dilakukan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.230.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.610.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra Suku,Umat berAgama ,Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal Regional dan Nasional		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.768.050,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		

Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.100.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.939.162.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.659.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.121.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor(Benda Pos) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.480.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional Lapangan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.124.250,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Prosentase penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.784.385.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.459.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.197.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.114.700,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.516.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.603.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.415.450,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.647.500,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	803.894.932,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.050.000,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.995.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.938.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.605.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Dan Bahan Keterangan Terkait Stabilitas Daerah		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.068.550,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.825.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.702.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.085.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.863.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.498.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.250.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.657.600,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.500.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.500.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.500.000.000,00	

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI

BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL
DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Porsentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan	88 Persen							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-							
1	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	419.000.000,00	0,00	0,00	419.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	65 Unit	0,00	8.904.500.000,00	0,00	0,00	8.904.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
5	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	351.000.000,00	0,00	0,00	351.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
6	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
7	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
8	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	127.917.500,00	0,00	0,00	0,00	127.917.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
9	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	422 Orang	7.525.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.525.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
10	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	197 Satuan Pendidikan	19.400.100,00	0,00	0,00	0,00	19.400.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
11	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	163 Satuan Pendidikan	21.242.380.370,00	2.256.644.230,00	0,00	0,00	23.499.024.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
13	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	0,00	3.625.000.000,00	0,00	0,00	3.625.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
14	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
15	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
16	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	421.800.000,00	0,00	0,00	0,00	421.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
17	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0,00	1.854.000.000,00	0,00	0,00	1.854.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
18	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	2.347.500.000,00	0,00	0,00	2.347.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
19	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
20	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang	0,00	1.271.000.000,00	0,00	0,00	1.271.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
21	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	88.696.000,00	0,00	0,00	0,00	88.696.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	88 Persen							
22	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium									
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
23	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	1.306.000.000,00	0,00	0,00	1.306.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
25	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
26	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
27	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	253.000.000,00	0,00	0,00	253.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
28	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00	228.000.000,00	0,00	0,00	228.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
29	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	202 Peserta Didik	161.304.000,00	0,00	0,00	0,00	161.304.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
30	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	253 Orang	4.182.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Satuan Pendidikan	13.325.554.885,00	1.309.630.515,00	0,00	0,00	14.635.185.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
32	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
33	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
34	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
35	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
36	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	202 Satuan Pendidikan	18.138.400,00	0,00	0,00	0,00	18.138.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
37	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
38	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
39	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
40	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	399.800.000,00	0,00	0,00	0,00	399.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
41	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	88 Persen							
42	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
43	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD									
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	0,00	299.974.000,00	0,00	0,00	299.974.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
44	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3587 Peserta Didik	2.567.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Dana Alokasi Umum (DAU)
45	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	155 Orang	2.905.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
46	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	216.800.000,00	0,00	0,00	0,00	216.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
47	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	87.530.000,00	0,00	0,00	0,00	87.530.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
48	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	88 Persen							
49	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 orang Peserta Didik	83.550.000,00	0,00	0,00	0,00	83.550.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Umum (DAU)
50	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	22.153.700,00	22.380.000,00	0,00	0,00	44.533.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum	97 Persen							
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar	97 Persen							
51	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	30.591.000,00	0,00	0,00	0,00	30.591.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Persen							
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata	100 Persen							
52	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	30.877.500,00	0,00	0,00	0,00	30.877.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
53	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	90.177.000,00	0,00	0,00	0,00	90.177.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman	58 Persen							
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58 Persen							
54	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Peserta Didik	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
55	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
56	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1723 Orang/bulan	233.152.749.000,00	0,00	0,00	0,00	233.152.749.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen							
57	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	48.480.000,00	0,00	0,00	0,00	48.480.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
58	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.730.800,00	0,00	0,00	0,00	6.730.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
59	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.142.800,00	0,00	0,00	0,00	7.142.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
60	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	257.072.800,00	0,00	0,00	0,00	257.072.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
61	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.334.750,00	0,00	0,00	0,00	33.334.750,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.510.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
63	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
64	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	99.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
65	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
66	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	113.786.000,00	0,00	0,00	0,00	113.786.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
67	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	804.200.000,00	0,00	0,00	0,00	804.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	252.528.250,00	0,00	0,00	0,00	252.528.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
69	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	46.840.000,00	0,00	0,00	0,00	46.840.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
70	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan	100 Persen							
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional	100 Persen							
71	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	186.292.800,00	12.600.000,00	0,00	0,00	198.892.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
72	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional	100 100							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.	100 100							
73	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memasyarakatkan Olahraga, menjangkit bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.	100 100							
74	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	20 Orang	981.514.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	999.014.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.	100 100							
75	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	30 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hibah
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga	100 100							
76	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan	100 100							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan	100 100							
77	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hibah
		Dinas Kesehatan									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen							
78	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Kawan	[object Object]
79	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas									
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
80	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	33.100.000,00	444.303.900,00	0,00	0,00	477.403.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
81	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	0,00	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
82	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
83	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
84	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
85	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi									
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
86	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	131 Unit	63.301.200,00	0,00	0,00	0,00	63.301.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
87	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket	4.923.145.317,00	0,00	0,00	0,00	4.923.145.317,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
88	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
89	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
90	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3656 Orang	365.775.000,00	0,00	0,00	0,00	365.775.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
91	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3490 Orang	84.325.000,00	0,00	0,00	0,00	84.325.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
92	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3324 Orang	249.997.000,00	0,00	0,00	0,00	249.997.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
93	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16046 Orang	25.625.000,00	0,00	0,00	0,00	25.625.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
94	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33398 Orang	99.025.000,00	0,00	0,00	0,00	99.025.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
95	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63553 Orang	92.250.000,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
96	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40822 Orang	177.213.000,00	0,00	0,00	0,00	177.213.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
97	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9684 Orang	42.475.000,00	0,00	0,00	0,00	42.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
98	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1816 Orang	27.475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
99	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	599 Orang	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
100	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	961 Orang	201.525.000,00	0,00	0,00	0,00	201.525.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
101	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2958 Orang	50.475.000,00	0,00	0,00	0,00	50.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
102	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
103	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
104	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
105	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00	83.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
106	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	90.920.000,00	0,00	0,00	0,00	90.920.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
107	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	309.730.000,00	0,00	0,00	0,00	309.730.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
108	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
109	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	336.560.000,00	0,00	0,00	0,00	336.560.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
110	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
111	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
112	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
113	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	779.613.500,00	0,00	0,00	0,00	779.613.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
114	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	33.751.341.980,00	0,00	0,00	0,00	33.751.341.980,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
115	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	3.808.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
116	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
117	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
118	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
119	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	149.275.000,00	0,00	0,00	0,00	149.275.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
120	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
121	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
122	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
123	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
124	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
125	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
126	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
127	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	27.475.000,00	0,00	0,00	0,00	27.475.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
128	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
129	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
130	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	119.390.000,00	0,00	0,00	0,00	119.390.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	95 Persen							
131	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	79.774.083,00	0,00	0,00	0,00	79.774.083,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
132	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	1.022.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	89 Persen							
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan	89 Persen							
133	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Daerah
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	89 Persen							
134	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
135	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	98.271.000,00	0,00	0,00	0,00	98.271.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	89 Persen							
137	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	704.010.000,00	0,00	0,00	0,00	704.010.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	95 Persen							
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	95 %							
138	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	91.626.000,00	0,00	0,00	0,00	91.626.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitnya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95 Persen							
139	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	183.771.500,00	0,00	0,00	0,00	183.771.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	95 Persen							
140	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95 Persen							
141	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	46 Unit	183.392.500,00	0,00	0,00	0,00	183.392.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
142	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
143	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
144	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	213.925.000,00	0,00	0,00	0,00	213.925.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
145	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	[object Object]
146	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	42.560.000,00	0,00	0,00	0,00	42.560.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
147	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6524 Orang/bulan	48.555.179.000,00	0,00	0,00	0,00	48.555.179.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
148	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	143.220.000,00	0,00	0,00	0,00	143.220.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen							
149	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	112.060.000,00	0,00	0,00	0,00	112.060.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen							
150	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
151	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	77.060.000,00	0,00	0,00	0,00	77.060.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
152	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.500,00	0,00	0,00	0,00	7.425.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
153	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
154	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.693.200,00	0,00	0,00	0,00	7.693.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
155	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	201.587.100,00	0,00	0,00	0,00	201.587.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
156	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.734.500,00	0,00	0,00	0,00	20.734.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
157	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit							
158	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	45.937.500,00	0,00	0,00	45.937.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
159	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	62.600.200,00	0,00	0,00	62.600.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
160	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
161	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	307.449.500,00	0,00	0,00	0,00	307.449.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
163	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	284.958.000,00	0,00	0,00	0,00	284.958.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
164	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
165	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
166	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Puskesmas Bangli									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen							
167	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	16.020.000,00	0,00	0,00	0,00	16.020.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
168	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1836 Orang	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
169	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
170	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	139.678.500,00	0,00	0,00	0,00	139.678.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
171	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
172	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
173	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
174	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
175	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	107.860.000,00	0,00	0,00	0,00	107.860.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
176	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
177	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
178	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
179	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
180	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	50 Dokumen	68.040.000,00	0,00	0,00	0,00	68.040.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
181	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
182	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
183	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen							
184	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.295.800.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	1.375.800.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Bangli Utara									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen								
185	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1122 Orang	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
186	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1300 Orang	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
187	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
188	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Bunutin Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
189	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
190	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170 Dokumen	224.183.000,00	0,00	0,00	0,00	224.183.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
191	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
193	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
194	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
195	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130 Dokumen	54.100.000,00	0,00	0,00	0,00	54.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	260 Dokumen	132.980.000,00	0,00	0,00	0,00	132.980.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubih Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
197	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Cempaga Kab. Bangli, Bangli, Kubu Kab. Bangli, Bangli, Kayubihi Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Bangli, Bangli, Landih	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
198	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
199	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
200	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
201	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 bulan Dokumen	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen							
203	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.054.100.000,00	163.600.000,00	0,00	0,00	1.217.700.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Susut I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	95 Persen							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	95 Persen							
204	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangnan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
206	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1775 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
207	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1783 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
208	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2814 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
209	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3820 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
210	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6455 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
211	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	98 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	231 Orang	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
214	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
215	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	197.678.500,00	0,00	0,00	0,00	197.678.500,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
216	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
217	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
218	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
220	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Pengiangan Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Susut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	73 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
222	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	44.050.000,00	0,00	0,00	0,00	44.050.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
223	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	231 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
224	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	126.764.000,00	0,00	0,00	0,00	126.764.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
225	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	[object Object]
227	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	[object Object]
228	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
230	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Pengiangan Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Susut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	52.150.000,00	0,00	0,00	0,00	52.150.000,00	Kab. Bangli, Susut, Pengiangan Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Susut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
232	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	95 Persen							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 Persen							
233	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen							
234	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.533.700.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	1.612.700.000,00	Kab. Bangli, Susut, Susut Kab. Bangli, Susut, Penglumbaran Kab. Bangli, Susut, Tiga Kab. Bangli, Susut, Selat Kab. Bangli, Susut, Pengiangan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
		Puskesmas Susut II										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-								
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-								
235	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	31.750.000,00	0,00	0,00	0,00	31.750.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
236	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
237	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Bangli, Susut, Apuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Sulahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
239	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.378.500,00	0,00	0,00	0,00	207.378.500,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
240	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	Kab. Bangli, Susut, Apuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Sulahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
241	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
242	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	18.250.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
243	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00	37.950.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	113.870.000,00	0,00	0,00	0,00	113.870.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
246	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.100.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	50.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
250	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00	Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Apuan Kab. Bangli, Susut, Sulahan Kab. Bangli, Susut, Abuan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
251	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.280.500.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00	1.403.700.000,00	Kab. Bangli, Susut, Apuan Kab. Bangli, Susut, Demulih Kab. Bangli, Susut, Abuan Kab. Bangli, Susut, Sulahan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Tembuku I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
252	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	26.580.000,00	0,00	0,00	0,00	26.580.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[object Object]
254	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
255	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
256	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
257	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
258	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
259	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17 Orang	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
260	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
261	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130 Dokumen	172.778.000,00	0,00	0,00	0,00	172.778.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
262	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	114 Dokumen	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
263	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	54 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
264	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	532 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
265	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	123 Dokumen	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	160 Orang	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku, Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	234 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
268	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	453 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	476 Dokumen	114.100.000,00	0,00	0,00	0,00	114.100.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
270	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	[object Object]
271	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	[object Object]
272	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	[object Object]
273	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku	[object Object]
274	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	118 Dokumen	21.370.000,00	0,00	0,00	0,00	21.370.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	28 Dokumen	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	48 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	618 Dokumen	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Jehem Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
279	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	77 Dokumen	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Bangbang Kab. Bangli, Tembuku, Undisan Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku, Kab. Bangli, Tembuku, Jehem	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
280	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.305.700.000,00	168.700.000,00	0,00	0,00	1.474.400.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Tembuku	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Tembuku II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
281	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	18.160.000,00	0,00	0,00	0,00	18.160.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
283	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
284	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	[object Object]
285	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1857 Orang	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
287	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
288	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
289	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
290	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	282 Orang	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39 Orang	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
293	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
294	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2210 Dokumen	195.278.500,00	0,00	0,00	0,00	195.278.500,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
295	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	90 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
298	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	180 Dokumen	22.785.000,00	0,00	0,00	0,00	22.785.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
299	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	54 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
300	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	516 Dokumen	51.515.000,00	0,00	0,00	0,00	51.515.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
301	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	96 Dokumen	123.430.000,00	0,00	0,00	0,00	123.430.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
302	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	[object Object]
303	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	[object Object]
304	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	[object Object]
305	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	4 Orang	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
306	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	6 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
307	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	5 Dokumen	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
308	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	428 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
310	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
311	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9 Dokumen	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Peninjoan Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
312	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.484.500.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1.554.500.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Yangapi	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani I									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
313	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga									
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	160 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 PERSEN							
314	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00	39.050.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
315	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]	
316	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]	
317	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]	
318	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]
320	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
321	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8 Orang	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
322	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]
323	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	208.200.000,00	0,00	0,00	0,00	208.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
324	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
325	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
326	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]	
327	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]	
328	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
329	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	52 Orang	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
330	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	[object Object]
331	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	40.700.000,00	0,00	0,00	0,00	40.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
332	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
334	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
335	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	6 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
336	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	6 Dokumen	59.800.000,00	0,00	0,00	0,00	59.800.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 persen							
338	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Bangli, Kintamani, Batur Utara Kab. Bangli, Kintamani, Batur Tengah Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Cerik Kab. Bangli, Kintamani, Manikliyu Kab. Bangli, Kintamani, Lembean Kab. Bangli, Kintamani, Langgahan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	95 persen							
339	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.436.928.500,00	161.771.500,00	0,00	0,00	1.598.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Batur Selatan Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani II									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
340	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	348 Orang	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
341	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3116 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	[object Object]
342	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	328 Orang	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
343	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8895 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
345	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
346	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
347	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	187.878.500,00	0,00	0,00	0,00	187.878.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
348	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	25 Dokumen	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
350	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
351	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
352	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
353	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76 Dokumen	72.700.000,00	0,00	0,00	0,00	72.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
354	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	37 Dokumen	136.100.000,00	0,00	0,00	0,00	136.100.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
355	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
356	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
357	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
359	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
360	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
361	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Satra Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Siakin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
362	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	922.262.002,00	125.637.998,00	0,00	0,00	1.047.900.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Siakin Kab. Bangli, Kintamani, Subaya Kab. Bangli, Kintamani, Kutuh Kab. Bangli, Kintamani, Sukawana Kab. Bangli, Kintamani, Bantang Kab. Bangli, Kintamani, Dausa Kab. Bangli, Kintamani, Satra	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani III									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
363	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	240 Orang	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
364	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1506 Orang	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
365	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
366	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
367	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	185.528.500,00	0,00	0,00	0,00	185.528.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaraan Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
368	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
370	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung Kab. Bangli, Kintamani, Dausa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
371	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Orang	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
372	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61.750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.750.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ulian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Awan Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
373	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	124.600.000,00	0,00	0,00	0,00	124.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Mengani Kab. Bangli, Kintamani, Binyan Kab. Bangli, Kintamani, Ullian Kab. Bangli, Kintamani, Bunutin Kab. Bangli, Kintamani, Serai Kab. Bangli, Kintamani, Gunungbau Kab. Bangli, Kintamani, Belanga Kab. Bangli, Kintamani, Batukaang Kab. Bangli, Kintamani, Belantih Kab. Bangli, Kintamani, Catur Kab. Bangli, Kintamani, Pengejaran Kab. Bangli, Kintamani, Selulung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
374	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
375	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
376	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Kali Dokumen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
377	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
378	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	55.600.000,00	0,00	0,00	0,00	55.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
379	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
380	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	911.443.000,00	175.957.000,00	0,00	0,00	1.087.400.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Belantih	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani IV									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
381	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	51.300.000,00	0,00	0,00	0,00	51.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
382	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
383	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
384	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
385	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1061 Orang	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
387	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
388	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
389	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
390	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan Kab. Bangli, Kintamani, Serai	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan Kab. Bangli, Kintamani, Serai	[object Object]
393	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	157.078.500,00	0,00	0,00	0,00	157.078.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
395	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
396	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
397	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
398	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.849.500,00	0,00	0,00	0,00	7.849.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	31 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	54.550.500,00	0,00	0,00	0,00	54.550.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	115.440.000,00	0,00	0,00	0,00	115.440.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
402	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
403	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
405	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
406	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
407	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
408	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	29.300.000,00	0,00	0,00	0,00	29.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
409	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-							
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
410	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
411	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	[object Object]
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
412	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
413	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	856.392.000,00	42.208.000,00	0,00	0,00	898.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisan Kab. Bangli, Kintamani, Buahan Kab. Bangli, Kintamani, Abangsongan Kab. Bangli, Kintamani, Suter Kab. Bangli, Kintamani, Batudinding Kab. Bangli, Kintamani, Terunyan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani V									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan untuk UKM dan UKP	959 %							
414	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37400 Orang	46.210.000,00	0,00	0,00	0,00	46.210.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1215 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	[object Object]
416	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4115 Orang	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
417	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	[object Object]
418	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	180 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	[object Object]
420	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	240.800.000,00	0,00	0,00	0,00	240.800.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	[object Object]
423	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	42.150.000,00	0,00	0,00	0,00	42.150.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00	137.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
427	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1358 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
428	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
429	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan Kab. Bangli, Kintamani, Songan A	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-							
432	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
433	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.672.446.000,00	92.054.000,00	0,00	0,00	1.764.500.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Puskesmas Kintamani VI									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
434	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	14.805.000,00	0,00	0,00	0,00	14.805.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
435	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
436	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
437	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2053 Orang	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
438	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
439	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
440	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
441	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
442	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
443	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	177.619.500,00	0,00	0,00	0,00	177.619.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
444	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
445	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
446	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]	
447	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
448	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]
450	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	99.564.000,00	0,00	0,00	0,00	99.564.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	
451	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional										
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]	
452	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	109.471.500,00	0,00	0,00	0,00	109.471.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
453	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
454	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	[object Object]		
455	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	10.152.000,00	0,00	0,00	0,00	10.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
456	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	48 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		
457	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	6 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
458	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	11.389.500,00	0,00	0,00	0,00	11.389.500,00	Kab. Bangli, Kintamani, Mangguh Kab. Bangli, Kintamani, Belancan Kab. Bangli, Kintamani, Katung Kab. Bangli, Kintamani, Banua Kab. Bangli, Kintamani, Abuan Kab. Bangli, Kintamani, Bonyoh Kab. Bangli, Kintamani, Sekaan Kab. Bangli, Kintamani, Bayung Gede Kab. Bangli, Kintamani, Sekardadi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
459	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.202.780.000,00	107.920.000,00	0,00	0,00	1.310.700.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Songan A Kab. Bangli, Kintamani, Songan B Kab. Bangli, Kintamani, Pinggan Kab. Bangli, Kintamani, Belandingan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
		Rumah Sakit Umum Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %							
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 unit							
460	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	4.331.637.634,00	5.578.057.000,00	0,00	0,00	9.909.694.634,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan dari BLUD
461	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	4.273.392.000,00	0,00	0,00	4.273.392.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
462	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %							
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	455 orang							
463	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	47.413.060.000,00	0,00	0,00	0,00	47.413.060.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan BLUD	100 %							
464	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
465	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	78.658.362.366,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	83.858.362.366,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-							
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,6 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[object Object]	[object Object]
467	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,625 KM	22.420.000,00	4.474.460.000,00	0,00	0,00	4.496.880.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
468	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi									
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	2 Bendung	30.000.000,00	3.755.474.800,00	0,00	0,00	3.785.474.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
469	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.9 KM	351.207.900,00	496.864.300,00	0,00	0,00	848.072.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Pajak Daerah
470	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
472	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	5.090.816.981,00	82.700.000,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tinggal bersanitasi layak	90,80 %							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten /Kota	80 Unit							
473	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman									
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	500 M ³ /Hari	2.310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
474	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Jaringan Drainase dalam kondisi baik	24.47 %							
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
475	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan									
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Ber - IMB persatuan Bangunan	2,02 %							
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Paket							
476	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0 Bangunan Gedung	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
477	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	70 Dokumen	438.100.000,00	0,00	0,00	0,00	438.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Usaha
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota	19,53 %							
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
479	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
480	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan Kondisi Baik	23,38 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	15 Paket							
482	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	45.515 KM	139.840.000,00	9.547.800.000,00	0,00	0,00	9.687.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
483	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
484	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
485	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
486	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	999 KM	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
487	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	80.414 KM	4.714.199.800,00	203.200.200,00	0,00	0,00	4.917.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	67 %							
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %							
488	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	90 Orang	29.265.000,00	0,00	0,00	0,00	29.265.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %							
489	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Paket Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-							
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-							
490	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.510.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	115.510.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
492	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
493	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
494	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
495	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	100 Layanan	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang									
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
497	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK									
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	64.500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %							
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kali							
498	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	12.249.371.000,00	0,00	0,00	0,00	12.249.371.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
499	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.187.000,00	0,00	0,00	0,00	7.187.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
500	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
501	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	350.250.200,00	0,00	0,00	0,00	350.250.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
502	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.815.000,00	0,00	0,00	0,00	40.815.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
503	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
504	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
505	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar									
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
506	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Paket							
507	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.680.000,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	53.150.000,00	0,00	0,00	0,00	53.150.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
509	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	20.041.600,00	0,00	0,00	0,00	20.041.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146 Paket							
510	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
511	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	472.653.150,00	0,00	0,00	0,00	472.653.150,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
512	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	610.443.000,00	0,00	0,00	0,00	610.443.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah Retribusi Jasa Usaha
513	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00	31.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
514	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-							
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-							
515	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani									
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	6,00 Unit							
516	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana									
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-							
518	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	24,45 %							
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha								
519	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	66,00 Unit							
520	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	53 Unit Rumah	5.801.620.000,00	0,00	0,00	0,00	5.801.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	23,58 %							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Perumahan, dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah kabupaten/Kota	16 Unit							
521	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
522	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tertatanya Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi							
523	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Satuan Polisi Pamong Praja									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %							
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %							
524	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11.454.000,00	0,00	0,00	0,00	11.454.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
525	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
526	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	190 Orang	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
527	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
528	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	1.286.846.300,00	67.000,00	0,00	0,00	1.286.913.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
529	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 %							
530	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 dokumen	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	277.200,00	1.905.900,00	0,00	0,00	2.183.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
532	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
533	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	17.999.950,00	0,00	0,00	0,00	17.999.950,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
534	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	218.633.200,00	1.857.000,00	0,00	0,00	220.490.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
535	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	100 %							
536	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	17.199.750,00	0,00	0,00	0,00	17.199.750,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi Perkantoran	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
537	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	66.764.550,00	0,00	0,00	0,00	66.764.550,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
538	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00	2.459.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
539	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/bulan	10.473.990.000,00	0,00	0,00	0,00	10.473.990.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kepagawaian Perangkat Daerah	100 %							
540	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
541	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.024.000,00	0,00	0,00	0,00	1.024.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
542	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.018.400,00	0,00	0,00	0,00	2.018.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
543	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
544	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	66.684.200,00	0,00	0,00	0,00	66.684.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
545	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
546	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %							
547	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
548	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
549	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
550	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.220.000,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
551	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
552	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	84.240.700,00	0,00	0,00	0,00	84.240.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
553	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.330.000,00	0,00	0,00	0,00	9.330.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	85 Persen								
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga/Desa yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	25 Orang								
554	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	25 Orang	17.670.200,00	24.000.000,00	0,00	0,00	41.670.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-								
555	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota										
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	625.763.800,00	100.936.000,00	0,00	0,00	726.699.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah	
556	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	6.060.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-							
557	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	112.518.700,00	5.857.113.000,00	0,00	0,00	5.969.631.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
558	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	257.320.000,00	0,00	0,00	0,00	257.320.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
559	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	0,00	139.118.000,00	0,00	0,00	139.118.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
560	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
561	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.515.666.000,00	0,00	0,00	0,00	6.515.666.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
562	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
563	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.389.900,00	0,00	0,00	0,00	2.389.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
564	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.364.400,00	0,00	0,00	0,00	1.364.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
565	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	41.404.100,00	0,00	0,00	0,00	41.404.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
566	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.066.800,00	0,00	0,00	0,00	5.066.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
567	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
568	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
569	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
570	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	37.050.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
571	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	67.980.000,00	0,00	0,00	0,00	67.980.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
572	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	254.209.400,00	0,00	0,00	0,00	254.209.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
573	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	43 persen							
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	43 persen							
574	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Orang	33.650.000,00	0,00	0,00	0,00	33.650.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
575	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	28.661.000,00	0,00	0,00	0,00	28.661.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
576	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	32.039.100,00	0,00	0,00	0,00	32.039.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal	5 Orang							
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	5 Orang							
577	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen							
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen							
578	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	345 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
579	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	87.652.800,00	0,00	0,00	0,00	87.652.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
581	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar Lanjut usia terlantar, Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 persen							
582	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
583	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
584	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial	62 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyandang Disabilitas Fisik dan mental serta lanjut Usia Tidak Potensial yang menerima jaminan sosial	62 persen							
585	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12475 Keluarga	54.275.000,00	0,00	0,00	0,00	54.275.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
586	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100 persen							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial	100 persen							
587	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49.603.600,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
588	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
590	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-							
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-							
591	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen							
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen							
592	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100 persen							
593	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.585.614.000,00	0,00	0,00	0,00	4.585.614.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
595	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
596	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
597	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
598	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 persen							
599	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
600	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
601	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
602	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100 persen							
603	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4.164.300,00	0,00	0,00	0,00	4.164.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
604	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			0	0 0	3.575.200,00	0,00	0,00	0,00	3.575.200,00	[object Object]	Dana Alokasi Umum (DAU)
605	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
606	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	104 Paket	340.007.300,00	0,00	0,00	0,00	340.007.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
607	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	14.460.200,00	0,00	0,00	0,00	14.460.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
608	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
609	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
610	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	3.982.400,00	0,00	0,00	0,00	3.982.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
611	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100 persen							
612	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
613	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
614	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
615	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
616	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen							
617	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1495 Laporan	7.980.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
618	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
619	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100 persen							
620	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	237.767.650,00	0,00	0,00	0,00	237.767.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
621	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
622	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	18.710.000,00	0,00	0,00	0,00	18.710.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
623	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
624	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
625	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
626	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	24,03 persen							
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif, legislatif dan swasta	24,3 persen							
627	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.120.000,00	0,00	0,00	0,00	102.120.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
628	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
629	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi	100 persen							
630	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen							
631	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
632	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	23.168.000,00	0,00	0,00	0,00	23.168.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 persen							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 persen							
633	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	MENINGKATNYA PORSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN KOTA	100 persen							
635	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
636	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	61.375.000,00	0,00	0,00	0,00	61.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
637	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-							
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
638	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
639	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-							
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
640	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
641	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	76.675.000,00	0,00	0,00	0,00	76.675.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
642	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.270.500,00	0,00	0,00	0,00	19.270.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-							
643	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-							
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
644	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
645	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	28 Layanan	78.524.000,00	0,00	0,00	0,00	78.524.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
646	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
647	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota									
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-							
648	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	undefined							
649	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-							
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-							
650	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	93.890.400,00	0,00	0,00	0,00	93.890.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
651	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	6.771.200,00	0,00	0,00	0,00	6.771.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
652	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-							
653	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	12 Kegiatan	194.873.300,00	0,00	0,00	0,00	194.873.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-							
654	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	1.245.528.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.528.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-							
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-							
655	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3									
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	26 Laporan	5.416.750,00	0,00	0,00	0,00	5.416.750,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
656	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	53.920.000,00	0,00	0,00	0,00	53.920.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-							
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
657	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	11.981.250,00	0,00	0,00	0,00	11.981.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-							
658	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-							
659	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	68 Kelompok	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
660	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	98.412.400,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	4.098.412.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
661	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton	5.180.943.113,00	0,00	0,00	0,00	5.180.943.113,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
662	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.496.250,00	0,00	0,00	0,00	4.496.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
663	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3.927.650,00	0,00	0,00	0,00	3.927.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
664	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	26.850.391.800,00	0,00	0,00	0,00	26.850.391.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
665	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
666	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.988.800,00	0,00	0,00	0,00	3.988.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
667	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	15.037.600,00	0,00	0,00	0,00	15.037.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
668	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	250.066.600,00	0,00	0,00	0,00	250.066.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.126.000,00	0,00	0,00	0,00	22.126.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
670	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
671	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penerimaan Pembiayaan
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
672	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
673	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
675	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.567.500,00	0,00	0,00	0,00	71.567.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
676	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
677	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	176.125.300,00	0,00	0,00	0,00	176.125.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
678	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	11.930.000,00	0,00	0,00	0,00	11.930.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
679	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93 Persen							
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang didaftar	0 Dokumen							
680	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen							
681	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen	365.624.000,00	0,00	0,00	0,00	365.624.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	15 Dokumen							
682	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
683	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	75.648.400,00	0,00	0,00	0,00	75.648.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	0 Laporan							
684	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	87 Persen							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket							
685	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
686	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan									
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	96.722.000,00	0,00	0,00	0,00	96.722.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Laporan							
687	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
688	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	104.500.000,00	0,00	0,00	0,00	104.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
689	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil									
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Laporan Informasi Administrasi Kependudukan	90 Persen							
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70 Dokumen							
690	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	70 Dokumen	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	10.850.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
691	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan							
692	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
693	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	116.640.000,00	0,00	0,00	0,00	116.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan							
694	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	9.994.700,00	0,00	0,00	0,00	9.994.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	81 Persen							
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	70 Dokumen							
695	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	70 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan							
696	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
697	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
698	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4.909.582.000,00	0,00	0,00	0,00	4.909.582.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
699	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen							
700	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.869.200,00	0,00	0,00	0,00	5.869.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
702	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.704.400,00	0,00	0,00	0,00	6.704.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
703	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	124.202.800,00	0,00	0,00	0,00	124.202.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
704	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.406.500,00	0,00	0,00	0,00	4.406.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
705	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
706	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
707	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
709	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
710	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
711	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
712	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
713	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
714	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	225.660.000,00	0,00	0,00	0,00	225.660.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dipelihara	100 Persen							
715	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	84.062.400,00	0,00	0,00	0,00	84.062.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
716	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
717	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	18.180.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	28.180.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
718	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
719	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa yang melakukan penataan desa	17,80 %							
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya desa yang baik	100 %							
720	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa									
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.266.500,00	0,00	0,00	0,00	2.266.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
721	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	13 Unit	6.015.000,00	0,00	0,00	0,00	6.015.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa	100 %							
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa	100 %							
722	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik	48,62 %							
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang baik	72 Desa/Kelurahan							
723	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	68 Dokumen	148.250.000,00	0,00	0,00	0,00	148.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	1.317.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.317.650.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
725	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	286 Orang	152.425.000,00	0,00	0,00	0,00	152.425.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
726	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	68 Laporan	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
727	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	13 Dokumen	116.405.500,00	0,00	0,00	0,00	116.405.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
728	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	56 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
729	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	14 Dokumen	6.585.000,00	0,00	0,00	0,00	6.585.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
730	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	31.835.000,00	0,00	0,00	0,00	31.835.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
731	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang	35.802.000,00	0,00	0,00	0,00	35.802.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
732	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	14 Laporan	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
733	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	8.944.500,00	0,00	0,00	0,00	8.944.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat	42,35 %							
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	72 Desa/Kelurahan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
734	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16 Dokumen	114.944.350,00	0,00	0,00	0,00	114.944.350,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
735	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
736	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 Laporan	30.986.000,00	0,00	0,00	0,00	30.986.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
737	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	72 Laporan	23.931.000,00	0,00	0,00	0,00	23.931.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
738	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	1.283.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.283.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi Daerah - LRA
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %							
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
739	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	4.769.129.000,00	0,00	0,00	0,00	4.769.129.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
740	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
741	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.382.800,00	0,00	0,00	0,00	3.382.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
742	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	29.077.600,00	0,00	0,00	0,00	29.077.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
743	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	195.650.900,00	0,00	0,00	0,00	195.650.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
744	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.911.150,00	0,00	0,00	0,00	16.911.150,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
745	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
746	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
747	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
748	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
749	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1064 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
750	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
751	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
752	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	252.777.300,00	0,00	0,00	0,00	252.777.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
753	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
754	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)	4,3 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 %							
755	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
756	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
757	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga									
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
758	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana									
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
759	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
760	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga									
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
761	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga									
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
762	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga									
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
763	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	504 Laporan	117.600.000,00	0,00	0,00	0,00	117.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
764	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	529.320.000,00	0,00	0,00	0,00	529.320.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
765	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
766	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)									
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur	86,14 %							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	100 %							
767	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
768	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana									
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
769	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	147.000.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
771	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	109.102.000,00	0,00	0,00	0,00	109.102.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
772	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
773	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	86.14 %							
774	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
775	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	436 Orang	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
776	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
777	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0 Laporan	7.463.400,00	944.500.600,00	0,00	0,00	951.964.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	86,14 %							
778	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28 Laporan	38.548.000,00	0,00	0,00	0,00	38.548.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4 Orang	198.050.000,00	0,00	0,00	0,00	198.050.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
780	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
781	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
782	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48 Laporan	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
783	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak									
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
784	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria									
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
785	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
786	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan									
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	86,14 %							
787	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
788	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
789	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Kampung	179.200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapinya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %							
790	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
791	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)									
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Laporan / Dokumen	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
792	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
793	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
794	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
795	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
796	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
797	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4 Orang	1.332.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332.720.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
798	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 %							
799	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
800	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA J)	19.20 %							
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia	5 unit							
801	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	1.651.674.400,00	57.000.000,00	0,00	0,00	1.708.674.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen							
802	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	114.470.200,00	0,00	0,00	0,00	114.470.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8425 unit							
803	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4137 Unit	215.124.050,00	47.000.000,00	0,00	0,00	262.124.050,00	Kab. Bangli, Bangli, Kayubihi	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan							
804	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	610.854.850,00	0,00	0,00	0,00	610.854.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen							
805	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	33.161.600,00	0,00	0,00	0,00	33.161.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 unit							
806	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	59.091.050,00	0,00	0,00	0,00	59.091.050,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Daerah
807	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-							
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
808	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	48.051.450,00	0,00	0,00	0,00	48.051.450,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kedisian	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan							
809	2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	14.92 %							
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan							
810	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.637.236.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637.236.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket							
811	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	[object Object]
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten	18.10 %							
812	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.372.600,00	0,00	0,00	0,00	1.372.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
813	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	4.789.400,00	0,00	0,00	0,00	4.789.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
814	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	214.996.200,00	0,00	0,00	0,00	214.996.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	145.575.000,00	0,00	0,00	0,00	145.575.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah
816	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
817	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00	49.990.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit							
818	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket							
819	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
820	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
821	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	109.260.000,00	0,00	0,00	0,00	109.260.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah kabupaten 3 Jenis	3 Jenis							
822	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	232.196.850,00	0,00	0,00	0,00	232.196.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
823	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
824	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100 %							
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
825	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	877.630.000,00	0,00	0,00	0,00	877.630.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00	26.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
827	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media	728.770.000,00	0,00	0,00	0,00	728.770.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
828	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan SPBE yang dibangun	74 %							
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
829	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE									
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
830	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	389.510.000,00	0,00	0,00	0,00	389.510.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
831	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	580.160.000,00	0,00	0,00	0,00	580.160.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
832	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	29 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
833	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas									
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen							
834	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
835	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
836	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.141.047.450,00	0,00	0,00	0,00	4.141.047.450,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen							
837	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
838	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	1.318.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
839	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	44.611.500,00	0,00	0,00	0,00	44.611.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
840	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
841	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
842	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	82.940.000,00	0,00	0,00	0,00	82.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen							
843	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
844	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	67.524.000,00	0,00	0,00	0,00	67.524.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
845	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	59.730.000,00	0,00	0,00	0,00	59.730.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen							
846	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	92.975.100,00	0,00	0,00	0,00	92.975.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
847	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
848	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Tentang Kabupaten Bangli	1 Profil							
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
849	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen							
850	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen Data	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Keamanan SPBE	100 %							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
851	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
853	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
854	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
855	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	80 Persen							
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	Orang							
856	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
857	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
858	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi									
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah terbinanya lembaga latihan kerja swasta	18 Lembaga							
859	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	18 Lembaga	16.383.950,00	0,00	0,00	0,00	16.383.950,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	82,35 Persen							
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja	100 Orang							
860	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
861	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	57.327.700,00	0,00	0,00	0,00	57.327.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja migran yang dilatih	Orang							
862	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan									
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	28,53 Persen							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang didata dab diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaa	6 Laporan							
863	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	10 Perusahaan							
864	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
865	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
866	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
867	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional	Persen							
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamnya	Unit Usaha							
868	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	unit usaha							
869	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	83,61 Persen							
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	20 Unit Usaha							
870	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	12 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
871	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	75.505.000,00	0,00	0,00	0,00	75.505.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas	Persen							
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai	Unit Usaha							
872	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi	0 Persen							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola koperasi yang dilatih	100 Orang							
873	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi	79,88 Persen							
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi	34 Unit Usaha							
874	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	34 Unit Usaha	59.345.000,00	0,00	0,00	0,00	59.345.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase wirausaha baru	2,48 Persen							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha baru	100 unit usaha							
876	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	35 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
877	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
878	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
879	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	900 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
880	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
881	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	114.288.900,00	0,00	0,00	0,00	114.288.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
882	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	90.618.000,00	0,00	0,00	0,00	90.618.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing	6,73 Persen							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi	60 unit usaha							
883	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
884	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
885	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	203.144.000,00	0,00	0,00	0,00	203.144.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Lain-lain PAD Yang Sah
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
886	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
887	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan	80 persen							
888	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.053.892.000,00	0,00	0,00	0,00	5.053.892.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
889	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
890	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
891	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
892	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah								
893	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
894	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
895	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah	80 persen							
896	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.318.600,00	0,00	0,00	0,00	5.318.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
897	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.381.300,00	0,00	0,00	0,00	26.381.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
898	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
899	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	193.592.900,00	0,00	0,00	0,00	193.592.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah
900	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	21.558.650,00	0,00	0,00	0,00	21.558.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
901	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
902	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
903	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
904	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen							
905	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
906	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
907	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
908	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
909	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	9.382.000,00	0,00	0,00	9.382.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	78,73 Persen							
910	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
911	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	144.276.000,00	0,00	0,00	0,00	144.276.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
912	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	155.530.000,00	0,00	0,00	0,00	155.530.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	77,69 Persen							
913	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	56.316.450,00	0,00	0,00	0,00	56.316.450,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
914	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	18.165.000,00	0,00	0,00	0,00	18.165.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
915	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi	1.334,03 Milyar Rupiah							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen							
916	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	2.629.650,00	0,00	0,00	0,00	2.629.650,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
917	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 Dokumen	2.564.850,00	0,00	0,00	0,00	2.564.850,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dokumen							
918	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
919	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 Dokumen	40.940.000,00	0,00	0,00	0,00	40.940.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	1050 Investor							
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	2 Kali							
920	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33.145.650,00	0,00	0,00	0,00	33.145.650,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
921	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	999.850,00	0,00	0,00	0,00	999.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,87 %							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	98,08 %							
922	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
923	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	520 Pelaku Usaha	59.269.650,00	254.600.000,00	0,00	0,00	313.869.650,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	125 Pelaku Usaha	20.714.950,00	0,00	0,00	0,00	20.714.950,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
925	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	510 Kegiatan Usaha	68.943.750,00	0,00	0,00	0,00	68.943.750,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	58,33 %							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 Perusahaan							
926	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	65 Kegiatan Usaha.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
927	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	65 Pelaku Usaha	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
928	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	53.930.000,00	0,00	0,00	0,00	53.930.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	81 %							
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
929	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %							
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
930	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
931	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
932	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	5.808.265.000,00	0,00	0,00	0,00	5.808.265.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum pada DPMPTSP	100 %							
933	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
934	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.083.400,00	0,00	0,00	0,00	2.083.400,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
935	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.948.500,00	0,00	0,00	0,00	69.948.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
936	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.601.250,00	0,00	0,00	0,00	5.601.250,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
937	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
938	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
939	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.240.000,00	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
940	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
941	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
942	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
943	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
944	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
945	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.450.000,00	0,00	0,00	0,00	257.450.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
946	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297.620.000,00	0,00	0,00	0,00	297.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
947	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	98.907.650,00	0,00	0,00	0,00	98.907.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
948	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.180.000,00	0,00	0,00	0,00	26.180.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
949	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi	35.20 persen							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan objek/unsur kebudayaan	24 Objek							
950	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	659.390.200,00	0,00	0,00	0,00	659.390.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian yang terdata	1 jenis data							
951	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
952	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase bendesa adat, kelihan banjar adat, dan banjar adat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 persen							
953	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat									
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	819 Objek	5.803.722.900,00	17.500.000,00	0,00	0,00	5.821.222.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
954	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	25 sekaa							
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekaa yang terlibat	25 sekaa							
955	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
956	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
957	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional									
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	2.537.743.900,00	37.000.000,00	0,00	0,00	2.574.743.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/dimanfaatkan/dibina	1 Dokumen							
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan Informasi Sejarah (WBTB)	2 WBTB							
958	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
959	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	3.13 persen							
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan	73 Cagar budaya							
960	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	73 Objek	65.780.800,00	0,00	0,00	0,00	65.780.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan destinasi pariwisata	80.00 persen							
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Prosentase Daya Tarik wisata kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,p emantapan,revitalisasi)	100 persen							
961	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
962	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	23.267.834.800,00	0,00	0,00	0,00	23.267.834.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Pengadaan /pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata	100 persen							
963	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	1.081.380.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	1.181.380.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah
964	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
965	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
966	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Pariwisata yang memiliki TDUP	25 Industri Pariwisata							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
967	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota									
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	IKM Kepariwisataaan	81.00 persen							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	81 persen							
968	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
969	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	113.610.000,00	0,00	0,00	0,00	113.610.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
970	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
971	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	108.094.000,00	33.810.000,00	0,00	0,00	141.904.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	15 persen							
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prosentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	15 persen							
972	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
973	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	88,8 persen							
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Prosentase Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	71.8 persen							
974	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
975	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	300 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	17 persen							
976	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen							
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	7 dokumen							
977	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
978	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	2.882.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan							
979	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.097.412.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097.412.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
980	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 persen							
981	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.398.200,00	0,00	0,00	0,00	3.398.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
982	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.188.200,00	0,00	0,00	0,00	5.188.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
983	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	462.443.700,00	0,00	0,00	0,00	462.443.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
984	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.721.500,00	0,00	0,00	0,00	47.721.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
985	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
986	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
987	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	49.970.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 unit							
988	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
989	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
990	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen							
991	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	47.080.000,00	0,00	0,00	0,00	47.080.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
992	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	190.349.500,00	0,00	0,00	0,00	190.349.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
993	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	30 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
994	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	107.389.400,00	0,00	0,00	0,00	107.389.400,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
995	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
996	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan	21,21 %							
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan								
997	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya									
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase tingkat diversifikasi masyarakat	17,42 %							
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase harga Pangan pokok terpantau	18,18 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	32.812.000,00	0,00	0,00	0,00	32.812.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
999	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota									
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.747.500,00	0,00	0,00	0,00	27.747.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia	16,67 %							
1001	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	153.697.500,00	0,00	0,00	0,00	153.697.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kasus kerawanan pangan menurun	19,02 %							
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase laporan ketahanan pangan tersedia	16,67 %							
1002	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	19.245.000,00	0,00	0,00	0,00	19.245.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kerawanan pangan kabupaten terpantau	21,37 %							
1003	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450.520.500,00	0,00	0,00	0,00	450.520.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1004	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	95,50 %							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia	1 Laporan							
1005	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.385.000,00	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase konsumsi ikan masyarakat meningkat	10 %							
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Prasaran usaha perikanan tangkap tersedia	21,21 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1006	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat	31,03 %							
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produktivitas perikanan budidaya	3,86 %							
1007	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1008	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	30 Dokumen	54.342.550,00	0,00	0,00	0,00	54.342.550,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1009	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	295.994.650,00	0,00	0,00	0,00	295.994.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1010	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1011	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat									
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	236.623.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	397.123.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat	31,03 %							
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Produktivitas perikanan budidaya	3,86 %							
1012	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terfasilitasnya promosi produk unggulan daerah	2 Unit Usaha							
1013	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	40.265.300,00	0,00	0,00	0,00	40.265.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengetahuan dan kesehatan masyarakat meningkat	16.85 %							
1014	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	271.399.500,00	0,00	0,00	0,00	271.399.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman perkebunan unggulan perhektar	21,27 %							
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	25,25 %							
1015	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan	379.566.500,00	0,00	0,00	0,00	379.566.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1016	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	71.692.600,00	0,00	0,00	0,00	71.692.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan	19,79 %							
1017	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1018	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman									
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1019	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan									
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	361.157.600,00	0,00	0,00	0,00	361.157.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase bibit ternak yang diadakan	23,23 %							
1020	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	7,65 %							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian	33 %							
1021	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	15,31 %							
1022	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1023	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	205.569.200,00	0,00	0,00	0,00	205.569.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
1024	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1025	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1026	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	207.248.400,00	0,00	0,00	0,00	207.248.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus penyakit ternak menurun	3,56 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Coverage Vaksinasi Rabies tercapai	19,42 %							
1027	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular									
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	1.038.039.900,00	0,00	0,00	0,00	1.038.039.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dikelola	19,42 %							
1028	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT	20,51 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok yang di bina	20,51 %							
1029	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	581 Ha	31.282.050,00	0,00	0,00	0,00	31.282.050,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyenggaraan penyuluh pertanian	19,49 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyenggaraan penyuluhan pertanian	19,49 %							
1030	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	112.677.600,00	0,00	0,00	0,00	112.677.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1031	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	39.921.000,00	0,00	0,00	0,00	39.921.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1032	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1033	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %							
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1034	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.404.500,00	0,00	0,00	0,00	7.404.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	258 Orang/bulan							
1035	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	25.776.771.000,00	0,00	0,00	0,00	25.776.771.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran memadai	100 %							
1036	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.959.600,00	0,00	0,00	0,00	6.959.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1037	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.422.000,00	103.440.000,00	0,00	0,00	116.862.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1038	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	288.097.800,00	0,00	0,00	0,00	288.097.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1039	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.581.900,00	0,00	0,00	0,00	15.581.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1040	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1041	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1042	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.660.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1043	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	191.498.000,00	0,00	0,00	0,00	191.498.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1044	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	209.767.050,00	0,00	0,00	0,00	209.767.050,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1045	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.030.000,00	0,00	0,00	0,00	22.030.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1046	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	321.000.000,00	0,00	0,00	321.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan											
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	undefined undefined									
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0 0									
1047	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1 Dokumen									
1048	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C											
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]		
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)	20 Dokumen									
1049	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1050	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan	100 Persen							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	1 unit							
1051	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	[object Object]
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen							
1052	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1053	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	3.392.023.000,00	231.965.200,00	0,00	0,00	3.623.988.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan							
1054	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1055	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	11.956.000,00	0,00	0,00	0,00	11.956.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Retribusi Daerah - LRA
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.93 Persen							
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedagang yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Nasional	10 Pelaku Usaha							
1056	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	49.62 Persen							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	7500 Unit							
1057	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6500 Unit	54.438.600,00	84.000.000,00	0,00	0,00	138.438.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
1058	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	6500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.75 persen							
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM							
1059	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	36,14 persen							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen							
1060	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	3.794.120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.794.120.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Retribusi Daerah - LRA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1062	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	388.620.000,00	0,00	0,00	0,00	388.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Retribusi Daerah - LRA
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	12,74 persen							
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen							
1063	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen							
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 dokumen 36 dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan							
1065	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.033.283.000,00	0,00	0,00	0,00	5.033.283.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
1066	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	59.080.000,00	0,00	0,00	0,00	59.080.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Daerah - LRA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan komponen instalasi listrik penerangan kantor	20 Paket							
1067	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1068	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	3.354.000,00	0,00	0,00	0,00	3.354.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1069	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	220.113.000,00	0,00	0,00	0,00	220.113.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1070	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6.819.550,00	0,00	0,00	0,00	6.819.550,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1071	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1072	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit							
1073	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1074	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 1000 Laporan							
1075	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1076	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.370.000,00	0,00	0,00	0,00	75.370.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1077	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161.900.000,00	0,00	0,00	0,00	161.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit 18 Unit 20 Unit 17 Unit							
1078	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	82.407.850,00	0,00	0,00	0,00	82.407.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah - LRA
1079	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1080	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	19.970.000,00	0,00	0,00	0,00	19.970.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Umum
1081	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1082	3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Sekretariat Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1083	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/bulan	24.127.464.000,00	0,00	0,00	0,00	24.127.464.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1084	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.679.930.000,00	0,00	0,00	0,00	9.679.930.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1085	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1086	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	832.070.000,00	0,00	0,00	0,00	832.070.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen							
1087	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	825.480.000,00	0,00	0,00	0,00	825.480.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase jumlah transmigran yang ditempatkan	100 Persen							
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Calon Transmigrasi Yang Difasilitasi	100 Persen							
1088	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi									
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen							
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Dokumen							
1089	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	587.385.000,00	0,00	0,00	0,00	587.385.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1090	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1091	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	106.506.000,00	0,00	0,00	0,00	106.506.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen							
1092	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	25.436.918.800,00	0,00	0,00	0,00	25.436.918.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
1093	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	20.641.500,00	0,00	0,00	0,00	20.641.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1094	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	60.167.250,00	0,00	0,00	0,00	60.167.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	50 Dokumen							
1095	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	116.337.550,00	0,00	0,00	0,00	116.337.550,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1096	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	312.996.450,00	0,00	0,00	0,00	312.996.450,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1097	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 Dokumen	213.970.900,00	35.000.000,00	0,00	0,00	248.970.900,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1 Tahun							
1098	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	39.205.000,00	0,00	0,00	0,00	39.205.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pelayanan fasilitasi administrasi perekonomian dan pembangunan	100 Persen							
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	17 Dokumen							
1099	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	6.320.000,00	0,00	0,00	0,00	6.320.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1100	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9 Laporan	238.655.000,00	0,00	0,00	0,00	238.655.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1101	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	9.390.200,00	0,00	0,00	0,00	9.390.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1102	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	20.756.000,00	0,00	0,00	0,00	20.756.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	16 Dokumen							
1103	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	37.512.000,00	0,00	0,00	0,00	37.512.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1104	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	74.864.350,00	0,00	0,00	0,00	74.864.350,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1105	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	64.230.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	138.030.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang							
1106	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan Dokumen	97.967.100,00	83.610.000,00	0,00	0,00	181.577.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1107	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	45.000.000,00	8.347.500,00	0,00	0,00	53.347.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1108	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	129.820.000,00	0,00	0,00	0,00	129.820.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Dokumen							
1109	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	5.855.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Asisten Administrasi Umum									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Pembinaan Perpustakaan	100 Persen							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	30 Perpustakaan							
1110	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	5.447.250,00	0,00	0,00	0,00	5.447.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1111	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20 Layanan	5.277.150,00	0,00	0,00	0,00	5.277.150,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1112	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	13.090.800,00	0,00	0,00	0,00	13.090.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1113	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3425 Eksemplar	495.850,00	0,00	0,00	0,00	495.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba	44 Sekolah							
1114	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7 Orang	95.432.400,00	0,00	0,00	0,00	95.432.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100 Persen							
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	20 Naskah Kuno							
1115	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	10 Eksemplar	6.253.800,00	1.010.000,00	0,00	0,00	7.263.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	100 Persen							
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola	29 OPD							
1116	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	860 Berkas	9.479.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	34.479.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1117	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	5.150.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	22.650.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota	100 Persen							
1118	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI									
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1119	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Dilberdayakan	29 OPD							
1120	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	41 Pengguna	2.025.000,00	20.463.000,00	0,00	0,00	22.488.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1121	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26 Laporan	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	2 Jenis							
1122	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-							
1123	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1124	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-							
1125	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-							
1126	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	7 Arsip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	2 Jenis							
1127	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)									
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2 Arsip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen							
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1128	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.080.000,00	0,00	0,00	0,00	220.080.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1129	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1130	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	625.000,00	807.283.100,00	0,00	0,00	807.908.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1131	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	75.787.800,00	81.565.900,00	0,00	0,00	157.353.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1132	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.356.071.200,00	0,00	0,00	0,00	1.356.071.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1133	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	67.882.500,00	0,00	0,00	0,00	67.882.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1134	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1135	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1136	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1137	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1138	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	692.975.000,00	0,00	0,00	0,00	692.975.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1139	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	931.000.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen							
1140	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	436.529.000,00	0,00	0,00	0,00	436.529.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1141	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	874.392.250,00	0,00	0,00	0,00	874.392.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1142	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	99.600.000,00	0,00	0,00	0,00	99.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1143	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen							
1144	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1145	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen							
1146	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1147	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	100 Persen							
1148	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	108.543.800,00	23.700.000,00	0,00	0,00	132.243.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Retribusi Daerah - LRA
1149	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	69.645.000,00	24.859.000,00	0,00	0,00	94.504.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1150	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	83.305.350,00	31.937.500,00	0,00	0,00	115.242.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen							
1151	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	2.004.953.250,00	0,00	0,00	0,00	2.004.953.250,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1152	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	380.233.600,00	0,00	0,00	0,00	380.233.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1153	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	48.244.050,00	25.000.000,00	0,00	0,00	73.244.050,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	65 %							
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen							
1154	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3 Dokumen	135.300.000,00	0,00	0,00	0,00	135.300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 Dokumen							
1155	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	2.433.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.433.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1156	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	41.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1157	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	1.214.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3 Dokumen							
1158	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.090.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.090.440.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya indek Repormasi Birokrasi	undefined undefined							
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang / Bulan							
1159	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	3.943.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.240.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen Bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Paket logistik Kantor yang disediakan undefined	13 Dokumen 1 Laporan 8 Paket undefined undefined							
1160	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1161	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	376.801.600,00	0,00	0,00	0,00	376.801.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1162	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	78.360.000,00	0,00	0,00	0,00	78.360.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1163	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	496.100.000,00	0,00	0,00	0,00	496.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1164	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	138.750.000,00	0,00	0,00	0,00	138.750.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin dan Sarana Prasarana Kantor yang diadakan	1 Paket							
1165	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1166	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum yang disediakan	12 Laporan							
1167	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1168	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1169	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1.791.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.791.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan dan peralatan Mesin yan terpelihara	27 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1170	4.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	25 Unit	205.054.600,00	0,00	0,00	0,00	205.054.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1171	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	124.530.000,00	0,00	0,00	0,00	124.530.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima Pakaian dan Atributnya	30 orang							
1172	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan	22.477.014.000,00	0,00	0,00	0,00	22.477.014.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1173	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan							
1174	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	53.805.800,00	0,00	0,00	0,00	53.805.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1175	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan	12.605.040.000,00	0,00	0,00	0,00	12.605.040.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	100 %							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 %							
1176	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	355.459.000,00	0,00	0,00	0,00	355.459.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1177	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1178	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	6.990.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1179	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	179.300.000,00	0,00	0,00	0,00	179.300.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100 %							
1180	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1181	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	29 Orang	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1182	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	2.404.000,00	0,00	0,00	0,00	2.404.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang tersusun	100 %							
1183	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	18.460.000,00	0,00	0,00	0,00	18.460.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1184	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	38.330.000,00	0,00	0,00	0,00	38.330.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1185	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1186	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1187	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1188	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1189	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	100.085.000,00	0,00	0,00	0,00	100.085.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1190	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1191	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	25.085.000,00	0,00	0,00	0,00	25.085.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1192	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100 %							
1193	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.855.000,00	0,00	0,00	0,00	20.855.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1194	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1195	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1196	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1197	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1198	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1199	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1200	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.630.000,00	0,00	0,00	0,00	20.630.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1202	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1203	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1204	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1205	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1206	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.220.000,00	0,00	0,00	0,00	25.220.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1207	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1208	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %							
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %							
1209	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 PERSEN							
1210	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.600.867.700,00	0,00	0,00	0,00	4.600.867.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1211	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1212	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1213	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1214	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	100 %							
1215	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.162.600,00	0,00	0,00	0,00	1.162.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1216	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.254.400,00	0,00	0,00	0,00	1.254.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1217	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	71.096.600,00	0,00	0,00	0,00	71.096.600,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1218	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.107.350,00	0,00	0,00	0,00	12.107.350,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1219	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1220	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1221	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1222	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1223	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1224	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1225	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1226	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1227	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	162.500.000,00	0,00	0,00	0,00	162.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1228	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	100.977.100,00	0,00	0,00	0,00	100.977.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1229	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)								
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah											
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5.02	KEUANGAN											
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	93 Persen									
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pesentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen									
1230	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	23.950.000,00	0,00	0,00	0,00	23.950.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1231	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3 Dokumen	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1232	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	2.852.100,00	0,00	0,00	0,00	2.852.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1233	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	167.968.000,00	0,00	0,00	0,00	167.968.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah		
1234	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	71.674.850,00	0,00	0,00	0,00	71.674.850,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		
1235	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	7.674.650,00	0,00	0,00	0,00	7.674.650,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1236	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180 Orang	638.400.000,00	0,00	0,00	0,00	638.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen							
1237	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	133.780.000,00	0,00	0,00	0,00	133.780.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen							
1238	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1239	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1240	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	250 Dokumen	206.892.500,00	0,00	0,00	0,00	206.892.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen							
1241	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	154.769.555.200,00	154.769.555.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
1242	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	0,00	0,00	2.227.335.462,00	0,00	2.227.335.462,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1243	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 Persen							
1244	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	62.800.000,00	0,00	0,00	0,00	62.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	98 Persen							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen							
1245	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	100.900.000,00	0,00	0,00	0,00	100.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1246	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	4.491.000,00	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1247	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1248	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	44.730.000,00	0,00	0,00	0,00	44.730.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1249	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	131.250.000,00	0,00	0,00	0,00	131.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1250	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	103.050.000,00	0,00	0,00	0,00	103.050.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1251	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	118.301.000,00	0,00	0,00	0,00	118.301.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	83 Persen							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen							
1252	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1253	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1254	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1255	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	343.671.000,00	0,00	0,00	0,00	343.671.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1256	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3000 Laporan	960.054.500,00	0,00	0,00	0,00	960.054.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan
1257	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1258	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1259	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1260	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1261	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1262	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	324 Dokumen	1.557.865.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.865.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah Penerimaan Pembiayaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	93 Persen							
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan							
1263	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	17.409.356.143,00	0,00	0,00	0,00	17.409.356.143,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100 Persen							
1264	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	3.882.000,00	0,00	0,00	0,00	3.882.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1265	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.139.200,00	0,00	0,00	0,00	4.139.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1266	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.036.828.300,00	0,00	0,00	0,00	1.036.828.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1267	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	61.119.500,00	0,00	0,00	0,00	61.119.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1269	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 Persen							
1270	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	113.369.100,00	0,00	0,00	113.369.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1271	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	164.421.000,00	0,00	0,00	164.421.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1272	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen							
1273	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1274	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1275	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	22.080.000,00	0,00	0,00	0,00	22.080.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen							
1276	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1277	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	306.884.750,00	0,00	0,00	0,00	306.884.750,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1278	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1279	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan	30 Persen							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1280	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	47.562.500,00	0,00	0,00	0,00	47.562.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1281	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	16.227.500,00	0,00	0,00	0,00	16.227.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1282	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	18.283.000,00	0,00	0,00	0,00	18.283.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1283	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	17.837.500,00	0,00	0,00	0,00	17.837.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1284	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	40 Dokumen	200.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1285	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Laporan	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	3.945.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Persentase Layanan Aparatur	3 Dokumen							
1286	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	26.392.500,00	0,00	0,00	0,00	26.392.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1287	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	37.960.000,00	0,00	0,00	0,00	37.960.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1288	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	20.050.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	3 Dokumen							
1289	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	39.187.500,00	0,00	0,00	0,00	39.187.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1290	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1291	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	106.414.000,00	0,00	0,00	0,00	106.414.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1292	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	2.574.000,00	0,00	0,00	0,00	2.574.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1293	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1250 Orang	21.067.500,00	125.248.000,00	0,00	0,00	146.315.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen							
1294	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.332.500,00	0,00	0,00	0,00	1.332.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan							
1295	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.007.153.000,00	0,00	0,00	0,00	5.007.153.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1296	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1297	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen							
1298	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	15.640.000,00	0,00	0,00	0,00	15.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen							
1299	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.109.800,00	0,00	0,00	0,00	1.109.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1300	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	895.200,00	0,00	0,00	0,00	895.200,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1301	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	77.282.500,00	0,00	0,00	0,00	77.282.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1302	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1303	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1304	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1305	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Unit							
1306	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1307	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1308	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1309	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Laporan							
1310	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1311	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1312	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142.900.000,00	0,00	0,00	0,00	142.900.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	15 Unit							
1313	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	53.597.500,00	0,00	0,00	0,00	53.597.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1314	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1315	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Organisasi yang tertata	2 Dokumen							
1316	5.03.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Diklat	80 Persen							
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	1 Dokumen							
1317	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Laporan							
1318	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	565.955.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	595.133.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		Badan Riset dan Inovasi Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	undefined Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah	undefined undefined 100 %							
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	8 Dokumen							
1319	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1320	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomen dasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1321	5.05.02.2.01.0014	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	341.337.100,00	0,00	0,00	0,00	341.337.100,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan	4 Dokumen							
1322	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1323	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1324	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan	2 Dokumen							
1325	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	158.358.800,00	0,00	0,00	0,00	158.358.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah
1326	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	53.629.400,00	0,00	0,00	0,00	53.629.400,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 %							
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen							
1327	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Dokumen							
1328	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/bulan	790.132.000,00	0,00	0,00	0,00	790.132.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1329	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Dokumen							
1330	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.878.900,00	0,00	0,00	0,00	1.878.900,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1331	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.107.600,00	0,00	0,00	0,00	2.107.600,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1332	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	36.224.800,00	0,00	0,00	0,00	36.224.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1333	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.566.000,00	0,00	0,00	0,00	2.566.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1334	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1335	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit							
1336	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1337	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	42.542.000,00	0,00	0,00	42.542.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1338	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan							
1339	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1340	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1341	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.560.000,00	0,00	0,00	0,00	45.560.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit							
1342	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	46.555.700,00	0,00	0,00	0,00	46.555.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1343	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1344	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Inspektorat									
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01		INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH (Tindak Lanjut)	100 %							
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	1 Dokumen							
1345	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	47.520.000,00	120.200.000,00	0,00	0,00	167.720.000,00	[object Object]	Dana Alokasi Umum (DAU)
1346	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	73.315.500,00	0,00	0,00	0,00	73.315.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1347	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	26.684.500,00	0,00	0,00	0,00	26.684.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1348	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 Kesepakatan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1349	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	72.510.000,00	0,00	0,00	0,00	72.510.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pegawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan							
1350	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	32.200.000,00	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Money,Koordinasi,Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Pengawasan (MCP)	100 %							
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100 %							
1351	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	66.120.000,00	0,00	0,00	0,00	66.120.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1352	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1353	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	575.380.000,00	0,00	0,00	0,00	575.380.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1354	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	80.950.000,00	0,00	0,00	0,00	80.950.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %							
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68 Orang							
1355	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	8.906.042.000,00	0,00	0,00	0,00	8.906.042.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang							
1356	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	2.384.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.400.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket							
1357	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.068.400,00	0,00	0,00	0,00	1.068.400,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1358	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	260.111.800,00	0,00	0,00	0,00	260.111.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1359	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48211 Paket	8.035.500,00	0,00	0,00	0,00	8.035.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1360	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1361	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum	25 Unit							
1362	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104 Unit	0,00	9.642.800,00	0,00	0,00	9.642.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1363	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	131.892.000,00	0,00	0,00	131.892.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket							
1364	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1365	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1366	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	122.966.800,00	0,00	0,00	0,00	122.966.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Paket							
1367	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	174.898.900,00	0,00	0,00	0,00	174.898.900,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1368	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	29.410.000,00	0,00	0,00	0,00	29.410.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Bangli									
7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01		KECAMATAN									
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100 %							
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamat	12 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1369	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan							
1370	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan							
1371	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	27.527.500,00	0,00	0,00	0,00	27.527.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Laporan 4 Lembaga Kemasyarakatan 15 Pokmas/ Ormas 17 Unit							
1372	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	316.695.000,00	0,00	0,00	0,00	316.695.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1373	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	329.550.000,00	0,00	0,00	0,00	329.550.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1374	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	333.050.000,00	0,00	0,00	0,00	333.050.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
1375	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	393.835.200,00	0,00	0,00	0,00	393.835.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Pajak Daerah
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1376	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	750 Orang							
1377	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	750 Orang	34.482.000,00	0,00	0,00	0,00	34.482.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen							
1378	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	6.705.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan							
1379	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.827.500,00	0,00	0,00	0,00	6.827.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan							
1380	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	6.533.322.000,00	0,00	0,00	0,00	6.533.322.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah/Jenis instalasi listrik Bangunan ktr yang tersedia Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Dokumen 26 paket 250 Laporan 6 paket 11 paket 25 paket							
1381	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
1382	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1383	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	353.318.700,00	0,00	0,00	0,00	353.318.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1384	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11.302.400,00	0,00	0,00	0,00	11.302.400,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1385	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1386	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit							
1387	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan							
1388	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1389	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.685.000,00	0,00	0,00	0,00	55.685.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1390	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.516.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.146.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit 13 Unit 50 Unit							
1391	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	67.584.900,00	0,00	0,00	0,00	67.584.900,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1392	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1393	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Kintamani									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1394	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1395	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 Laporan							
1396	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	7.142.800,00	0,00	0,00	0,00	7.142.800,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1397	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.365.200,00	0,00	0,00	0,00	101.365.200,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen dan laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan							
1398	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Laporan undefined undefined							
1399	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48 Lembaga Kemasyarakatan	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1400	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	59.114.000,00	0,00	0,00	0,00	59.114.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-							
1401	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1402	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1403	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1404	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan							
1405	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.224.400,00	0,00	0,00	0,00	36.224.400,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1406	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1407	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1408	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1409	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	240 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1410	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan							
1411	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1412	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	69.816.800,00	0,00	0,00	0,00	69.816.800,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
1413	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1414	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1415	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1416	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
1417	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen							
1418	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1419	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.010.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan							
1420	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.300.677.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.677.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1421	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1422	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	235.280.800,00	0,00	0,00	0,00	235.280.800,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1423	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	350 Dokumen	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1424	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan							
1425	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1426	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1427	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit							
1428	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	167.273.250,00	0,00	0,00	0,00	167.273.250,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1429	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1430	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Kintamani, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Kecamatan Susut									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	prosentase pelayan publik yang dilakukan	86 persen							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1431	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96 persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Dokumen 1 Laporan							
1432	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27 Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1433	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	41.230.000,00	0,00	0,00	0,00	41.230.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-							
1434	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	42.610.000,00	0,00	0,00	0,00	42.610.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	96 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra Suku,Umat berAgama ,Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal Regional dan Nasional	9 Desa							
1435	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 Orang	11.768.050,00	0,00	0,00	0,00	11.768.050,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	86 persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen undefined							
1436	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan							
1437	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.939.162.000,00	0,00	0,00	0,00	2.939.162.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan 10 Paket 10 Paket 10 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1438	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	946.200,00	0,00	0,00	0,00	946.200,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1439	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	213.659.600,00	0,00	0,00	0,00	213.659.600,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1440	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7.350.400,00	0,00	0,00	0,00	7.350.400,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1441	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1442	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	8 unit							
1443	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.920.000,00	39.121.000,00	0,00	0,00	47.041.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor(Benda Pos) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen 12 Laporan 2 Dokumen							
1444	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1445	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	67.650.000,00	0,00	0,00	0,00	67.650.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1446	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	36.480.000,00	0,00	0,00	0,00	36.480.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional Lapangan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	6 Unit 5 Unit 1 Unit							
1447	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	57.124.250,00	0,00	0,00	0,00	57.124.250,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1448	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.390.000,00	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1449	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Susut, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Tembuku									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 persen							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12 dokumen							
1450	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1451	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 Persen							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Laporan							
1452	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00	38.640.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen							
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Laporan							
1453	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Laporan							
1454	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan							
1455	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.784.385.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784.385.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Stel							
1456	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1457	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1458	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.459.000,00	3.197.800,00	0,00	0,00	6.656.800,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1459	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	128.114.700,00	0,00	0,00	0,00	128.114.700,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1460	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1461	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1462	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit							
1463	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1464	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan							
1465	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1466	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.516.000,00	0,00	0,00	0,00	15.516.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1467	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit							
1468	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	70.603.200,00	0,00	0,00	0,00	70.603.200,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1469	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1470	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Tembuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-							
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen							
1471	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	955.415.450,00	0,00	0,00	0,00	955.415.450,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Daerah
1472	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	21.647.500,00	0,00	0,00	0,00	21.647.500,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	72 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen							
1473	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	803.894.932,00	0,00	0,00	0,00	803.894.932,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1474	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25 Orang	91.050.000,00	0,00	0,00	0,00	91.050.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pajak Daerah
1475	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60 Orang	15.995.000,00	0,00	0,00	0,00	15.995.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	75 Persen							
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60 Orang							
1476	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	13.938.000,00	0,00	0,00	0,00	13.938.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	80 Persen							
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Orang							
1477	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	125.605.000,00	0,00	0,00	0,00	125.605.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Informasi Dan Bahan Keterangan Terkait Stabilitas Daerah	85 Persen							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen							
1478	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 Orang	84.068.550,00	0,00	0,00	0,00	84.068.550,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1479	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	120.825.000,00	0,00	0,00	0,00	120.825.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen							
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1480	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.702.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.702.060.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1481	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	21.085.000,00	0,00	0,00	0,00	21.085.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1482	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.386.200,00	0,00	0,00	0,00	1.386.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	12.863.200,00	0,00	0,00	0,00	12.863.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	60.498.000,00	0,00	0,00	0,00	60.498.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1487	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.250.000,00	0,00	0,00	0,00	37.250.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit							
1489	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	77.657.600,00	0,00	0,00	0,00	77.657.600,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1490	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10.060.000,00	0,00	0,00	0,00	10.060.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Bebalang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI

BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	234.879.874.400,00	142.500.000,00	0,00	0,00	235.022.374.400,00
1	01	1	02	Kesehatan	190.900.420.668,00	6.698.586.198,00	0,00	0,00	197.599.006.866,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.903.750.950,00	0,00	0,00	0,00	13.903.750.950,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	17.680.972.150,00	0,00	0,00	0,00	17.680.972.150,00
1	01	1	06	Sosial	5.283.581.050,00	0,00	0,00	0,00	5.283.581.050,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	27.434.872.500,00	0,00	0,00	0,00	27.434.872.500,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.193.776.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	6.203.776.400,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.650.658.600,00	0,00	0,00	0,00	8.650.658.600,00
1	01	2	15	Perhubungan	5.473.136.050,00	42.500.000,00	0,00	0,00	5.515.636.050,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.529.246.850,00	0,00	0,00	0,00	4.529.246.850,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.692.030.900,00	209.382.000,00	0,00	0,00	5.901.412.900,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	6.611.835.800,00	92.200.000,00	0,00	0,00	6.704.035.800,00
1	01	2	20	Statistik	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	25.714.000,00	62.963.000,00	0,00	0,00	88.677.000,00
1	01	3	26	Pariwisata	6.057.614.500,00	0,00	0,00	0,00	6.057.614.500,00
1	01	3	27	Pertanian	26.562.531.850,00	424.440.000,00	0,00	0,00	26.986.971.850,00
1	01	3	31	Perindustrian	5.705.417.400,00	0,00	0,00	0,00	5.705.417.400,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	73.517.099.900,00	1.395.103.000,00	0,00	0,00	74.912.202.900,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	49.051.061.000,00	0,00	0,00	0,00	49.051.061.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	5	01	Perencanaan	5.975.943.750,00	6.600.000,00	0,00	0,00	5.982.543.750,00
1	01	5	02	Keuangan	23.749.894.493,00	277.790.100,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	193.869.745.655,00
1	01	5	03	Kepegawaian	6.012.506.500,00	150.248.000,00	0,00	0,00	6.162.754.500,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	565.955.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	595.133.000,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.515.115.300,00	42.542.000,00	0,00	0,00	1.557.657.300,00
1	01	6	01	Inspektorat	12.933.683.400,00	261.734.800,00	0,00	0,00	13.195.418.200,00
1	01	7	01	Kecamatan	21.788.755.850,00	304.768.800,00	0,00	0,00	22.093.524.650,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	6.172.099.432,00	0,00	0,00	0,00	6.172.099.432,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.578.552.800,00	6.124.996.900,00	0,00	0,00	8.703.549.700,00
2	03	1	06	Sosial	49.603.600,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.555.032.700,00	18.477.799.300,00	0,00	0,00	25.032.832.000,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	94.931.650,00	0,00	0,00	0,00	94.931.650,00
3	04	2	09	Pangan	706.407.500,00	0,00	0,00	0,00	706.407.500,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.732.427.600,00	104.000.000,00	0,00	0,00	2.836.427.600,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	2.603.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.603.560.000,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	542.900.900,00	0,00	0,00	0,00	542.900.900,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	303.958.350,00	254.600.000,00	0,00	0,00	558.558.350,00
3	04	2	21	Persandian	62.720.000,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	898.625.000,00	160.500.000,00	0,00	0,00	1.059.125.000,00
3	04	3	27	Pertanian	2.447.154.850,00	0,00	0,00	0,00	2.447.154.850,00
3	04	3	30	Perdagangan	3.458.417.600,00	315.965.200,00	0,00	0,00	3.774.382.800,00
3	04	3	31	Perindustrian	4.182.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182.740.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.460.210.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	2.660.210.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	7.107.151.413,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	11.107.151.413,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.090.816.981,00	82.700.000,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.151.620.000,00	0,00	0,00	0,00	6.151.620.000,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	58.713.539.714,00	13.493.752.900,00	0,00	0,00	72.207.292.614,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.371.103.400,00	944.500.600,00	0,00	0,00	4.315.604.000,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	24.570.918.800,00	133.810.000,00	0,00	0,00	24.704.728.800,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	53.916.570.255,00	25.747.628.745,00	0,00	0,00	79.664.199.000,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	2.817.806.800,00	30.100.000,00	0,00	0,00	2.847.906.800,00
8	10	2	22	Kebudayaan	9.066.637.800,00	54.500.000,00	0,00	0,00	9.121.137.800,00
8	10	2	23	Perpustakaan	125.997.250,00	1.010.000,00	0,00	0,00	127.007.250,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	293.277.900,00	0,00	0,00	0,00	293.277.900,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	411.132.500,00	0,00	0,00	0,00	411.132.500,00
9	11	3	32	Transmigrasi	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00
				TOTAL	968.210.393.306,00	80.276.399.043,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	1.218.328.853.411,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM



KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.567.400.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.905.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	83.550.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.400.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.854.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	421.800.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.271.000.000,00
Total			9.213.846.000,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90.177.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.877.500,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.625.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.525.000.000,00
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00
Total			11.271.054.500,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.400.100,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00
Total			19.400.100,00
4.	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	216.800.000,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	87.530.000,00
Total			304.330.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			20.808.630.600,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	735.850.000,00
Total			735.850.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.325.000,00
Total			84.325.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	249.997.000,00
Total			249.997.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	42.825.000,00
Total			42.825.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	332.325.000,00
Total			332.325.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	92.250.000,00
Total			92.250.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	177.213.000,00
Total			177.213.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.475.000,00
Total			42.475.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	27.475.000,00
Total			27.475.000,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	142.875.000,00
Total			142.875.000,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	305.675.000,00
Total			305.675.000,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.475.000,00
Total			50.475.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.283.760.000,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.173.516.981,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00
Total			5.173.516.981,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.310.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00
Total			2.410.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			7.583.516.981,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0,00
Total			350.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			350.000.000,00
E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.286.913.300,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	6.240.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	2.183.100,00
		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	247.500,00
Total			1.295.583.900,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	41.670.200,00
Total			41.670.200,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	6.060.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	726.699.800,00
Total			732.759.800,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	257.320.000,00
Total			257.320.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.327.333.900,00
F SPM Bidang Sosial			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	87.652.800,00
		Penyediaan Alat Bantu	57.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	0,00
Total			144.652.800,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00
		Penyediaan Makanan	49.603.600,00
Total			49.603.600,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			194.256.400,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD



KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	235.022.374.400,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	79.492.353.500,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	30.591.000,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	121.054.500,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	20.200.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	197.599.006.866,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	70.630.691.764,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	820.281.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	458.790.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	297.529.850,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	13.903.750.950,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	9.130.427.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	5.173.516.981,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	2.410.000.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	668.100.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	15.205.040.000,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	29.265.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	250.210.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	350.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.801.620.000,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	17.680.972.150,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	1.563.050.000,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	6.744.061.700,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	396.438.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.283.581.050,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	94.350.100,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	144.652.800,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	54.275.000,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	49.603.600,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	16.383.950,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	57.327.700,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	21.220.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	125.288.000,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	61.375.000,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	50.000.000,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	95.945.500,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	78.524.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	214.257.000,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	469.765.500,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	22.385.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	27.434.872.500,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	100.000.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	375.534.900,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	1.245.528.000,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	5.416.750,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	53.920.000,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	11.981.250,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	2.415.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	9.312.355.513,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.406.297.300,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	441.272.400,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	201.222.000,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	137.484.700,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	17.500.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.357.668.750,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	8.281.500,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	1.831.847.000,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	1.452.861.350,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	706.920.000,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	2.217.764.000,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	1.390.920.000,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.515.636.050,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	2.788.376.150,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	48.051.450,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.529.246.850,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.632.600.000,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	970.960.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.901.412.900,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	75.505.000,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	59.345.000,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	204.906.900,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	203.144.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.704.035.800,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	46.134.500,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	34.145.500,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	403.528.350,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	62.810.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	11.940.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	198.892.800,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	0,00	2.499.014.000,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	150.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	5.100.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	62.720.000,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	6.480.613.100,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	2.574.743.900,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	65.780.800,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	119.743.450,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	7.263.800,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	83.657.000,00
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	5.020.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	747.460.200,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	311.664.800,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.057.614.500,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	24.449.214.800,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	255.514.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	26.986.971.850,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	812.416.700,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	412.817.600,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	1.038.039.900,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	31.282.050,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	152.598.600,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	3.623.988.200,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	11.956.000,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	138.438.600,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.705.417.400,00
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	4.182.740.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	23.928.750,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	47.084.157.300,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	26.931.918.450,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	896.127.150,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	43.136.671.000,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	5.914.390.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.163.365.750,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	624.683.000,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	194.495.000,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	19.331.029.993,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	171.174.403.162,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	502.722.000,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.861.590.500,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.640.405.500,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	522.349.000,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	595.133.000,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	1.004.332.000,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	553.325.300,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	12.060.338.200,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	379.630.000,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	755.450.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	20.172.958.700,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	129.038.000,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.553.401.700,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	89.494.400,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	46.250.050,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	102.381.800,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.939.660.000,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	977.062.950,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	910.939.932,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	13.938.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	125.605.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	204.893.550,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA
RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD



KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	345.031.689.900,00	320.303.320.200,00	317.534.480.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	341.683.646.900,00	317.455.413.400,00	314.686.573.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	341.683.646.900,00	317.455.413.400,00	314.686.573.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.220.957.200,00	81.257.959.800,00	79.492.353.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	52.796.778.430,00	51.281.578.430,00	50.676.238.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	419.000.000,00	419.000.000,00	419.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.904.500.000,00	8.904.500.000,00	8.904.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	351.000.000,00	351.000.000,00	351.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	127.917.500,00	127.917.500,00	127.917.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.030.000.000,00	7.525.000.000,00	7.525.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	19.400.100,00	19.400.100,00	19.400.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	26.325.660.830,00	26.315.460.830,00	23.499.024.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	3.625.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	22.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	421.800.000,00	421.800.000,00	421.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.854.000.000,00	1.854.000.000,00	1.854.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.347.500.000,00	2.347.500.000,00	2.347.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.271.000.000,00	1.271.000.000,00	1.271.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0,00	0,00	88.696.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.634.851.370,00	23.794.951.370,00	22.311.327.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.306.000.000,00	1.306.000.000,00	1.306.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	228.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	161.304.000,00	161.304.000,00	161.304.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.019.000.000,00	4.182.500.000,00	4.182.500.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.357.609.170,00	16.354.209.170,00	14.635.185.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	7.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18.138.400,00	18.138.400,00	18.138.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	399.800.000,00	399.800.000,00	399.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.659.230.000,00	6.071.430.000,00	6.376.704.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0,00	0,00	299.974.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.782.300.000,00	2.778.900.000,00	2.567.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.486.000.000,00	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0,00	0,00	216.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	90.930.000,00	87.530.000,00	87.530.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	130.097.400,00	110.000.000,00	128.083.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	130.097.400,00	110.000.000,00	83.550.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0,00	0,00	44.533.700,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	30.591.000,00	30.591.000,00	30.591.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.591.000,00	30.591.000,00	30.591.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30.591.000,00	30.591.000,00	30.591.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	128.104.500,00	117.904.500,00	121.054.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	128.104.500,00	117.904.500,00	121.054.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	34.277.500,00	30.877.500,00	30.877.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	93.827.000,00	87.027.000,00	90.177.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.200.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	257.283.794.200,00	236.028.758.100,00	235.022.374.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.800.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.800.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	255.051.332.700,00	234.151.932.700,00	233.152.749.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	255.051.332.700,00	234.151.932.700,00	233.152.749.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.095.000,00	48.480.000,00	48.480.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	59.095.000,00	48.480.000,00	48.480.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.542.250,00	314.991.150,00	307.791.150,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.730.800,00	6.730.800,00	6.730.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.800,00	7.142.800,00	7.142.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.980.400,00	264.272.800,00	257.072.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.445.750,00	33.334.750,00	33.334.750,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.732.500,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.400.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135.400.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.386.000,00	937.986.000,00	937.986.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.186.000,00	113.786.000,00	113.786.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	958.200.000,00	804.200.000,00	804.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.238.250,00	409.368.250,00	409.368.250,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	304.398.250,00	252.528.250,00	252.528.250,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.840.000,00	46.840.000,00	46.840.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.348.043.000,00	2.847.906.800,00	2.847.906.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.348.043.000,00	2.847.906.800,00	2.847.906.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	214.216.500,00	198.892.800,00	198.892.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	214.216.500,00	198.892.800,00	198.892.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	214.216.500,00	198.892.800,00	198.892.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.983.826.500,00	2.499.014.000,00	2.499.014.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.483.826.500,00	999.014.000,00	999.014.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.483.826.500,00	999.014.000,00	999.014.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	110.983.298.126,00	107.416.483.626,00	98.413.228.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	110.983.298.126,00	107.416.483.626,00	98.413.228.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	110.983.298.126,00	107.416.483.626,00	98.413.228.480,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.673.726.076,00	54.368.426.076,00	46.939.247.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.275.613.269,00	8.261.813.269,00	5.828.350.417,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	90.000.000,00	90.000.000,00	37.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.324.592.700,00	1.324.592.700,00	477.403.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	594.000.000,00	594.000.000,00	198.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	208.500.000,00	208.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	652.449.200,00	652.449.200,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	63.301.200,00	63.301.200,00	63.301.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.043.360.169,00	5.043.360.169,00	4.923.145.317,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	294.610.000,00	280.810.000,00	129.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.878.012.807,00	45.600.112.807,00	40.009.023.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	365.775.000,00	365.775.000,00	365.775.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.325.000,00	12.325.000,00	84.325.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	75.047.000,00	75.047.000,00	249.997.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	703.125.000,00	703.125.000,00	25.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99.025.000,00	99.025.000,00	99.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	116.850.000,00	116.850.000,00	92.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	231.275.000,00	231.275.000,00	177.213.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	103.875.000,00	103.875.000,00	42.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	290.115.000,00	290.115.000,00	27.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	30.475.000,00	30.475.000,00	12.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	624.525.000,00	624.525.000,00	201.525.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	310.325.000,00	310.325.000,00	50.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	39.468.000,00	39.468.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.775.000,00	15.775.000,00	83.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	767.010.000,00	767.010.000,00	90.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	194.820.000,00	194.820.000,00	309.730.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	420.625.000,00	420.625.000,00	336.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.955.000,00	63.955.000,00	2.475.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.433.088.800,00	4.361.088.800,00	779.613.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.731.184.000,00	33.731.184.000,00	33.751.341.980,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	27.903.000,00	27.903.000,00	3.808.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	95.670.000,00	95.670.000,00	70.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.133.400.000,00	944.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	170.739.007,00	153.739.007,00	149.275.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	36.825.000,00	36.825.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	567.900.000,00	567.900.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	54.075.000,00	54.075.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	19.155.000,00	19.155.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	581.075.000,00	581.075.000,00	27.475.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	13.200.000,00	13.200.000,00	6.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	174.983.000,00	174.983.000,00	119.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	428.900.000,00	428.900.000,00	79.774.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	428.900.000,00	428.900.000,00	79.774.083,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.200.000,00	77.600.000,00	1.022.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	91.200.000,00	77.600.000,00	1.022.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.183.320.000,00	2.176.320.000,00	820.281.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	274.384.000,00	274.384.000,00	101.471.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	271.184.000,00	271.184.000,00	98.271.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.894.136.000,00	1.887.136.000,00	704.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.894.136.000,00	1.887.136.000,00	704.010.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	409.600.000,00	409.600.000,00	458.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	78.784.000,00	78.784.000,00	91.626.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	78.784.000,00	78.784.000,00	91.626.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	171.056.000,00	171.056.000,00	183.771.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	171.056.000,00	171.056.000,00	183.771.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	159.760.000,00	159.760.000,00	183.392.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	159.760.000,00	159.760.000,00	183.392.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	76.230.000,00	76.230.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.450.000,00	54.450.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	54.450.000,00	54.450.000,00	213.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.640.422.050,00	50.385.907.550,00	49.980.984.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.700.000,00	47.500.000,00	42.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.200.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.500.000,00	47.500.000,00	42.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.866.189.000,00	48.711.889.000,00	48.698.399.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.702.779.000,00	48.555.179.000,00	48.555.179.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	163.410.000,00	156.710.000,00	143.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	263.000.000,00	249.100.000,00	112.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	263.000.000,00	249.100.000,00	112.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.100.000,00	82.000.000,00	77.060.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.200.000,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	88.900.000,00	82.000.000,00	77.060.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.432.300,00	242.960.300,00	242.960.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.425.500,00	7.425.500,00	7.425.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.693.200,00	7.693.200,00	7.693.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	204.887.100,00	201.587.100,00	201.587.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.906.500,00	20.734.500,00	20.734.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	198.984.700,00	198.984.700,00	108.537.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	45.937.500,00	45.937.500,00	45.937.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.047.200,00	153.047.200,00	62.600.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.173.000,00	530.173.000,00	386.849.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	460.953.000,00	460.953.000,00	307.449.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.220.000,00	59.220.000,00	59.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.843.050,00	323.300.550,00	312.558.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.243.050,00	295.700.550,00	284.958.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						Puskesmas Bangli	2.193.150.000,00	2.193.150.000,00	1.884.328.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	817.350.000,00	817.350.000,00	505.528.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	805.350.000,00	805.350.000,00	492.088.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.400.000,00	12.400.000,00	16.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47.300.000,00	47.300.000,00	29.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.400.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.466.000,00	225.466.000,00	139.678.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.800.000,00	10.800.000,00	8.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.280.000,00	12.280.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	158.100.000,00	158.100.000,00	105.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	208.804.000,00	208.804.000,00	107.860.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	600.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.500.000,00	6.500.000,00	2.390.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	110.900.000,00	110.900.000,00	68.040.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	0,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	13.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00	1.375.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Bangli Utara	1.780.200.000,00	1.780.200.000,00	1.814.433.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	562.500.000,00	562.500.000,00	584.213.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	562.500.000,00	562.500.000,00	584.213.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.500.000,00	73.500.000,00	17.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	85.000.000,00	85.000.000,00	17.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.000.000,00	35.000.000,00	17.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	26.000.000,00	26.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0,00	0,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	79.999.925,00	79.999.925,00	224.183.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32.000.000,00	32.000.000,00	13.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	25.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.000.000,00	42.000.000,00	54.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.000.075,00	130.000.075,00	132.980.650,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	10.000.000,00	10.000.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	20.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	0,00	6.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	31.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	12.519.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	12.519.350,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	12.519.350,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00	1.217.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Susut I	2.439.300.000,00	2.439.300.000,00	2.177.028.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	810.900.000,00	810.900.000,00	557.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	798.900.000,00	798.900.000,00	557.492.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.900.000,00	25.900.000,00	31.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.912.500,00	42.912.500,00	18.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000,00	9.900.000,00	9.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	208.902.500,00	208.902.500,00	197.678.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	3.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.300.000,00	15.300.000,00	13.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.200.000,00	25.200.000,00	12.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	124.300.000,00	124.300.000,00	44.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	213.560.000,00	213.560.000,00	126.764.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.300.000,00	3.300.000,00	10.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	92.750.000,00	92.750.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	52.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.700.000,00	15.700.000,00	6.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.700.000,00	15.700.000,00	6.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.700.000,00	15.700.000,00	6.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00	1.612.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Susut II	2.153.200.000,00	2.153.200.000,00	1.956.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	739.950.000,00	739.950.000,00	535.198.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.950.000,00	739.950.000,00	535.198.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.200.000,00	3.200.000,00	31.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.325.000,00	26.325.000,00	16.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	237.299.200,00	237.299.200,00	207.378.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	3.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	14.400.000,00	11.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.775.000,00	12.775.000,00	18.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	6.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	150.290.000,00	150.290.000,00	37.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	194.860.800,00	194.860.800,00	113.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.200.000,00	12.200.000,00	13.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.000.000,00	79.000.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	0,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	50.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.550.000,00	9.550.000,00	17.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.550.000,00	9.550.000,00	17.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.550.000,00	9.550.000,00	17.930.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00	1.403.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Tembuku I	2.291.400.000,00	2.291.400.000,00	1.998.428.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	811.320.000,00	811.320.000,00	512.828.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	799.320.000,00	799.320.000,00	512.828.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.880.000,00	34.880.000,00	26.580.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.350.000,00	16.350.000,00	12.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.600.000,00	12.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	189.024.000,00	189.024.000,00	172.778.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	2.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.900.000,00	15.900.000,00	12.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	11.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	139.800.000,00	139.800.000,00	38.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	230.929.000,00	230.929.000,00	114.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	73.227.000,00	73.227.000,00	21.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	51.060.000,00	51.060.000,00	2.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	61.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.680.000,00	5.680.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.680.000,00	5.680.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.680.000,00	5.680.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00	1.474.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Tembuku II	2.383.900.000,00	2.383.900.000,00	2.098.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	820.150.000,00	820.150.000,00	537.858.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.150.000,00	808.150.000,00	537.858.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.200.000,00	17.200.000,00	18.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.180.000,00	11.180.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.400.000,00	46.400.000,00	26.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	28.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000,00	1.200.000,00	3.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	218.700.000,00	218.700.000,00	195.278.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.300.000,00	36.300.000,00	9.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	47.195.000,00	47.195.000,00	22.785.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	10.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.625.000,00	101.625.000,00	51.515.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	205.350.000,00	205.350.000,00	123.430.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.600.000,00	25.600.000,00	3.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	86.200.000,00	86.200.000,00	740.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	0,00	1.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	42.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.250.000,00	9.250.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.250.000,00	9.250.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.250.000,00	9.250.000,00	6.470.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00	1.554.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Kintamani I	2.402.900.000,00	2.402.900.000,00	2.189.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	772.700.000,00	772.700.000,00	587.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	760.700.000,00	760.700.000,00	587.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.000.000,00	38.000.000,00	39.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	93.100.000,00	93.100.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	48.850.000,00	48.850.000,00	16.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.600.000,00	1.600.000,00	8.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.600.000,00	1.600.000,00	7.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	193.820.000,00	193.820.000,00	208.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.400.000,00	6.400.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	45.000.000,00	45.000.000,00	13.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.200.000,00	20.200.000,00	13.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	10.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	55.000.000,00	55.000.000,00	40.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	168.930.000,00	168.930.000,00	137.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	8.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	59.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.500.000,00	31.500.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.500.000,00	31.500.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.500.000,00	31.500.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00	1.598.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Kintamani II	1.884.500.000,00	1.884.500.000,00	1.621.728.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	836.600.000,00	836.600.000,00	573.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	816.200.000,00	816.200.000,00	573.828.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.640.000,00	90.640.000,00	39.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	85.680.000,00	85.680.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.900.000,00	15.900.000,00	16.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	21.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	220.130.000,00	220.130.000,00	187.878.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47.850.000,00	47.850.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	700.000,00	700.000,00	5.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	116.050.000,00	116.050.000,00	72.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	171.350.000,00	171.350.000,00	136.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	700.000,00	700.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	700.000,00	700.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	40.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	47.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00	1.047.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kintamani III	1.616.430.000,00	1.616.430.000,00	1.620.928.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	529.030.000,00	529.030.000,00	531.328.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	529.030.000,00	529.030.000,00	531.328.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84.000.000,00	84.000.000,00	38.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39.600.000,00	39.600.000,00	31.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.000.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	1.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142.175.400,00	142.175.400,00	185.528.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.700.000,00	15.700.000,00	8.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.600.000,00	13.600.000,00	1.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	7.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.450.000,00	35.450.000,00	61.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	147.404.600,00	147.404.600,00	124.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	7.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	40.000.000,00	40.000.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	55.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00	1.087.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kintamani IV	1.717.000.000,00	1.717.000.000,00	1.413.928.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	795.062.500,00	795.062.500,00	506.568.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.062.500,00	783.062.500,00	506.568.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.200.000,00	22.200.000,00	51.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.750.000,00	11.750.000,00	11.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	18.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.500.000,00	8.500.000,00	24.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.456.100,00	240.456.100,00	157.078.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.000.000,00	21.000.000,00	10.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.662.500,00	24.662.500,00	7.849.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	8.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	117.050.000,00	117.050.000,00	54.550.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	187.863.900,00	187.863.900,00	115.440.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.155.000,00	9.155.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	107.925.000,00	107.925.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0,00	0,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	29.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.337.500,00	23.337.500,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.337.500,00	23.337.500,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.337.500,00	23.337.500,00	8.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	898.600.000,00	898.600.000,00	898.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	898.600.000,00	898.600.000,00	898.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	898.600.000,00	898.600.000,00	898.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Kintamani V	2.588.700.000,00	2.588.700.000,00	2.346.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	824.200.000,00	824.200.000,00	582.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	803.650.000,00	803.650.000,00	582.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.100.000,00	100.100.000,00	46.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.500.000,00	37.500.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	10.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	300.000,00	300.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.991.200,00	241.991.200,00	240.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	37.900.000,00	37.900.000,00	8.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	123.300.000,00	123.300.000,00	42.150.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	190.658.800,00	190.658.800,00	137.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	600.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	6.540.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	0,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	0,00	71.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00	1.764.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kintamani VI	2.126.900.000,00	2.126.900.000,00	1.816.001.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	788.375.000,00	788.375.000,00	493.912.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	788.375.000,00	788.375.000,00	493.912.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.000.000,00	4.000.000,00	14.805.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.677.500,00	29.677.500,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.662.500,00	56.662.500,00	19.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	9.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	226.895.000,00	226.895.000,00	177.619.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.900.000,00	18.900.000,00	12.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.570.000,00	14.570.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.200.000,00	80.200.000,00	99.564.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	220.560.000,00	220.560.000,00	109.471.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.135.000,00	24.135.000,00	10.152.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	92.375.000,00	92.375.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	0,00	16.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	27.825.000,00	27.825.000,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.825.000,00	27.825.000,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27.825.000,00	27.825.000,00	11.389.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00	1.310.700.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah	222.043.322.366,00	219.461.422.366,00	148.454.509.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.331.637.634,00	4.331.637.634,00	17.183.086.634,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.331.637.634,00	4.331.637.634,00	17.183.086.634,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.331.637.634,00	4.331.637.634,00	9.909.694.634,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	4.273.392.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	3.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	217.711.684.732,00	215.129.784.732,00	131.271.422.366,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.994.960.000,00	47.413.060.000,00	47.413.060.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.994.960.000,00	47.413.060.000,00	47.413.060.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	167.716.724.732,00	167.716.724.732,00	83.858.362.366,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83.858.362.366,00	83.858.362.366,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83.858.362.366,00	83.858.362.366,00	83.858.362.366,00
1.03.1.04.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	63.346.171.000,00	61.884.245.950,00	52.921.929.931,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	52.341.331.000,00	50.889.705.950,00	46.770.309.931,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.276.040.000,00	8.262.040.000,00	9.130.427.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.276.040.000,00	8.262.040.000,00	9.130.427.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.487.000.000,00	2.487.000.000,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,00	0,00	4.496.880.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	4.924.999.050,00	4.924.999.050,00	3.785.474.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	864.040.950,00	850.040.950,00	848.072.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.866.440.000,00	3.859.540.000,00	5.173.516.981,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.866.440.000,00	3.859.540.000,00	5.173.516.981,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.866.440.000,00	3.859.540.000,00	5.173.516.981,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	2.410.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	2.410.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	3.160.000.000,00	3.160.000.000,00	2.310.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	444.900.000,00	438.100.000,00	668.100.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	444.900.000,00	438.100.000,00	668.100.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	230.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	444.900.000,00	438.100.000,00	438.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.909.640.000,00	20.885.440.000,00	15.205.040.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.909.640.000,00	20.885.440.000,00	15.205.040.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	15.382.040.000,00	15.368.040.000,00	9.687.640.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.927.600.000,00	4.917.400.000,00	4.917.400.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	29.265.000,00	29.265.000,00	29.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	29.265.000,00	29.265.000,00	29.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	29.265.000,00	29.265.000,00	29.265.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	404.440.000,00	251.620.000,00	250.210.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	201.920.000,00	116.920.000,00	115.510.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	116.920.000,00	116.920.000,00	115.510.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	85.000.000,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	78.600.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	78.600.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	123.920.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	123.920.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.150.606.000,00	13.903.700.950,00	13.903.750.950,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.159.771.000,00	12.249.371.000,00	12.249.371.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.159.771.000,00	12.249.371.000,00	12.249.371.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.639.200,00	401.972.200,00	401.972.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.187.000,00	7.187.000,00	7.187.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.917.200,00	350.250.200,00	350.250.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.815.000,00	40.815.000,00	40.815.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.751.600,00	90.871.600,00	90.871.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.680.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.150.000,00	53.150.000,00	53.150.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.921.600,00	20.041.600,00	20.041.600,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.444.200,00	1.161.486.150,00	1.161.536.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	539.569.200,00	472.603.150,00	472.653.150,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	854.435.000,00	610.443.000,00	610.443.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.004.840.000,00	10.994.540.000,00	6.151.620.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	875.000.000,00	875.000.000,00	350.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	875.000.000,00	875.000.000,00	350.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	875.000.000,00	875.000.000,00	350.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.129.840.000,00	10.119.540.000,00	5.801.620.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.129.840.000,00	10.119.540.000,00	5.801.620.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10.129.840.000,00	10.119.540.000,00	5.801.620.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	14.037.510.000,00	12.254.291.550,00	12.288.291.550,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.037.510.000,00	12.254.291.550,00	12.288.291.550,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.806.920.000,00	1.529.050.000,00	1.563.050.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.499.387.300,00	1.270.607.300,00	1.304.607.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.454.000,00	11.454.000,00	11.454.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.475.933.300,00	1.252.913.300,00	1.286.913.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	285.532.950,00	241.242.950,00	241.242.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	247.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	0,00	0,00	2.183.100,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	214.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.999.950,00	17.999.950,00	17.999.950,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	267.533.000,00	223.243.000,00	220.490.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	108.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	21.999.750,00	17.199.750,00	17.199.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	21.999.750,00	17.199.750,00	17.199.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.230.590.000,00	10.725.241.550,00	10.725.241.550,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.224.250,00	69.224.250,00	69.224.250,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.764.550,00	66.764.550,00	66.764.550,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.459.700,00	2.459.700,00	2.459.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.920.590.000,00	10.473.990.000,00	10.473.990.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.920.590.000,00	10.473.990.000,00	10.473.990.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.835.050,00	73.086.600,00	73.086.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.018.400,00	2.018.400,00	2.018.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.612.650,00	66.864.200,00	66.684.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.370.000,00	15.370.000,00	15.370.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.570.700,00	93.570.700,00	93.570.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.240.700,00	84.240.700,00	84.240.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.330.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	30.246.614.000,00	27.608.024.700,00	14.096.230.300,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	796.869.000,00	581.533.000,00	6.744.061.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	17.619.600,00	6.909.600,00	41.670.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	17.619.600,00	6.909.600,00	41.670.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	667.309.400,00	522.603.400,00	732.759.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	644.124.400,00	516.543.400,00	726.699.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	23.185.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	111.940.000,00	52.020.000,00	5.969.631.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	111.940.000,00	52.020.000,00	5.969.631.700,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.296.760.000,00	672.830.000,00	396.438.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.296.760.000,00	672.830.000,00	396.438.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	678.727.000,00	240.320.000,00	257.320.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	618.033.000,00	432.510.000,00	139.118.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.152.985.000,00	26.353.661.700,00	6.955.730.600,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.861.464.000,00	26.062.664.000,00	6.515.666.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.965.366.000,00	6.515.666.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.965.366.000,00	6.515.666.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.965.366.000,00	6.515.666.000,00	6.515.666.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.965.366.000,00	6.515.666.000,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.581.000,00	53.687.700,00	52.325.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.389.900,00	2.389.900,00	2.389.900,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.364.400,00	1.364.400,00	1.364.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.451.700,00	42.742.600,00	41.404.100,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.275.000,00	5.090.800,00	5.066.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.990.000,00	115.110.000,00	111.630.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	6.600.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.050.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.940.000,00	71.060.000,00	67.980.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.950.000,00	122.200.000,00	276.109.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.050.000,00	100.300.000,00	254.209.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.575.359.500,00	10.898.310.050,00	6.037.595.050,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.791.023.500,00	10.197.251.550,00	5.626.462.550,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	122.999.500,00	94.350.100,00	94.350.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	122.999.500,00	94.350.100,00	94.350.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	44.753.500,00	33.650.000,00	33.650.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36.215.000,00	28.661.000,00	28.661.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42.031.000,00	32.039.100,00	32.039.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	160.569.050,00	144.652.800,00	144.652.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	160.569.050,00	144.652.800,00	144.652.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	65.400.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	95.169.050,00	87.652.800,00	87.652.800,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	60.141.000,00	54.050.000,00	54.275.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.141.000,00	54.050.000,00	54.275.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.141.000,00	54.050.000,00	54.275.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	70.354.000,00	49.603.600,00	49.603.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	70.354.000,00	49.603.600,00	49.603.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	70.354.000,00	49.603.600,00	49.603.600,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.376.959.950,00	9.854.595.050,00	5.283.581.050,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.571.628.000,00	9.171.228.000,00	4.585.614.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.785.814.000,00	4.585.614.000,00	4.585.614.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.785.814.000,00	4.585.614.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.084.700,00	375.009.400,00	372.609.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.164.300,00	4.164.300,00	4.164.300,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.575.200,00	3.575.200,00	3.575.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	412.482.600,00	342.407.300,00	340.007.300,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.460.200,00	14.460.200,00	14.460.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.982.400,00	3.982.400,00	3.982.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.880.000,00	68.880.000,00	68.880.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.367.250,00	239.477.650,00	256.477.650,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.657.250,00	220.767.650,00	237.767.650,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.710.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	784.336.000,00	701.058.500,00	411.132.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	784.336.000,00	701.058.500,00	411.132.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	103.636.000,00	73.288.000,00	125.288.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	56.800.000,00	50.120.000,00	102.120.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	56.800.000,00	50.120.000,00	102.120.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.836.000,00	23.168.000,00	23.168.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.836.000,00	23.168.000,00	23.168.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	162.240.500,00	148.365.500,00	61.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	48.795.000,00	34.920.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	48.795.000,00	34.920.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	113.445.500,00	113.445.500,00	61.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.445.500,00	113.445.500,00	61.375.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	170.000.000,00	130.945.500,00	95.945.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	130.945.500,00	95.945.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140.000.000,00	111.675.000,00	76.675.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	19.270.500,00	19.270.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	298.459.500,00	298.459.500,00	78.524.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.941.000,00	64.941.000,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	64.941.000,00	64.941.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	153.926.500,00	153.926.500,00	78.524.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	153.926.500,00	153.926.500,00	78.524.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.592.000,00	79.592.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	79.592.000,00	79.592.000,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	37.309.160.450,00	34.594.721.913,00	38.542.023.913,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	37.309.160.450,00	34.594.721.913,00	38.542.023.913,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	539.004.500,00	375.534.900,00	375.534.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	325.369.500,00	180.661.600,00	180.661.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	134.489.500,00	93.890.400,00	93.890.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	110.880.000,00	6.771.200,00	6.771.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	213.635.000,00	194.873.300,00	194.873.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	213.635.000,00	194.873.300,00	194.873.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.477.838.000,00	1.313.728.000,00	1.245.528.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.477.838.000,00	1.313.728.000,00	1.245.528.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.477.838.000,00	1.313.728.000,00	1.245.528.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6.500.500,00	5.416.750,00	5.416.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	6.500.500,00	5.416.750,00	5.416.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	6.500.500,00	5.416.750,00	5.416.750,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	116.920.000,00	53.920.000,00	53.920.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.920.000,00	53.920.000,00	53.920.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	116.920.000,00	53.920.000,00	53.920.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	64.111.800,00	11.981.250,00	11.981.250,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.111.800,00	11.981.250,00	11.981.250,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	64.111.800,00	11.981.250,00	11.981.250,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2.415.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.619.973.000,00	5.289.653.513,00	9.312.355.513,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	5.619.973.000,00	5.289.653.513,00	9.312.355.513,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	145.624.000,00	98.412.400,00	4.098.412.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.441.349.000,00	5.158.241.113,00	5.180.943.113,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.282.397.650,00	27.442.072.500,00	27.434.872.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.252.650,00	8.423.900,00	8.423.900,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000,00	4.496.250,00	4.496.250,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.052.650,00	3.927.650,00	3.927.650,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.605.566.800,00	26.851.266.800,00	26.851.266.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.604.691.800,00	26.850.391.800,00	26.850.391.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	875.000,00	875.000,00	875.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.810.700,00	295.935.300,00	303.259.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	275.000,00	3.988.800,00	3.988.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.321.600,00	15.321.600,00	15.037.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.259.100,00	242.269.900,00	250.066.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.915.000,00	22.315.000,00	22.126.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.867.500,00	83.867.500,00	83.867.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.567.500,00	71.567.500,00	71.567.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.900.000,00	202.579.000,00	188.055.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000,00	202.579.000,00	176.125.300,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	11.930.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.677.973.000,00	6.206.176.400,00	6.203.776.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.677.973.000,00	6.206.176.400,00	6.203.776.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	435.670.000,00	337.370.000,00	441.272.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	402.670.000,00	304.370.000,00	365.624.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	402.670.000,00	304.370.000,00	365.624.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	33.000.000,00	33.000.000,00	75.648.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	33.000.000,00	33.000.000,00	75.648.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	283.288.400,00	204.042.000,00	201.222.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	157.888.400,00	99.542.000,00	96.722.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	157.888.400,00	99.542.000,00	96.722.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	125.400.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	125.400.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	170.354.700,00	137.484.700,00	137.484.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	17.800.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	15.500.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.300.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	142.560.000,00	116.640.000,00	116.640.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	142.560.000,00	116.640.000,00	116.640.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.994.700,00	9.994.700,00	9.994.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9.994.700,00	9.994.700,00	9.994.700,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.763.659.900,00	5.509.779.700,00	5.406.297.300,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.690.000,00	4.096.000,00	2.810.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.690.000,00	4.096.000,00	2.810.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.116.682.000,00	4.909.582.000,00	4.909.582.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.116.682.000,00	4.909.582.000,00	4.909.582.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.072.200,00	194.741.300,00	145.802.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.869.200,00	5.869.200,00	5.869.200,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.704.400,00	6.704.400,00	6.704.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.273.600,00	173.141.200,00	124.202.800,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.885.000,00	4.406.500,00	4.406.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.720.000,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.640.000,00	235.860.000,00	235.860.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.440.000,00	225.660.000,00	225.660.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.575.700,00	165.500.400,00	112.242.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.395.700,00	137.320.400,00	84.062.400,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.180.000,00	28.180.000,00	28.180.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.504.658.150,00	12.607.898.600,00	12.966.262.600,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.454.718.150,00	8.655.458.600,00	8.650.658.600,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	9.724.500,00	8.281.500,00	8.281.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	9.724.500,00	8.281.500,00	8.281.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2.544.000,00	2.266.500,00	2.266.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	7.180.500,00	6.015.000,00	6.015.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01		Fasilitas Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.996.030.400,00	1.831.847.000,00	1.831.847.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.996.030.400,00	1.831.847.000,00	1.831.847.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242.910.000,00	148.250.000,00	148.250.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.324.705.000,00	1.317.650.000,00	1.317.650.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	158.425.000,00	152.425.000,00	152.425.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0006	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	9.780.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	132.595.900,00	116.405.500,00	116.405.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	33.585.000,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	6.862.500,00	6.585.000,00	6.585.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	34.700.000,00	31.835.000,00	31.835.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.857.500,00	35.802.000,00	35.802.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0016	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	7.110.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.499.500,00	8.944.500,00	8.944.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.476.574.250,00	1.452.861.350,00	1.452.861.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.476.574.250,00	1.452.861.350,00	1.452.861.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	129.992.250,00	114.944.350,00	114.944.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.041.000,00	30.986.000,00	30.986.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	28.541.000,00	23.931.000,00	23.931.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.283.000.000,00	1.283.000.000,00	1.283.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.972.389.000,00	5.362.468.750,00	5.357.668.750,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.317.029.000,00	4.769.129.000,00	4.769.129.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.317.029.000,00	4.769.129.000,00	4.769.129.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.642.750,00	258.162.450,00	253.362.450,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.800,00	3.382.800,00	3.382.800,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.077.600,00	29.077.600,00	29.077.600,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.688.200,00	200.450.900,00	195.650.900,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.321.150,00	16.911.150,00	16.911.150,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.833.000,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.217.250,00	274.677.300,00	274.677.300,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.317.250,00	252.777.300,00	252.777.300,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.049.940.000,00	3.952.440.000,00	4.315.604.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	727.620.000,00	640.320.000,00	706.920.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	727.620.000,00	640.320.000,00	706.920.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	0,00	60.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	114.000.000,00	114.000.000,00	117.600.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	613.620.000,00	526.320.000,00	529.320.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.596.000.000,00	1.585.800.000,00	2.217.764.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	702.157.000,00	691.957.000,00	428.102.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	201.957.000,00	191.757.000,00	51.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000,00	148.800.000,00	147.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60.000.000,00	60.000.000,00	48.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	91.400.000,00	91.400.000,00	109.102.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	73.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	216.000.000,00	216.000.000,00	1.347.964.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	216.000.000,00	216.000.000,00	396.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	951.964.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	468.593.000,00	468.593.000,00	262.498.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.100.000,00	53.100.000,00	38.548.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	379.843.000,00	379.843.000,00	198.050.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.650.000,00	35.650.000,00	25.900.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	209.250.000,00	209.250.000,00	179.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	205.500.000,00	205.500.000,00	179.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.726.320.000,00	1.726.320.000,00	1.390.920.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.726.320.000,00	1.726.320.000,00	1.390.920.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	0,00	19.200.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000,00	300.000.000,00	39.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1.426.320.000,00	1.426.320.000,00	1.332.720.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	8.809.080.400,00	8.164.263.650,00	8.352.063.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.809.080.400,00	8.164.263.650,00	8.352.063.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.874.502.000,00	2.593.376.150,00	2.788.376.150,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.546.656.100,00	1.513.674.400,00	1.708.674.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.546.656.100,00	1.513.674.400,00	1.708.674.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	114.460.000,00	114.470.200,00	114.470.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114.460.000,00	114.470.200,00	114.470.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	298.165.250,00	262.124.050,00	262.124.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	298.165.250,00	262.124.050,00	262.124.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	782.204.100,00	610.854.850,00	610.854.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	782.204.100,00	610.854.850,00	610.854.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	67.939.700,00	33.161.600,00	33.161.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	67.939.700,00	33.161.600,00	33.161.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.076.850,00	59.091.050,00	59.091.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	65.076.850,00	59.091.050,00	59.091.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	60.074.100,00	48.051.450,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	48.051.450,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	60.074.100,00	48.051.450,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.074.100,00	48.051.450,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.874.504.300,00	5.522.836.050,00	5.515.636.050,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.888.336.000,00	4.637.236.000,00	4.637.236.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.888.336.000,00	4.637.236.000,00	4.637.236.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.596.200,00	434.393.200,00	421.943.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.372.600,00	1.372.600,00	1.372.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.789.400,00	4.789.400,00	4.789.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.999.200,00	214.996.200,00	214.996.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	168.225.000,00	158.025.000,00	145.575.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.990.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.200.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.200.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.060.000,00	162.310.000,00	167.560.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.760.000,00	104.010.000,00	109.260.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.312.100,00	246.396.850,00	246.396.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.112.100,00	232.196.850,00	232.196.850,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	9.025.882.250,00	8.486.126.400,00	7.200.626.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.947.262.250,00	8.418.306.400,00	7.132.806.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.669.210.000,00	1.634.510.000,00	1.632.600.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.669.210.000,00	1.634.510.000,00	1.632.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	877.630.000,00	877.630.000,00	877.630.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	40.500.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	751.080.000,00	730.680.000,00	728.770.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.246.870.000,00	2.236.570.000,00	970.960.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.246.870.000,00	2.236.570.000,00	970.960.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	401.720.000,00	391.420.000,00	389.510.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	580.160.000,00	580.160.000,00	580.160.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.263.700.000,00	1.263.700.000,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.031.182.250,00	4.547.226.400,00	4.529.246.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.480.137.450,00	4.141.037.450,00	4.141.047.450,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.480.137.450,00	4.141.037.450,00	4.141.047.450,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.987.500,00	152.754.300,00	135.770.300,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.698.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.445.500,00	44.625.500,00	44.611.500,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.013.200,00	4.980.000,00	4.920.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.850.000,00	99.850.000,00	82.940.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.244.000,00	139.244.000,00	138.254.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.524.000,00	67.524.000,00	67.524.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.720.000,00	60.720.000,00	59.730.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.313.300,00	110.690.650,00	110.675.100,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.613.300,00	92.990.650,00	92.975.100,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	73.520.000,00	62.720.000,00	62.720.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	73.520.000,00	62.720.000,00	62.720.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	7.817.430.100,00	7.067.495.450,00	6.539.245.450,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	159.960.000,00	94.931.650,00	94.931.650,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	19.685.000,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.685.000,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	19.685.000,00	16.383.950,00	16.383.950,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	104.000.000,00	57.327.700,00	57.327.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	104.000.000,00	57.327.700,00	57.327.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	104.000.000,00	57.327.700,00	57.327.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	36.275.000,00	21.220.000,00	21.220.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.270.000,00	21.220.000,00	21.220.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	28.270.000,00	21.220.000,00	21.220.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	8.005.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.005.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.657.470.100,00	6.972.563.800,00	6.444.313.800,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	57.666.000,00	42.005.000,00	75.505.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	57.666.000,00	42.005.000,00	75.505.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	8.661.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	49.005.000,00	42.005.000,00	75.505.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	292.938.000,00	292.938.000,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	292.938.000,00	292.938.000,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	292.938.000,00	292.938.000,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	44.415.000,00	42.345.000,00	59.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.415.000,00	42.345.000,00	59.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	44.415.000,00	42.345.000,00	59.345.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	616.680.900,00	501.950.900,00	204.906.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	616.680.900,00	501.950.900,00	204.906.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	44.070.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	65.610.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	85.338.900,00	80.288.900,00	114.288.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	421.662.000,00	421.662.000,00	90.618.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	204.154.000,00	186.644.000,00	203.144.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	204.154.000,00	186.644.000,00	203.144.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	204.154.000,00	186.644.000,00	203.144.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.441.616.200,00	5.906.680.900,00	5.901.412.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.397.092.000,00	5.053.892.000,00	5.053.892.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.397.092.000,00	5.053.892.000,00	5.053.892.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.769.800,00	259.251.450,00	256.851.450,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.319.400,00	5.318.600,00	5.318.600,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.303.300,00	26.381.300,00	26.381.300,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.289.100,00	195.992.900,00	193.592.900,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.548.000,00	21.558.650,00	21.558.650,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.310.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.106.900,00	200.000.000,00	209.382.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	20.862.900,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.500.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.744.000,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	9.382.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.376.000,00	319.056.000,00	306.806.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.276.000,00	144.276.000,00	144.276.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.100.000,00	167.780.000,00	155.530.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.271.500,00	74.481.450,00	74.481.450,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.881.500,00	64.091.450,00	56.316.450,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.390.000,00	10.390.000,00	18.165.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.325.850.800,00	7.674.294.150,00	7.262.594.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.325.850.800,00	7.674.294.150,00	7.262.594.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	56.399.500,00	47.124.500,00	46.134.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.959.500,00	6.184.500,00	5.194.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.179.650,00	2.629.650,00	2.629.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	6.779.850,00	3.554.850,00	2.564.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	44.440.000,00	40.940.000,00	40.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	44.440.000,00	40.940.000,00	40.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	37.545.500,00	34.145.500,00	34.145.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.545.500,00	34.145.500,00	34.145.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	36.545.650,00	33.145.650,00	33.145.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	999.850,00	999.850,00	999.850,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.738.350,00	142.738.350,00	403.528.350,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	159.738.350,00	142.738.350,00	403.528.350,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	81.299.650,00	67.699.650,00	313.869.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.114.950,00	20.714.950,00	20.714.950,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	54.323.750,00	54.323.750,00	68.943.750,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	731.910.000,00	731.910.000,00	62.810.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	731.910.000,00	731.910.000,00	62.810.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	95.530.000,00	95.530.000,00	450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	412.075.000,00	412.075.000,00	8.430.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	224.305.000,00	224.305.000,00	53.930.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.940.000,00	11.940.000,00	11.940.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.328.317.450,00	6.706.435.800,00	6.704.035.800,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.085.265.000,00	5.808.265.000,00	5.808.265.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.085.265.000,00	5.808.265.000,00	5.808.265.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.419.650,00	98.345.650,00	98.413.150,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	440.000,00	440.000,00	440.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.083.400,00	2.083.400,00	2.083.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.537.100,00	69.948.500,00	69.948.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.533.750,00	5.533.750,00	5.601.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.485.400,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.240.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.875.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.475.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.400.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.850.000,00	565.950.000,00	560.070.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.450.000,00	257.450.000,00	257.450.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515.400.000,00	303.500.000,00	297.620.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.907.800,00	221.675.150,00	225.087.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.977.800,00	95.495.150,00	98.907.650,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.930.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.718.174.000,00	40.636.869.500,00	39.883.481.100,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.111.956.000,00	9.784.651.000,00	9.121.137.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.010.156.000,00	7.859.870.200,00	6.480.613.100,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	626.000.000,00	544.390.200,00	659.390.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	626.000.000,00	544.390.200,00	659.390.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.384.156.000,00	7.315.480.000,00	5.821.222.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	7.384.156.000,00	7.315.480.000,00	5.821.222.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.001.800.000,00	1.859.000.000,00	2.574.743.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.001.800.000,00	1.859.000.000,00	2.574.743.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.001.800.000,00	1.859.000.000,00	2.574.743.900,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000,00	65.780.800,00	65.780.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000,00	65.780.800,00	65.780.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000,00	65.780.800,00	65.780.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.606.218.000,00	30.852.218.500,00	30.762.343.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	31.606.218.000,00	30.852.218.500,00	30.762.343.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	23.380.760.000,00	23.240.890.000,00	24.449.214.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	23.089.870.000,00	23.059.510.000,00	23.267.834.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	23.089.870.000,00	23.059.510.000,00	23.267.834.800,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	290.890.000,00	181.380.000,00	1.181.380.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	290.890.000,00	181.380.000,00	1.181.380.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	383.676.000,00	255.514.000,00	255.514.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	383.676.000,00	255.514.000,00	255.514.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	160.485.000,00	113.610.000,00	113.610.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	223.191.000,00	141.904.000,00	141.904.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.293.400.000,00	1.293.400.000,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.293.400.000,00	1.293.400.000,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.293.400.000,00	1.293.400.000,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.548.382.000,00	6.062.414.500,00	6.057.614.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.441.512.000,00	5.099.312.000,00	5.099.312.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.439.612.000,00	5.097.412.000,00	5.097.412.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.236.600,00	572.801.600,00	572.801.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.398.200,00	3.398.200,00	3.398.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.188.200,00	5.188.200,00	5.188.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	477.247.700,00	462.443.700,00	462.443.700,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.352.500,00	47.721.500,00	47.721.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.970.000,00	49.970.000,00	49.970.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.509.500,00	265.509.500,00	260.709.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.200.000,00	47.200.000,00	47.080.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.149.500,00	195.149.500,00	190.349.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.160.000,00	23.160.000,00	23.280.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.141.900,00	119.809.400,00	119.809.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.721.900,00	107.389.400,00	107.389.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000						Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	35.037.549.038,00	31.505.472.200,00	31.199.659.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	765.771.600,00	706.407.500,00	706.407.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	765.771.600,00	706.407.500,00	706.407.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	245.374.600,00	214.257.000,00	214.257.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	83.024.000,00	60.559.500,00	60.559.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	48.929.000,00	32.812.000,00	32.812.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	34.095.000,00	27.747.500,00	27.747.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	162.350.600,00	153.697.500,00	153.697.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	162.350.600,00	153.697.500,00	153.697.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	484.917.000,00	469.765.500,00	469.765.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	33.017.000,00	19.245.000,00	19.245.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	33.017.000,00	19.245.000,00	19.245.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	451.900.000,00	450.520.500,00	450.520.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	451.900.000,00	450.520.500,00	450.520.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35.480.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35.480.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	35.480.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34.271.777.438,00	30.799.064.700,00	30.493.251.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.492.320.000,00	1.457.920.000,00	1.059.125.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.112.025.600,00	1.084.425.600,00	747.460.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.112.025.600,00	1.084.425.600,00	747.460.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.229.000,00	125.329.000,00	54.342.550,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	306.450.600,00	299.550.600,00	295.994.650,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	673.346.000,00	659.546.000,00	397.123.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	380.294.400,00	373.494.400,00	311.664.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	51.981.100,00	51.981.100,00	40.265.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	51.981.100,00	51.981.100,00	40.265.300,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	328.313.300,00	321.513.300,00	271.399.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	328.313.300,00	321.513.300,00	271.399.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	32.779.457.438,00	29.341.144.700,00	29.434.126.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.067.436.600,00	844.608.800,00	812.416.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	655.794.000,00	451.066.200,00	451.259.100,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	567.692.000,00	379.384.200,00	379.566.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	88.102.000,00	71.682.000,00	71.692.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	411.642.600,00	393.542.600,00	361.157.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	411.642.600,00	393.542.600,00	361.157.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.024.648.200,00	412.828.200,00	412.817.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	1.024.648.200,00	412.828.200,00	412.817.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	513.569.200,00	205.569.200,00	205.569.200,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	511.079.000,00	207.259.000,00	207.248.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.154.729.900,00	905.654.900,00	1.038.039.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.154.729.900,00	905.654.900,00	1.038.039.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	1.154.729.900,00	905.654.900,00	1.038.039.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	43.660.000,00	31.282.050,00	31.282.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	43.660.000,00	31.282.050,00	31.282.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	43.660.000,00	31.282.050,00	31.282.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	417.844.438,00	152.598.900,00	152.598.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	417.844.438,00	152.598.900,00	152.598.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	139.220.000,00	112.677.900,00	112.677.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	48.818.000,00	39.921.000,00	39.921.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	229.806.438,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.071.138.300,00	26.994.171.850,00	26.986.971.850,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.404.500,00	7.404.500,00	7.404.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.404.500,00	7.404.500,00	7.404.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.775.571.000,00	25.776.771.000,00	25.776.771.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.775.571.000,00	25.776.771.000,00	25.776.771.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.495.800,00	462.541.300,00	442.841.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.959.600,00	6.959.600,00	6.959.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.862.000,00	116.862.000,00	116.862.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.740.800,00	307.786.300,00	288.097.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.593.400,00	15.593.400,00	15.581.900,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.658.000,00	207.158.000,00	207.158.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.660.000,00	15.660.000,00	15.660.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.998.000,00	191.498.000,00	191.498.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.009.000,00	540.297.050,00	552.797.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.979.000,00	197.267.050,00	209.767.050,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.030.000,00	22.030.000,00	22.030.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	321.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.017.528.300,00	12.624.940.200,00	13.662.540.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.766.876.350,00	2.846.314.600,00	3.774.382.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.730.570.000,00	2.707.320.000,00	3.623.988.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.168.570.000,00	672.320.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.168.570.000,00	672.320.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.562.000.000,00	2.035.000.000,00	3.623.988.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.562.000.000,00	2.035.000.000,00	3.623.988.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	9.568.750,00	6.256.000,00	11.956.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	9.568.750,00	6.256.000,00	11.956.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.568.750,00	6.256.000,00	11.956.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	26.737.600,00	132.738.600,00	138.438.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	26.737.600,00	132.738.600,00	138.438.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	26.737.600,00	132.738.600,00	138.438.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.250.651.950,00	9.778.625.600,00	9.888.157.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.017.620.000,00	2.987.020.000,00	4.182.740.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.017.620.000,00	2.987.020.000,00	4.182.740.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.802.620.000,00	2.772.020.000,00	3.794.120.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	215.000.000,00	215.000.000,00	388.620.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.233.031.950,00	6.791.605.600,00	5.705.417.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.907.500,00	26.520.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.907.500,00	26.520.000,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.467.743.000,00	5.073.753.000,00	5.092.363.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.426.983.000,00	5.033.283.000,00	5.033.283.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.760.000,00	40.470.000,00	59.080.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.100.250,00	511.307.050,00	253.406.550,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.354.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	427.764.000,00	424.973.000,00	220.113.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.862.250,00	59.860.050,00	6.819.550,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.965.200,00	231.965.200,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.965.200,00	231.965.200,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	874.684.000,00	845.682.500,00	257.270.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	692.784.000,00	663.782.500,00	75.370.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.900.000,00	161.900.000,00	161.900.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.632.000,00	102.377.850,00	102.377.850,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.662.000,00	82.407.850,00	82.407.850,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.970.000,00	19.970.000,00	19.970.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	40.146.344.000,00	38.489.944.000,00	35.489.944.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	40.146.344.000,00	38.489.944.000,00	35.489.944.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	40.146.344.000,00	38.489.944.000,00	35.489.944.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.146.344.000,00	38.489.944.000,00	35.489.944.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.783.864.000,00	24.127.464.000,00	24.127.464.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.783.864.000,00	24.127.464.000,00	24.127.464.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.679.930.000,00	12.679.930.000,00	9.679.930.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.679.930.000,00	12.679.930.000,00	9.679.930.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.070.000,00	857.070.000,00	857.070.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	832.070.000,00	832.070.000,00	832.070.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	26.157.268.900,00	26.833.847.200,00	26.955.847.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	42.505.000,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	42.505.000,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	42.505.000,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.505.000,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	42.505.000,00	23.928.750,00	23.928.750,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	26.114.763.900,00	26.809.918.450,00	26.931.918.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	26.114.763.900,00	26.809.918.450,00	26.931.918.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.114.763.900,00	26.809.918.450,00	26.931.918.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.025.567.600,00	696.681.000,00	696.681.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	880.565.000,00	587.385.000,00	587.385.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6.850.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	138.152.600,00	106.506.000,00	106.506.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	24.141.846.800,00	25.412.727.550,00	25.517.727.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24.014.932.800,00	25.331.918.800,00	25.436.918.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	48.602.000,00	20.641.500,00	20.641.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	78.312.000,00	60.167.250,00	60.167.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	907.156.000,00	661.304.900,00	678.304.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	120.596.000,00	116.337.550,00	116.337.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	511.130.000,00	312.996.450,00	312.996.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	275.430.000,00	231.970.900,00	248.970.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	40.193.500,00	39.205.000,00	39.205.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40.193.500,00	39.205.000,00	39.205.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002						Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1.220.508.300,00	886.127.150,00	896.127.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.220.508.300,00	886.127.150,00	896.127.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	346.725.200,00	265.121.200,00	275.121.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6.320.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	278.505.000,00	231.455.000,00	238.655.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	22.190.200,00	6.590.200,00	9.390.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	39.710.000,00	20.756.000,00	20.756.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	269.470.750,00	250.406.350,00	250.406.350,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	45.350.000,00	37.512.000,00	37.512.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	77.800.750,00	74.864.350,00	74.864.350,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	146.320.000,00	138.030.000,00	138.030.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	598.457.350,00	364.744.600,00	364.744.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	280.389.850,00	181.577.100,00	181.577.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	121.347.500,00	53.347.500,00	53.347.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	196.720.000,00	129.820.000,00	129.820.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5.855.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5.855.000,00	5.855.000,00	5.855.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003						Asisten Administrasi Umum	13.133.409.900,00	11.524.297.550,00	11.809.897.550,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	279.230.750,00	215.684.250,00	215.684.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	151.930.750,00	127.007.250,00	127.007.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	143.773.250,00	119.743.450,00	119.743.450,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.155.050,00	24.311.050,00	24.311.050,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	7.249.650,00	5.447.250,00	5.447.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	7.049.700,00	5.277.150,00	5.277.150,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.327.900,00	13.090.800,00	13.090.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	527.800,00	495.850,00	495.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.618.200,00	95.432.400,00	95.432.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	113.618.200,00	95.432.400,00	95.432.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	8.157.500,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	8.157.500,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	8.157.500,00	7.263.800,00	7.263.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	127.300.000,00	88.677.000,00	88.677.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	118.500.000,00	83.657.000,00	83.657.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	64.794.000,00	57.129.000,00	57.129.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	40.794.000,00	34.479.000,00	34.479.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	1.500.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	52.206.000,00	25.163.000,00	25.163.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	22.713.000,00	22.488.000,00	22.488.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	29.493.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	8.800.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	5.600.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	5.600.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	1.600.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1.600.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	1.600.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.600.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	12.854.179.150,00	11.308.613.300,00	11.594.213.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	12.854.179.150,00	11.308.613.300,00	11.594.213.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.854.179.150,00	11.308.613.300,00	11.594.213.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.480.000,00	234.480.000,00	220.080.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	234.480.000,00	234.480.000,00	220.080.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.582.428.400,00	3.209.215.500,00	3.409.215.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	940.408.100,00	607.908.100,00	807.908.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	157.353.700,00	157.353.700,00	157.353.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.374.156.600,00	1.356.071.200,00	1.356.071.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.510.000,00	67.882.500,00	67.882.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	100.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.175.000,00	1.623.975.000,00	1.623.975.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	692.975.000,00	692.975.000,00	692.975.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.007.200.000,00	931.000.000,00	931.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.731.665.000,00	1.610.521.250,00	1.610.521.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.529.000,00	436.529.000,00	436.529.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	995.536.000,00	874.392.250,00	874.392.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	362.866.750,00	341.990.650,00	341.990.650,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	142.027.800,00	132.243.800,00	132.243.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99.519.000,00	94.504.000,00	94.504.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	121.319.950,00	115.242.850,00	115.242.850,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.412.564.000,00	2.458.430.900,00	2.458.430.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.628.986.000,00	2.004.953.250,00	2.004.953.250,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	548.197.000,00	380.233.600,00	380.233.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	235.381.000,00	73.244.050,00	73.244.050,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	50.818.694.000,00	49.055.861.000,00	49.051.061.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	50.818.694.000,00	49.055.861.000,00	49.051.061.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.296.438.500,00	6.160.688.500,00	5.914.390.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	220.048.500,00	136.798.500,00	135.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	220.048.500,00	136.798.500,00	135.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.946.150.000,00	3.928.650.000,00	3.688.650.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.673.100.000,00	2.673.100.000,00	2.433.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.231.800.000,00	1.214.300.000,00	1.214.300.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.130.240.000,00	2.095.240.000,00	2.090.440.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	2.130.240.000,00	2.095.240.000,00	2.090.440.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.522.255.500,00	42.895.172.500,00	43.136.671.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.328.240.000,00	3.943.240.000,00	3.943.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.328.240.000,00	3.943.240.000,00	3.943.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.185.415.100,00	1.132.810.100,00	1.096.386.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	459.310.100,00	424.205.100,00	376.801.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.380.000,00	67.380.000,00	78.360.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.600.000,00	496.100.000,00	496.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.750.000,00	138.750.000,00	138.750.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	623.593.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.593.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480.000.000,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.850.478.000,00	1.843.678.000,00	2.121.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.000.000,00	55.000.000,00	60.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.078.000,00	237.078.000,00	270.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.558.400.000,00	1.551.600.000,00	1.791.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.249.600,00	329.584.600,00	329.584.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	233.719.600,00	205.054.600,00	205.054.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.530.000,00	124.530.000,00	124.530.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.003.414.000,00	22.987.014.000,00	22.987.014.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.493.414.000,00	22.477.014.000,00	22.477.014.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	15.172.865.800,00	12.658.845.800,00	12.658.845.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	53.805.800,00	53.805.800,00	53.805.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15.119.060.000,00	12.605.040.000,00	12.605.040.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.526.324.000,00	5.937.343.750,00	5.982.543.750,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.526.324.000,00	5.937.343.750,00	5.982.543.750,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	6.526.324.000,00	5.937.343.750,00	5.982.543.750,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	623.554.000,00	574.579.000,00	624.683.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	522.739.000,00	496.489.000,00	546.489.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	310.909.000,00	305.459.000,00	355.459.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18.090.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	23.490.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	170.250.000,00	179.300.000,00	179.300.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	34.725.000,00	21.300.000,00	21.404.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	30.325.000,00	18.200.000,00	17.450.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000,00	1.550.000,00	2.404.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	66.090.000,00	56.790.000,00	56.790.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.360.000,00	18.460.000,00	18.460.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	46.730.000,00	38.330.000,00	38.330.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	207.170.000,00	194.495.000,00	194.495.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	121.420.000,00	125.170.000,00	125.170.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	92.710.000,00	100.085.000,00	100.085.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.710.000,00	25.085.000,00	25.085.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	27.100.000,00	23.475.000,00	23.475.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.480.000,00	20.855.000,00	20.855.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	58.650.000,00	45.850.000,00	45.850.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	26.030.000,00	20.630.000,00	20.630.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	32.620.000,00	25.220.000,00	25.220.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.695.600.000,00	5.168.269.750,00	5.163.365.750,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.682.750,00	1.850.000,00	1.850.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.682.750,00	1.850.000,00	1.850.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.921.603.000,00	4.619.017.700,00	4.619.017.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.899.953.000,00	4.600.867.700,00	4.600.867.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.650.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.703.250,00	242.679.550,00	237.720.950,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.162.600,00	1.162.600,00	1.162.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.254.400,00	1.254.400,00	1.254.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.497.500,00	76.055.200,00	71.096.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.688.750,00	12.107.350,00	12.107.350,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.400.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.780.000,00	183.000.000,00	183.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.280.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.431.000,00	115.122.500,00	115.177.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.231.000,00	100.922.500,00	100.977.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	209.713.667.554,00	202.246.139.905,00	193.869.745.655,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	209.713.667.554,00	202.246.139.905,00	193.869.745.655,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	185.580.715.212,00	179.857.497.412,00	171.174.403.162,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.010.311.100,00	878.121.600,00	923.619.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0,00	0,00	23.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0,00	0,00	11.100.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	4.025.000,00	0,00	2.852.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	256.942.100,00	179.622.100,00	167.968.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	80.337.350,00	52.424.850,00	71.674.850,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18.231.650,00	7.674.650,00	7.674.650,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	650.775.000,00	638.400.000,00	638.400.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	159.330.000,00	133.780.000,00	133.780.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	159.330.000,00	133.780.000,00	133.780.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	213.390.000,00	212.142.500,00	212.142.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13.297.500,00	5.250.000,00	5.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	200.092.500,00	206.892.500,00	206.892.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	184.112.379.112,00	178.570.653.312,00	169.842.061.062,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	162.310.460.000,00	162.310.460.000,00	154.769.555.200,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.281.422.912,00	3.415.022.912,00	2.227.335.462,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.520.496.200,00	12.845.170.400,00	12.845.170.400,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	85.305.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.305.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	560.917.500,00	502.722.000,00	502.722.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	560.917.500,00	502.722.000,00	502.722.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	9.600.000,00	100.900.000,00	100.900.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.386.500,00	4.491.000,00	4.491.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	142.620.000,00	44.730.000,00	44.730.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	7.203.000,00	131.250.000,00	131.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	193.140.000,00	103.050.000,00	103.050.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	177.968.000,00	118.301.000,00	118.301.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.000.443.500,00	2.661.590.500,00	2.861.590.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.000.443.500,00	2.661.590.500,00	2.861.590.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	390.771.000,00	343.671.000,00	343.671.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.181.607.500,00	960.054.500,00	960.054.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.428.065.000,00	1.357.865.000,00	1.557.865.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.571.591.342,00	19.224.329.993,00	19.331.029.993,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.106.631.242,00	17.409.356.143,00	17.409.356.143,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.106.631.242,00	17.409.356.143,00	17.409.356.143,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.670.650.600,00	1.077.189.000,00	1.110.769.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.882.000,00	3.882.000,00	3.882.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.139.200,00	4.139.200,00	4.139.200,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.573.667.900,00	1.004.068.300,00	1.036.828.300,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.652.500,00	60.299.500,00	61.119.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.509.000,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.790.100,00	252.790.100,00	277.790.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	113.369.100,00	113.369.100,00	113.369.100,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.421.000,00	139.421.000,00	164.421.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.860.000,00	94.860.000,00	142.980.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000,00	52.200.000,00	100.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.960.000,00	21.960.000,00	22.080.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.659.400,00	390.134.750,00	390.134.750,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.409.400,00	306.884.750,00	306.884.750,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.250.000,00	83.250.000,00	83.250.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.490.033.500,00	6.503.887.500,00	6.757.887.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	6.906.005.500,00	6.031.154.500,00	6.162.754.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	749.687.500,00	422.349.000,00	522.349.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	246.437.500,00	129.055.500,00	129.055.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	61.475.000,00	47.562.500,00	47.562.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	48.015.000,00	16.227.500,00	16.227.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.510.000,00	18.283.000,00	18.283.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.560.000,00	17.837.500,00	17.837.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	29.775.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	7.102.500,00	3.945.000,00	3.945.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	98.875.000,00	84.402.500,00	84.402.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	28.125.000,00	26.392.500,00	26.392.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	48.720.000,00	37.960.000,00	37.960.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	22.030.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	197.387.500,00	160.001.500,00	160.001.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	57.900.000,00	39.187.500,00	39.187.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	17.887.500,00	14.400.000,00	14.400.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	121.600.000,00	106.414.000,00	106.414.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	206.987.500,00	48.889.500,00	148.889.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	3.960.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	203.027.500,00	46.315.500,00	146.315.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.156.318.000,00	5.608.805.500,00	5.640.405.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.202.500,00	1.332.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.202.500,00	1.332.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.525.260.000,00	5.007.543.000,00	5.007.543.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.524.753.000,00	5.007.153.000,00	5.007.153.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	507.000,00	390.000,00	390.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000,00	585.000,00	585.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000,00	585.000,00	585.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.165.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.165.000,00	15.640.000,00	15.640.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.808.000,00	385.492.500,00	385.302.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.109.800,00	1.109.800,00	1.109.800,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.085.200,00	1.085.200,00	895.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.722.200,00	77.282.500,00	77.282.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.250.800,00	675.000,00	675.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.300.000,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.240.000,00	140.340.000,00	172.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.140.000,00	111.240.000,00	142.900.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.270.000,00	57.127.500,00	57.127.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.740.000,00	53.597.500,00	53.597.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13		Penataan Organisasi	975.000,00	875.000,00	875.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	975.000,00	875.000,00	875.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	584.028.000,00	472.733.000,00	595.133.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	584.028.000,00	472.733.000,00	595.133.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	584.028.000,00	472.733.000,00	595.133.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	584.028.000,00	472.733.000,00	595.133.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.833.972.000,00	1.562.457.300,00	1.557.657.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.833.972.000,00	1.562.457.300,00	1.557.657.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	818.040.000,00	583.390.000,00	553.325.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	582.201.800,00	371.401.800,00	341.337.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	582.201.800,00	371.401.800,00	341.337.100,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	235.838.200,00	211.988.200,00	211.988.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	176.108.800,00	158.358.800,00	158.358.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	59.729.400,00	53.629.400,00	53.629.400,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.015.932.000,00	979.067.300,00	1.004.332.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	807.213.200,00	791.347.000,00	791.347.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	805.532.000,00	790.132.000,00	790.132.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.681.200,00	1.215.000,00	1.215.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.338.100,00	58.744.600,00	56.677.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.878.900,00	1.878.900,00	1.878.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.107.600,00	2.107.600,00	2.107.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.021.600,00	38.292.100,00	36.224.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.430.000,00	2.566.000,00	2.566.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	42.542.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	42.542.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.600.000,00	65.200.000,00	61.990.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	4.430.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.600.000,00	51.200.000,00	45.560.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.680.700,00	50.125.700,00	50.125.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.110.700,00	46.555.700,00	46.555.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	15.110.294.700,00	13.097.818.200,00	13.195.418.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.110.294.700,00	13.097.818.200,00	13.195.418.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	15.110.294.700,00	13.097.818.200,00	13.195.418.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	656.955.000,00	279.630.000,00	379.630.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	608.105.000,00	247.430.000,00	347.430.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	434.045.000,00	167.720.000,00	167.720.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	16.650.000,00	0,00	73.315.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	16.650.000,00	0,00	26.684.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	23.850.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	116.910.000,00	72.510.000,00	72.510.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	48.850.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	48.850.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.267.250.000,00	755.450.000,00	755.450.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	1.267.250.000,00	755.450.000,00	755.450.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	132.720.000,00	66.120.000,00	66.120.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.650.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	976.180.000,00	575.380.000,00	575.380.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	108.700.000,00	80.950.000,00	80.950.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.186.089.700,00	12.062.738.200,00	12.060.338.200,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.248.042.000,00	8.906.042.000,00	8.906.042.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.248.042.000,00	8.906.042.000,00	8.906.042.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.757.020.000,00	2.384.400.000,00	2.384.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.757.020.000,00	2.384.400.000,00	2.384.400.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.498.150,00	276.235.700,00	273.835.700,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	276.010.400,00	262.511.800,00	260.111.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.474.350,00	8.035.500,00	8.035.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.325.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	474.591.800,00	141.534.800,00	141.534.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	133.668.800,00	9.642.800,00	9.642.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.923.000,00	131.892.000,00	131.892.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.716.800,00	150.216.800,00	150.216.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.750.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.466.800,00	122.966.800,00	122.966.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.220.950,00	204.308.900,00	204.308.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.810.950,00	174.898.900,00	174.898.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.410.000,00	29.410.000,00	29.410.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Bangli	10.782.611.000,00	10.106.473.200,00	10.021.673.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	10.782.611.000,00	10.106.473.200,00	10.021.673.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	10.782.611.000,00	10.106.473.200,00	10.021.673.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.930.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.930.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.930.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.183.700.500,00	1.188.745.500,00	1.400.657.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.757.500,00	27.527.500,00	27.527.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.757.500,00	27.527.500,00	27.527.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.150.943.000,00	1.161.218.000,00	1.373.130.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	258.000.000,00	305.718.000,00	316.695.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	265.000.000,00	262.050.000,00	329.550.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	270.000.000,00	266.050.000,00	333.050.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	357.943.000,00	327.400.000,00	393.835.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.710.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.710.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.710.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.877.500,00	12.955.000,00	34.482.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.877.500,00	12.955.000,00	34.482.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	34.877.500,00	12.955.000,00	34.482.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.825.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.825.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.825.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.494.568.000,00	8.885.867.700,00	8.567.628.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.440.000,00	6.827.500,00	6.827.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.440.000,00	6.827.500,00	6.827.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.044.522.000,00	6.533.322.000,00	6.533.322.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.044.522.000,00	6.533.322.000,00	6.533.322.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.361.800,00	371.262.300,00	371.703.100,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.832.000,00	2.832.000,00	2.832.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.100.200,00	353.318.700,00	353.318.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.879.600,00	10.861.600,00	11.302.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.300.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.250.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.050.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.050.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.929.661.000,00	1.895.511.000,00	1.576.831.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.685.000,00	55.685.000,00	55.685.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.868.976.000,00	1.834.826.000,00	1.516.146.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.533.200,00	78.944.900,00	78.944.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.173.200,00	67.584.900,00	67.584.900,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kintamani	4.498.692.400,00	4.040.700.200,00	4.118.514.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.490.850,00	123.150.850,00	108.508.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	123.490.850,00	123.150.850,00	108.508.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3.415.650,00	3.075.650,00	7.142.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.075.200,00	120.075.200,00	101.365.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.464.000,00	68.604.000,00	68.974.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.464.000,00	68.604.000,00	68.974.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.140.000,00	7.320.000,00	9.860.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.324.000,00	61.284.000,00	59.114.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.864.400,00	38.504.400,00	36.224.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.864.400,00	38.504.400,00	36.224.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.864.400,00	38.504.400,00	36.224.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97.484.000,00	73.514.000,00	69.816.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.484.000,00	73.514.000,00	69.816.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	97.484.000,00	73.514.000,00	69.816.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.161.389.150,00	3.736.926.950,00	3.834.991.050,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.780.000,00	27.780.000,00	16.730.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	720.000,00	720.000,00	720.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.060.000,00	27.060.000,00	16.010.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.685.777.000,00	3.300.677.000,00	3.300.677.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.685.777.000,00	3.300.677.000,00	3.300.677.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.262.650,00	180.308.250,00	236.360.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.182.650,00	179.228.250,00	235.280.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.900.000,00	138.900.000,00	110.300.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.900.000,00	115.900.000,00	87.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.669.500,00	89.261.700,00	170.923.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.019.500,00	85.611.700,00	167.273.250,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Susut	3.588.883.500,00	3.457.931.500,00	3.505.531.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.870.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.870.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.870.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	93.250.000,00	79.130.000,00	45.130.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	93.250.000,00	79.130.000,00	45.130.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.020.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.230.000,00	75.230.000,00	41.230.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.010.000,00	42.010.000,00	42.610.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.010.000,00	42.010.000,00	42.610.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49.010.000,00	42.010.000,00	42.610.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.389.650,00	11.747.050,00	11.768.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.389.650,00	11.747.050,00	11.768.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.389.650,00	11.747.050,00	11.768.050,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.800.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.800.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.800.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.403.563.850,00	3.299.234.450,00	3.380.213.450,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.013.462.000,00	2.939.162.000,00	2.939.162.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.013.462.000,00	2.939.162.000,00	2.939.162.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.207.600,00	160.258.200,00	224.056.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	946.200,00	946.200,00	946.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.980.500,00	150.659.600,00	213.659.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.980.900,00	6.552.400,00	7.350.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.200.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.062.000,00	50.062.000,00	47.041.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.062.000,00	50.062.000,00	47.041.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.440.000,00	107.440.000,00	107.440.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.650.000,00	67.650.000,00	67.650.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.480.000,00	36.480.000,00	36.480.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.392.250,00	42.312.250,00	62.514.250,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.922.250,00	36.922.250,00	57.124.250,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.470.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Tembuku	5.399.441.000,00	4.447.805.700,00	4.447.805.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.600.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.600.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.800.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.800.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.200.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.200.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.200.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.800.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.800.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.800.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.200.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.200.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.200.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.316.641.000,00	4.390.125.700,00	4.390.125.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.126.685.000,00	3.784.385.000,00	3.784.385.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.126.685.000,00	3.784.385.000,00	3.784.385.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.586.800,00	142.321.500,00	142.321.500,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.656.800,00	6.656.800,00	6.656.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.380.000,00	128.114.700,00	128.114.700,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	612.450.000,00	262.450.000,00	262.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.016.000,00	126.716.000,00	126.716.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.000.000,00	107.700.000,00	107.700.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.903.200,00	74.253.200,00	74.253.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.253.200,00	70.603.200,00	70.603.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.360.499.032,00	6.174.499.432,00	6.172.099.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.360.499.032,00	6.174.499.432,00	6.172.099.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.360.499.032,00	6.174.499.432,00	6.172.099.432,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	980.472.100,00	969.332.100,00	977.062.950,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	980.472.100,00	969.332.100,00	977.062.950,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	958.232.100,00	954.732.100,00	955.415.450,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	22.240.000,00	14.600.000,00	21.647.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	943.034.932,00	904.514.932,00	910.939.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	943.034.932,00	904.514.932,00	910.939.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	803.894.932,00	803.894.932,00	803.894.932,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120.305.000,00	94.005.000,00	91.050.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18.835.000,00	6.615.000,00	15.995.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	0,00	13.938.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	13.938.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	13.938.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	131.560.000,00	124.930.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	131.560.000,00	124.930.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	131.560.000,00	124.930.000,00	125.605.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	288.792.000,00	203.912.000,00	204.893.550,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	288.792.000,00	203.912.000,00	204.893.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	149.382.000,00	83.862.000,00	84.068.550,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	139.410.000,00	120.050.000,00	120.825.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.016.640.000,00	3.971.810.400,00	3.939.660.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.837.985.000,00	3.762.385.000,00	3.723.145.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.660.000,00	3.702.060.000,00	3.702.060.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60.325.000,00	60.325.000,00	21.085.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.610.400,00	78.230.800,00	86.277.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.386.200,00	1.386.200,00	1.386.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.863.200,00	12.863.200,00	12.863.200,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.931.000,00	53.551.400,00	60.498.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.430.000,00	7.430.000,00	8.530.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.870.000,00	41.020.000,00	42.520.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.750.000,00	35.750.000,00	37.250.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.174.600,00	90.174.600,00	87.717.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.114.600,00	80.114.600,00	77.657.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00

Kode	Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
TOTAL		1.408.865.475.166,00	1.339.337.070.492,00	1.218.328.853.411,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA



KABUPATEN BANGLI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.392.023.000,00	231.965.200,00	0,00	0,00	3.623.988.200,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.705.417.400,00	0,00	0,00	0,00	5.705.417.400,00
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.182.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.182.740.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.956.000,00	0,00	0,00	0,00	11.956.000,00
9	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.438.600,00	84.000.000,00	0,00	0,00	138.438.600,00
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	59.345.000,00	0,00	0,00	0,00	59.345.000,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	204.906.900,00	0,00	0,00	0,00	204.906.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	75.505.000,00	0,00	0,00	0,00	75.505.000,00
14	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	203.144.000,00	0,00	0,00	0,00	203.144.000,00
15	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
16	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	16.383.950,00	0,00	0,00	0,00	16.383.950,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	57.327.700,00	0,00	0,00	0,00	57.327.700,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	668.100.000,00	0,00	0,00	0,00	668.100.000,00
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.454.039.800,00	9.751.000.200,00	0,00	0,00	15.205.040.000,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.210.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	250.210.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
24	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	469.765.500,00	0,00	0,00	0,00	469.765.500,00
26	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	22.385.000,00	0,00	0,00	0,00	22.385.000,00
27	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	586.960.200,00	160.500.000,00	0,00	0,00	747.460.200,00
28	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
29	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	31.282.050,00	0,00	0,00	0,00	31.282.050,00
31	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.038.039.900,00	0,00	0,00	0,00	1.038.039.900,00
32	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	311.664.800,00	0,00	0,00	0,00	311.664.800,00
33	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	214.257.000,00	0,00	0,00	0,00	214.257.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
34	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	412.817.600,00	0,00	0,00	0,00	412.817.600,00
35	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	812.416.700,00	0,00	0,00	0,00	812.416.700,00
36	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	152.598.600,00	0,00	0,00	0,00	152.598.600,00
37	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	403.627.900,00	8.726.799.100,00	0,00	0,00	9.130.427.000,00
38	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	1.559.220.100,00	3.829.900,00	0,00	0,00	1.563.050.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
39	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	10.725.241.550,00	0,00	0,00	0,00	10.725.241.550,00
40	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Asisten Administrasi Umum	6.253.800,00	1.010.000,00	0,00	0,00	7.263.800,00
41	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Asisten Administrasi Umum	119.743.450,00	0,00	0,00	0,00	119.743.450,00
42	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	23.928.750,00	0,00	0,00	0,00	23.928.750,00
43	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	221.704.000,00	33.810.000,00	0,00	0,00	255.514.000,00
44	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
46	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.349.214.800,00	100.000.000,00	0,00	0,00	24.449.214.800,00
47	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	148.928.350,00	254.600.000,00	0,00	0,00	403.528.350,00
48	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.940.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940.000,00
49	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.134.500,00	0,00	0,00	0,00	46.134.500,00
50	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.810.000,00	0,00	0,00	0,00	62.810.000,00
51	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.611.835.800,00	92.200.000,00	0,00	0,00	6.704.035.800,00
52	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.145.500,00	0,00	0,00	0,00	34.145.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
53	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.350.100,00	0,00	0,00	0,00	94.350.100,00
54	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.603.600,00	0,00	0,00	0,00	49.603.600,00
55	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54.275.000,00	0,00	0,00	0,00	54.275.000,00
56	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.801.620.000,00	0,00	0,00	0,00	5.801.620.000,00
59	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.310.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.410.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
60	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.090.816.981,00	82.700.000,00	0,00	0,00	5.173.516.981,00
61	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	6. Infrastruktur	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	48.051.450,00	0,00	0,00	0,00	48.051.450,00
65	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	5.473.136.050,00	42.500.000,00	0,00	0,00	5.515.636.050,00
66	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.684.376.150,00	104.000.000,00	0,00	0,00	2.788.376.150,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
67	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	95.945.500,00	0,00	0,00	0,00	95.945.500,00
68	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.938.000,00	0,00	0,00	0,00	13.938.000,00
71	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.605.000,00	0,00	0,00	0,00	125.605.000,00
72	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	977.062.950,00	0,00	0,00	0,00	977.062.950,00
73	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	204.893.550,00	0,00	0,00	0,00	204.893.550,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
74	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	910.939.932,00	0,00	0,00	0,00	910.939.932,00
75	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.939.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.939.660.000,00
76	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	762.012.700,00	5.982.049.000,00	0,00	0,00	6.744.061.700,00
77	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	257.320.000,00	139.118.000,00	0,00	0,00	396.438.000,00
78	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	5.914.390.000,00	0,00	0,00	0,00	5.914.390.000,00
79	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	43.136.671.000,00	0,00	0,00	0,00	43.136.671.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
80	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	970.960.000,00	0,00	0,00	0,00	970.960.000,00
81	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	388.199.400,00	0,00	0,00	0,00	388.199.400,00
82	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	62.720.000,00	0,00	0,00	0,00	62.720.000,00
83	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.831.847.000,00	0,00	0,00	0,00	1.831.847.000,00
84	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.390.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.920.000,00
85	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.452.861.350,00	0,00	0,00	0,00	1.452.861.350,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
86	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.273.263.400,00	944.500.600,00	0,00	0,00	2.217.764.000,00
87	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.281.500,00	0,00	0,00	0,00	8.281.500,00
88	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	706.920.000,00	0,00	0,00	0,00	706.920.000,00
89	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.357.668.750,00	0,00	0,00	0,00	5.357.668.750,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
91	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	213.925.000,00	0,00	0,00	0,00	213.925.000,00
92	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	46.296.944.080,00	642.303.900,00	0,00	0,00	46.939.247.980,00
93	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	820.281.000,00	0,00	0,00	0,00	820.281.000,00
94	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	49.872.446.800,00	108.537.700,00	0,00	0,00	49.980.984.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
95	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	458.790.000,00	0,00	0,00	0,00	458.790.000,00
96	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	121.054.500,00	0,00	0,00	0,00	121.054.500,00
97	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	53.744.724.755,00	25.747.628.745,00	0,00	0,00	79.492.353.500,00
98	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
99	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUNG KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	186.292.800,00	12.600.000,00	0,00	0,00	198.892.800,00
100	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
101	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30.591.000,00	0,00	0,00	0,00	30.591.000,00
102	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	234.879.874.400,00	142.500.000,00	0,00	0,00	235.022.374.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
103	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.288.000,00	0,00	0,00	0,00	125.288.000,00
105	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
106	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
107	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.524.000,00	0,00	0,00	0,00	78.524.000,00
108	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.375.000,00	0,00	0,00	0,00	61.375.000,00
109	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Bangli	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
110	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bangli	505.528.500,00	0,00	0,00	0,00	505.528.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
111	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli	1.295.800.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	1.375.800.000,00
112	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Bangli Utara	12.520.000,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00
113	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Bangli Utara	584.213.000,00	0,00	0,00	0,00	584.213.000,00
114	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bangli Utara	1.054.100.000,00	163.600.000,00	0,00	0,00	1.217.700.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
115	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani I	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
116	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani I	587.150.000,00	0,00	0,00	0,00	587.150.000,00
117	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani I	1.436.928.500,00	161.771.500,00	0,00	0,00	1.598.700.000,00
118	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani II	573.828.500,00	0,00	0,00	0,00	573.828.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
119	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani II	922.262.002,00	125.637.998,00	0,00	0,00	1.047.900.000,00
120	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani III	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
121	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani III	531.328.500,00	0,00	0,00	0,00	531.328.500,00
122	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani III	911.443.000,00	175.957.000,00	0,00	0,00	1.087.400.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
123	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani IV	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00	8.760.000,00
124	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani IV	506.568.500,00	0,00	0,00	0,00	506.568.500,00
125	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani IV	856.392.000,00	42.208.000,00	0,00	0,00	898.600.000,00
126	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani V	582.450.000,00	0,00	0,00	0,00	582.450.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
127	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani V	1.672.446.000,00	92.054.000,00	0,00	0,00	1.764.500.000,00
128	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Kintamani VI	11.389.500,00	0,00	0,00	0,00	11.389.500,00
129	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Kintamani VI	493.912.000,00	0,00	0,00	0,00	493.912.000,00
130	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Kintamani VI	1.202.780.000,00	107.920.000,00	0,00	0,00	1.310.700.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
131	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Susut I	6.836.000,00	0,00	0,00	0,00	6.836.000,00
132	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Susut I	557.492.500,00	0,00	0,00	0,00	557.492.500,00
133	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut I	1.533.700.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	1.612.700.000,00
134	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Susut II	17.930.000,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
135	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Susut II	535.198.500,00	0,00	0,00	0,00	535.198.500,00
136	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Susut II	1.280.500.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00	1.403.700.000,00
137	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Tembuku I	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
138	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tembuku I	512.828.000,00	0,00	0,00	0,00	512.828.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
139	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku I	1.305.700.000,00	168.700.000,00	0,00	0,00	1.474.400.000,00
140	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Puskesmas Tembuku II	6.470.000,00	0,00	0,00	0,00	6.470.000,00
141	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas Tembuku II	537.858.500,00	0,00	0,00	0,00	537.858.500,00
142	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tembuku II	1.484.500.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	1.554.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
143	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah	4.331.637.634,00	12.851.449.000,00	0,00	0,00	17.183.086.634,00
144	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah	126.071.422.366,00	5.200.000.000,00	0,00	0,00	131.271.422.366,00
145	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	144.652.800,00	0,00	0,00	0,00	144.652.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
147	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.265.000,00	0,00	0,00	0,00	29.265.000,00
148	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.222.000,00	0,00	0,00	0,00	201.222.000,00
149	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	441.272.400,00	0,00	0,00	0,00	441.272.400,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137.484.700,00	0,00	0,00	0,00	137.484.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.396.297.300,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.406.297.300,00
153	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	65.780.800,00	0,00	0,00	0,00	65.780.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
155	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.463.113.100,00	17.500.000,00	0,00	0,00	6.480.613.100,00
157	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.537.743.900,00	37.000.000,00	0,00	0,00	2.574.743.900,00
158	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	53.920.000,00	0,00	0,00	0,00	53.920.000,00
159	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
160	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	5.312.355.513,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	9.312.355.513,00
161	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup	5.416.750,00	0,00	0,00	0,00	5.416.750,00
162	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	375.534.900,00	0,00	0,00	0,00	375.534.900,00
163	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	11.981.250,00	0,00	0,00	0,00	11.981.250,00
164	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	27.434.872.500,00	0,00	0,00	0,00	27.434.872.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
165	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
166	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Infrastruktur	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	6. Infrastruktur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
168	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	1.245.528.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.528.000,00
169	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
170	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	6.515.666.000,00	0,00	0,00	0,00	6.515.666.000,00
171	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Asisten Administrasi Umum	20.694.000,00	62.963.000,00	0,00	0,00	83.657.000,00
172	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Asisten Administrasi Umum	10.399.867.800,00	1.194.345.500,00	0,00	0,00	11.594.213.300,00
173	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Asisten Administrasi Umum	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
174	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	26.896.918.450,00	35.000.000,00	0,00	0,00	26.931.918.450,00
175	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	730.369.650,00	165.757.500,00	0,00	0,00	896.127.150,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
176	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	372.101.000,00	150.248.000,00	0,00	0,00	522.349.000,00
177	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	565.955.500,00	29.177.500,00	0,00	0,00	595.133.000,00
178	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.640.405.500,00	0,00	0,00	0,00	5.640.405.500,00
179	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	502.722.000,00	0,00	0,00	0,00	502.722.000,00
180	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.332.342.100,00	0,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	171.174.403.162,00
181	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.861.590.500,00	0,00	0,00	0,00	2.861.590.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
182	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19.053.239.893,00	277.790.100,00	0,00	0,00	19.331.029.993,00
183	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	440.064.600,00	0,00	0,00	0,00	440.064.600,00
184	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194.495.000,00	0,00	0,00	0,00	194.495.000,00
185	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	298.177.100,00	0,00	0,00	0,00	298.177.100,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	624.683.000,00	0,00	0,00	0,00	624.683.000,00
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	553.325.300,00	0,00	0,00	0,00	553.325.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	961.790.000,00	42.542.000,00	0,00	0,00	1.004.332.000,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.141.047.450,00	0,00	0,00	0,00	4.141.047.450,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	5.692.030.900,00	209.382.000,00	0,00	0,00	5.901.412.900,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.057.614.500,00	0,00	0,00	0,00	6.057.614.500,00
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.903.750.950,00	0,00	0,00	0,00	13.903.750.950,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	26.562.531.850,00	424.440.000,00	0,00	0,00	26.986.971.850,00
195	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.283.581.050,00	0,00	0,00	0,00	5.283.581.050,00
196	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	11.918.803.400,00	141.534.800,00	0,00	0,00	12.060.338.200,00
197	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	259.430.000,00	120.200.000,00	0,00	0,00	379.630.000,00
198	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	755.450.000,00	0,00	0,00	0,00	755.450.000,00
199	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kintamani	36.224.400,00	0,00	0,00	0,00	36.224.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
200	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kintamani	68.974.000,00	0,00	0,00	0,00	68.974.000,00
201	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kintamani	69.816.800,00	0,00	0,00	0,00	69.816.800,00
202	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kintamani	534.314.050,00	0,00	0,00	0,00	534.314.050,00
203	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kintamani	108.508.000,00	0,00	0,00	0,00	108.508.000,00
204	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Susut	42.610.000,00	0,00	0,00	0,00	42.610.000,00
205	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Susut	45.130.000,00	0,00	0,00	0,00	45.130.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
206	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Susut	21.100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00
207	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Susut	3.341.092.450,00	39.121.000,00	0,00	0,00	3.380.213.450,00
208	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Susut	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00
209	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Susut	11.768.050,00	0,00	0,00	0,00	11.768.050,00
210	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	35.489.944.000,00	0,00	0,00	0,00	35.489.944.000,00
211	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.858.588.650,00	6.600.000,00	0,00	0,00	4.865.188.650,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
212	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bangli	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
213	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bangli	1.400.657.700,00	0,00	0,00	0,00	1.400.657.700,00
214	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bangli	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	6.705.000,00
215	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bangli	8.567.628.500,00	0,00	0,00	0,00	8.567.628.500,00
216	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bangli	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
217	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bangli	34.482.000,00	0,00	0,00	0,00	34.482.000,00
218	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tembuku	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00
219	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tembuku	38.640.000,00	0,00	0,00	0,00	38.640.000,00
220	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tembuku	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
221	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tembuku	4.124.477.900,00	265.647.800,00	0,00	0,00	4.390.125.700,00
222	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tembuku	9.520.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00
223	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.481.514.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	2.499.014.000,00
224	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.632.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.600.000,00
225	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kintamani	3.300.677.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.677.000,00
TOTAL					968.210.393.306,00	80.276.399.043,00	2.227.335.462,00	167.614.725.600,00	1.218.328.853.411,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN



KABUPATEN BANGLI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						1		1
Golongan IV/d						3		3
Golongan IV/c		3				137		140
Golongan IV/b		26	28			245		299
Golongan IV/a			83	7		298	10	398
Golongan III/e								
Golongan III/d			14	44	2	665	72	797
Golongan III/c			1	65	7	363	214	650
Golongan III/b				11	1	320	72	404
Golongan III/a				5	5	114	489	613
Golongan II/e								
Golongan II/d						22	272	294
Golongan II/c						20	142	162
Golongan II/b						5	19	24
Golongan II/a						2	97	99
Golongan I/e								
Golongan I/d							20	20
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK							649	649

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH



KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023	5.465.663.912,00	0,00	1.343.590.542,00	4.122.073.370,00
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2023	6.854.570.960,00	8.821.882.871,00	0,00	15.676.453.831,00
3	Piutang Retribusi Daerah	2023	349.609.495,00	0,00	0,00	349.609.495,00
4	Piutang Transfer Antar Daerah	2023	73.177.294.980,00	0,00	46.287.352.230,00	26.889.942.750,00
5	Piutang Pajak Daerah	2024	38.799.756.571,00	0,00	1.340.456.587,00	37.459.299.984,00
Total			124.646.895.918,00	8.821.882.871,00	48.971.399.359,00	84.497.379.430,00

Kab. Bangli, 30 Desember 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA